

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2021-2023
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPLITBANGDA)
KABUPATEN BARITO TIMUR
2021**



<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

PRAKATA

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Perkenan-Nya, Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tahun 2021-2023 ini telah selesai disusun.

KLHS Perubahan RPJMD ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintahan Nomor 46 tahun 2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD.

Dokumen ini disusun sebagai laporan dalam kegiatan “Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2023” di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Permendagri no. 86 Tahun 2017, pasal 153 bahwa KLHS merupakan salah satu kaidah perumusan kebijakan pembangunan daerah yaitu di antaranya adalah RPJMD. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adatasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur disusun untuk dapat melengkapi proses pengkajian program pembangunan yang ada pada RPJMD. Penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023 telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.

Dokumen kajian ini berisi:

1. Pendahuluan yang berisi informasi yang menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta sistematika pembuatan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur.
2. Dasar teori yaitu teori yang digunakan pada laporan KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur.
3. Kondisi umum Kabupaten Barito Timur, dimana berisi pemaparan kondisi umum Kabupaten Barito Timur meliputi aspek geografis, daya dukung dan daya tampung, gambaran keuangan daerah dalam pencapaian TPB, dan peran pemangku kepentingan dalam pencapaian TPB.
4. Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan bab yang menjabarkan capaian indikator TPB yang meliputi indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator TPB yang tidak/belum ada data.
5. Analisis capaian indikator TPB pada OPD, yang menjelaskan penilaian dan analisis capaian indikator TPB setiap OPD.
6. Alternatif scenario dan rekomendasi, berisi alternatif skenario dan rekomendasi bagi Kabupaten Barito Timur dengan dan tanpa upaya tambahan dilihat dari daya dukung dan daya tampung serta ketercapaian terhadap TPB.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak pemangku kepentingan, pihak Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Pelaku Usaha, Filantropi, dan Tokoh Masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur.

Kami menyadari dokumen ini masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen ini.

Akhirnya kami berharap semoga dokumen ini dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2021-2023. Selain itu, sesuai dengan tujuannya semoga dengan adanya dokumen KLHS Perubahan RPJMD ini, maka Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2021-2023 dapat lebih meningkat kualitasnya dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalam RPJMD tersebut.

Agustus 2021,



IF. FRANZ SILA UTAMA, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680222 199308 1 001

<https://bappeda.baritotimor.go.id/>

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 RUANG LINGKUP	5
1.5 RINGKASAN PERUBAHAN KLHS PERUBAHAN TERHADAP KLHS RPJMD	7
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II DASAR TEORI.....	14
2.1 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS).....	14
2.2 PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	16
2.3 NILAI PENTING KLHS RPJMD.....	17
2.3.1 KETERKAITAN	17
2.3.2 KESEIMBANGAN	18
2.3.3 KEADILAN	18
2.4 PENDEKATAN KLHS RPJMD.....	19
2.5 PROSES KAJIAN	20
BAB III GAMBARAN UMUM	23
3.1 KONDISI GEOGRAFIS, FISIK DAN LINGKUNGAN.....	23
3.1.1 WILAYAH ADMINISTRATIF	23
3.1.2 KONDISI DEMOGRAFIS.....	26
3.1.3 KONDISI TOPOGRAFI.....	30
3.1.4 KONDISI KLIMATOLOGI	31
3.1.5 KONDISI GEOLOGI	32
3.1.6 KONDISI HIDROLOGI.....	33
3.1.7 FUNGSI KAWASAN HUTAN DAN PENGGUNAAN LAHAN	34
3.2 KONDISI BASELINE LINGKUNGAN HIDUP	36

3.2.1	KAPASITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGUNAN	37
3.2.2	DAYA DUKUNG PANGAN	37
3.2.3	DAYA DUKUNG AIR.....	40
3.2.4	KINERJA LAYANAN ATAU JASA EKOSISTEM	42
3.2.5	DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN DAN <i>FOOD ESTATE</i> DI KABUPATEN BARITO TIMUR	56
3.3	LAND SISTEM DAN KESESUAIAN LAHAN BARTIM	63
3.3.1	SISTEM LAHAN WILAYAH KAJIAN.....	63
3.3.2	JENIS TANAH WILAYAH KAJIAN.....	65
3.3.3	SISTEM LAHAN DAN KESESUAIAN LAHAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR	71
3.4	KONDISI ASPEK DAYA SAING DAERAH	96
3.4.1	KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH	96
3.4.2	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI.....	96
3.4.3	STRUKTUR PEREKONOMIAN.....	98
3.4.4	POTENSI PENGEMBANGAN PERTANIAN.....	99
3.4.5	POTENSI PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN.....	100
3.5	KINERJA KEUANGAN MASA LALU.....	101
3.5.1	KINERJA PELAKSANAAN APBD	102
3.5.2	NERACA DAERAH	114
BAB IV	ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	121
4.1.	KONDISI UMUM CAPAIAN TARGET TPB.....	121
4.2	INDIKATOR TPB YANG SUDAH DILAKSANAKAN DAN SUDAH MENCAPAI TARGET NASIONAL (SS)	125
4.3	INDIKATOR TPB YANG SUDAH DILAKSANAKAN TETAPI BELUM MENCAPAI TARGET (SB)	126
4.4	INDIKATOR TPB YANG TIDAK/BELUM ADA DATA (NA)	127
BAB V	ANALISIS CAPAIAN TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	129
5.1	CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	129
5.1.1	CAPAIAN INDIKATOR TPB ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PILAR SOSIAL	129
5.1.2	CAPAIAN INDIKATOR TPB ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PILAR LINGKUNGAN	131
5.1.3	CAPAIAN INDIKATOR TPB ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PILAR EKONOMI.....	132
5.1.4	CAPAIAN INDIKATOR TPB ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PILAR HUKUM.....	133
5.2	PROSES IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS....	135

5.2.1	ANALISIS DATA	136
5.3	ANALISIS GAP DAN/ATAU KESENJANGAN DARI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA PERUBAHAN RPJMD TERHADAP PENCAPAIAN TPB	148
BAB VI_ SKENARIO DAN REKOMENDASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN		
6.1	SKENARIO PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	155
6.1.1	SKENARIO PENCAPAIAN TARGET TANPA KEMISKINAN (TPB 1).....	155
6.1.2	SKENARIO PENCAPAIAN TARGET TANPA KELAPARAN (TPB 2).....	158
6.1.3	SKENARIO PENCAPAIAN TARGET KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (TPB 3)	160
6.1.4	SKENARIO PENCAPAIAN TARGET KUALITAS PENDIDIKAN (TPB 4) ...	169
6.1.5	SKENARIO PENCAPAIAN TARGET AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (TPB 6)	172
6.1.6	SKENARIO PENCAPAIAN TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI (TPB 8)	175
6.1.7	SKENARIO PENCAPAIAN TARGET BERKURANGNYA KESENJANGAN (TPB 10)	179
6.1.8	SKENARIO PENCAPAIAN TARGET KOTA DAN PERMUKIMAN (TPB 11)	182
6.2	REKOMENDASI PENCAPAIAN TARGET SESUAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	184
6.3	INTEGRASI KLHS DALAM PERUBAHAN RPJMD.....	211
BAB VII_KESIMPULAN		
7.1	HASIL ANALISIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG KABUPATEN BARITO TIMUR.....	235
7.1.1	DAYA DUKUNG PANGAN	235
7.1.2	DAYA DUKUNG AIR.....	235
7.2	HASIL ANALISIS CAPAIAN KABUPATEN BARITO TIMUR TERHADAP INDIKATOR TPB	235
7.3	HASIL ANALISIS CAPAIAN OPD KABUPATEN BARITO TIMUR TERHADAP INDIKATOR TPB.....	237
7.3.1	CAPAIAN INDIKATOR TPB ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PILAR SOSIAL	237
7.3.2	CAPAIAN INDIKATOR TPB ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PILAR LINGKUNGAN	239
7.3.3	CAPAIAN INDIKATOR TPB ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PILAR EKONOMI	240
7.3.4	CAPAIAN INDIKATOR TPB ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PILAR HUKUM	242
7.4	REKOMENDASI BAGI KABUPATEN BARITO TIMUR	243
DAFTAR PUSTAKA		245

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Mekanisme Penyusunan KLHS RPJMD	6
Gambar 2. 1	Tata cara penyusunan KLHS berdasarkan Permendagri 7/2018/15	
Gambar 2. 2	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	16
Gambar 2. 3	Korelasi 6 Muatan KLHS dengan TPB	21
Gambar 2. 4	Tahapan Pencapaian TPB	22
Gambar 3. 1	Peta Administrasi Kabupaten Barito Timur.....	25
Gambar 3. 2	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019	26
Gambar 3. 3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019	29
Gambar 3. 4	Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Barito Timur.....	30
Gambar 3. 5	Peta Kemiringan Wilayah Kabupaten Barito Timur	31
Gambar 3. 6	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Barito Timur	34
Gambar 3. 7	Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Timur.....	35
Gambar 3. 8	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Barito Timur.....	36
Gambar 3. 9	Peta Kebutuhan Energi Pangan Kabupaten Barito Timur	39
Gambar 3. 10	Peta Daya Dukung Energi Pangan Kabupaten Barito Timur	40
Gambar 3. 11	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Barito Timur	42
Gambar 3. 12	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Barito Timur	47
Gambar 3. 13	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Barito Timur.....	48
Gambar 3. 14	Peta Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air dan Banjir Kabupaten Barito Timur	50
Gambar 3. 15	Peta Jasa Ekosistem Pengendalian Bencana Kabupaten Barito Timur.....	51
Gambar 3. 16	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Barito Timur .	54
Gambar 3. 17	Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kabupaten Barito Timur.....	56
Gambar 3. 18	Peta Sebaran Sistem Lahan Di Kabupaten Barito Timur	65
Gambar 3. 19	Peta Sebaran Jenis Tanah Di Kabupaten Barito Timur	68
Gambar 3. 20	Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Sawah Di Kabupaten Barito Timur	75
Gambar 3. 21	Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Ladang Di Kabupaten Barito Timur	75
Gambar 3. 22	Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung Di Kabupaten Barito Timur.....	80

Gambar 3. 23 Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Sawit Di Kabupaten Barito Timur.....	85
Gambar 3. 24 Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kopi Di Kabupaten Barito Timur	86
Gambar 3. 25 Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Karet Di Kabupaten Barito Timur.....	87
Gambar 3. 26 Peta Kesesuaian Lahan Peternakan (Sapi) Di Kabupaten Barito Timur.....	92
Gambar 3. 27 Peta Kesesuaian Lahan Perikanan (Kolam Air Tawar) Di Kabupaten Barito Timur.....	96
Gambar 4. 1 Ketercapaian Indikator Kabupaten Barito Timur terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	123
Gambar 4. 2 Capaian TPB Setiap Tujuan Kabupaten Barito Timur	125
Gambar 4. 3 Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai (SS)....	126
Gambar 4. 4 Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB).....	127
Gambar 4. 5 Capaian TPB Kategori Tidak Ada Data (NA).....	128
Gambar 5. 1 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Sosial.....	130
Gambar 5. 2 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Lingkungan.....	132
Gambar 5. 3 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Ekonomi	133
Gambar 5. 4 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Hukum	134
Gambar 5. 5 Kerangka Analisis dan Pemingkatan Isu TPB.....	135
Gambar 6.1 Proyeksi Skenario BAU Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Timur	155
Gambar 6.2 Skenario BAU Angka Partisipasi SMP/MTS di Kabupaten Barito Timur	156
Gambar 6.3 Proyeksi Persentase Peserta SJSN.....	157
Gambar 6.4 Proyeksi Persentase PPH	159
Gambar 6. 5 Proyeksi Angka Kematian Balita (AKBa).....	161
Gambar 6. 6 Proyeksi Prevalensi HIV	162
Gambar 6. 7 Proyeksi Kejadian Malaria per 1000 Orang	162
Gambar 6. 8 Proyeksi Persentase Merokok Umur < 18 Tahun	163
Gambar 6. 9 Proyeksi Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	164
Gambar 6. 10 Proyeksi Prevalensi Obesitas pada Umur > 18 Tahun.....	164
Gambar 6. 11 Proyeksi Prevalensi CPR pada Pasangan Usia Subur.....	165
Gambar 6. 12 Proyeksi Jumlah Penduduk yang Dicapai Asuransi Kesehatan per 1000 Penduduk	166
Gambar 6. 13 Proyeksi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	166
Gambar 6.14 Skenario APK SD/MI/ sederajat	170
Gambar 6.15 Skenario APK tingkat SMP/MTs/ sederajat.....	171
Gambar 6.16 Skenario APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	171
Gambar 6.17 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih (Sumber: Hasil Analisis, 2021)	173

Gambar 6.18 Proyeksi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi (Sumber: Hasil Analisis, 2021).....	174
Gambar 6.19 Proyeksi Jumlah Wisatawan Mancanegara Kabupaten Barito Timur (Sumber: Hasil Analisis, 2021)	176
Gambar 6.20 Proyeksi Tingkat Setengah Pengangguran Kabupaten Barito Timur (Sumber: Hasil Analisis, 2021)	177
Gambar 6. 21 Proyeksi Jumlah Daerah Tertinggal yang Terentaskan.	180
Gambar 6. 22 Proyeksi Jumlah Desa Tertinggal	180
Gambar 6. 23 Proyeksi Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal.	181
Gambar 6.24 Proyeksi Persentase Penanganan Sampah	182
Gambar 6.25 Proyeksi Persentase Rumah Layak Huni.....	183
Gambar 7. 1 Ketercapaian indikator Kabupaten Barito Timur terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	236
Gambar 7. 3 Capaian TPB setiap tujuan Kabupaten Barito Timur	237
Gambar 7. 4 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Sosial.....	239
Gambar 7. 5 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Lingkungan.....	240
Gambar 7. 6 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Ekonomi	242
Gambar 7. 7 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Hukum	243

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur Menurut Kecamatan Tahun 2019.....	24
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019	27
Tabel 3. 3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020	28
Tabel 3. 4 Statistik Klimatologi Kabupaten Barito Timur Tahun 2017.....	32
Tabel 3. 5 Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017.....	34
Tabel 3. 6 Daya Dukung Pangan di Kabupaten Barito Timur	38
Tabel 3. 7 Daya Dukung Air di Kabupaten Barito Timur.....	41
Tabel 3. 8 Klasifikasi Jasa Lingkungan.....	43
Tabel 3. 9 Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan	46
Tabel 3. 10 Jasa Ekosistem Penyedia Air (Dalam luas, ha)	48
Tabel 3. 11 Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air dan Banjir (Dalam luas, km ²).....	49
Tabel 3. 12 Jasa Ekosistem Pengendalian Bencana (Dalam luas, km ²).....	51
Tabel 3. 13 Total Simpanan Karbon Per ha (dalam ton).....	53
Tabel 3. 14 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur	54
Tabel 3. 15 Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversity berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur	55
Tabel 3. 16 Kondisi Sistem Lahan Di Kabupaten Barito Timur	64
Tabel 3. 17 Kondisi Jenis Tanah Di Kabupaten Barito Timur	66
Tabel 3. 18 Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Sawah dan Jenis Usaha Perbaikannya.....	73
Tabel 3. 19 Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Palawija (jagung) dan Jenis Usaha Perbaikannya.....	78
Tabel 3. 20 Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Perkebunan (sawit, kopi, dan karet) dan Jenis Usaha Perbaikannya.....	83
Tabel 3. 21 Kelas Kesesuaian Lahan Peternakan (sapi) dan Jenis Usaha Perbaikannya.....	89
Tabel 3. 22 Kelas Kesesuaian Lahan Perikanan (kolam air tawar) dan Jenis Usaha Perbaikannya.....	94
Tabel 3. 23 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017.....	97
Tabel 3. 24 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Timur 2013-2017	98
Tabel 3. 25 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Tahun 2013-2017.....	100
Tabel 3. 26 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013-2017	101

Tabel 4. 1 Ketercapaian Indikator Kabupaten Barito Timur terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	122
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Analisis Ketercapaian Indikator TPB	123
Tabel 5. 1 Capaian Indikator TPB Pilar Sosial Setiap OPD.....	129
Tabel 5. 2 Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan Setiap OPD	131
Tabel 5. 3 Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi Setiap OPD.....	132
Tabel 5. 4 Capaian Indikator TPB Pilar Hukum Setiap OPD	133
Tabel 5. 5 Analisis gap capaian TPB di Kabupaten Barito Timur	136
Tabel 5. 6 Analisis crosscutting TPB dengan isu kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Barito Timur.....	138
Tabel 5. 7 Analisis crosscutting TPB dengan isu strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2023.....	143
Tabel 5. 8 Peringkat isu TPB di Kabupaten Barito Timur	145
Tabel 5. 9 Analisis gap kebijakan dan strategi pada Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur terhadap TPB Prioritas	148
Tabel 6.1 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1 Tanpa Kemiskinan	157
Tabel 6. 2 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 2 Tanpa Kelaparan	160
Tabel 6. 3 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 4 tentang Kualitas Pendidikan	167
Tabel 6.4 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 4 tentang Kualitas Pendidikan	172
Tabel 6.5 Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 6 Tentang Air bersih dan Sanitasi Layak	174
Tabel 6.6 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 6 tentang air bersih dan sanitasi layak.....	177
Tabel 6. 7 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan	181
Tabel 6.8 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 11 Kota dan Permukiman	184
Tabel 6.9 Rekomendasi Pencapaian Target sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	185
Tabel 6. 10 Integrasi KLHS dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2021-2023	212
Tabel 7. 1 Capaian Indikator TPB Pilar Sosial Setiap OPD 237	
Tabel 7. 3 Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan Setiap OPD	239
Tabel 7. 4 Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi Setiap OPD.....	240
Tabel 7. 5 Capaian Indikator TPB Pilar Hukum Setiap OPD	242

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh, dan selaras dengan visi dan misi suatu daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Penyusunan RPJMD memerlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ialah salah satu instrument yang mampu memberikan rekomendasi dengan focus utama yaitu mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur mengidentifikasi permasalahan strategis di Kabupaten Barito Timur, yang mana makna strategis mengandung arti sangat penting dan sangat berpengaruh. KLHS mengevaluasi kondisi dan rencana daerah Kabupaten Barito Timur yang sangat penting dan berpengaruh, karena komponen yang sangat penting dan berpengaruh tersebut jika dibiarkan akan berdampak pada pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pendekatan strategis yang digunakan terhadap RPJMD Kabupaten Barito Timur, digunakan untuk memperkirakan Kabupaten Barito Timur di masa depan, merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan pemerintah dan masyarakat sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya, mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Timur yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah. Di tingkat kabupaten sendiri, RPJMD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan pembangunan daerah. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.

Berdasarkan UU 32/2009 tentang PPLH Pasal 15 dan PP 46/2016 tentang KLHS Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Barito Timur wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur. Pembuatan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur menggunakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai dasar analisis dan tolok ukur tercapainya agenda pembangunan di daerah. Hal ini merupakan langkah strategis, sebagai bukti bahwa daerah berkomitmen melaksanakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur merupakan hasil kerja sama seluruh anggota Kelompok Kerja (Pokja) KLHS dan juga seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam proses FGD dan uji publik. Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan keinginan masyarakat Indonesia untuk menjalankan transformasi peradaban masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil, damai, sejahtera dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan KLHS adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa
15. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaraan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2021-2023 adalah (a) melaksanakan amanat peraturan dan perundangan, (b) memastikan terlaksananya internalisasi/integrasi hasil rekomendasi KLHS berupa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kontekstual ke dalam RPJMD Kabupaten Barito Timur.

Tujuan Penyelenggaraan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur adalah:

- a. Melakukan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai melalui identifikasi, pengumpulan, dan analisis data yang mencakup:
 - 1) Kondisi umum daerah

- 2) Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan
- b. Melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam perubahan RPJMD 2021-2023 Kabupaten Barito Timur.
 - c. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2021-2023;
 - d. Sebagai arahan dalam penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2021-2023

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian adalah apa yang dijelaskan dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 dan Permendagri 7 Tahun 2018. Ruang lingkup kegiatan pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Barito Timur ini meliputi:

1. Tahap Persiapan Penyusun KLHS RPJMD

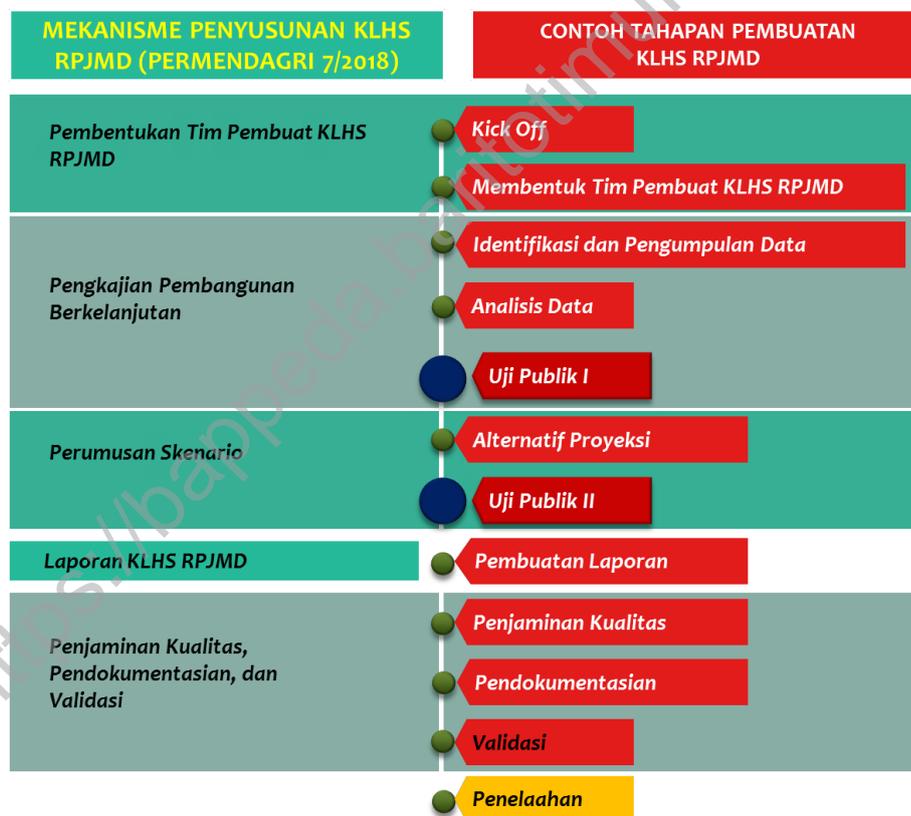
Tahap Persiapan dalam Penyusun KLHS RPJMD yaitu meliputi:

- Pengumpulan dan penelaahan dokumen;
- Pengumpulan dan penelaahan data instansional di lingkungan SKPD Kabupaten Barito Timur, untuk menggali informasi yang berkaitan dengan capaian indikator Tujuan
- Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan indikator-indikator TPB/SDGs.
- Mengidentifikasi masalah lingkungan hidup dan potensi berkelanjutan untuk mempertajam fokus dan pelaksanaan KLHS;

2. Tahap pembuatan KLHS RPJMD

Sesuai Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dalam pasal 3 menyatakan bahwa Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme:

- 1) Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD
- 2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan
- 3) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan
- 4) Penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi



Gambar 1. 1 Mekanisme Penyusunan KLHS RPJMD

1.5 Ringkasan Perubahan KLHS Perubahan terhadap KLHS RPJMD

Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah ditetapkan sebagai bencana Nasional nonalam. Penyebaran COVID-19 yang melanda dunia telah berdampak negatif pada kesehatan, aspek sosial dan ekonomi dan telah merambat ke berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan keadaan Indonesia akibat pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Timur. Dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah dan seluruh pemerintah daerah telah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selain adanya pandemi COVID-19, terdapat beberapa kebijakan nasional telah terbit setelah penetapan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023. Kebijakan tersebut mempengaruhi kebijakan pembangunan yang diatur dalam RPJMD, dan bersifat wajib untuk diterapkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur perlu melakukan penyesuaian RPJMD untuk menerapkan atau melaksanakan amanat dari kebijakan nasional.

Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan KLHS dalam perumusan RPJMD perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.

Berikut merupakan ringkasan perubahan dan/atau pemutakhiran (*updating*) yang dilakukan pada penyusunan Dokumen KLHS Perubahan RPJMD terhadap Dokumen KLHS RPJMD sebelumnya. Perubahan dan/atau pemutakhiran mencakup beberapa hal, yaitu perubahan/pemutakhiran data dalam muatan wajib KLHS, capaian TPB, isu prioritas, skenario pencapaian TPB prioritas,

rekomendasi, dan struktur Dokumen KLHS. Ringkasan perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Ringkasan perubahan KLHS Perubahan RPJMD terhadap KLHS RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

No	KLHS RPJMD Tahun 2018-2023	KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
A	Muatan kondisi lingkungan hidup	
1	Analisis daya dukung dan daya tampung tidak dijelaskan secara detail	Daya dukung dan daya tampung yang dilakukan analisis adalah daya dukung pangan dan daya dukung air
2	Analisis jasa ekosistem sudah dijelaskan secara detail meliputi analisis jasa ekosistem penyedia pangan, jasa ekosistem penyedia air bersih, jasa ekosistem penyedia serat, jasa ekosistem penyedia energi, jasa ekosistem penyedia sumber daya genetik, jasa ekosistem pengaturan iklim, jasa ekosistem pengaturan tata aliran dan banjir, jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam, jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam, jasa ekosistem pengaturan pemurnian air, jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah, jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara, jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara, jasa ekosistem pengaturan penyerbukan alami, jasa ekosistem pengendalian hama dan penyakit, jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup, jasa ekosistem budaya rekreasi dan ecotourism, jasa ekosistem budaya estetika, jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, jasa ekosistem pendukung siklus hara, jasa ekosistem pendukung produksi primer, dan jasa ekosistem pendukung biodiversitas	Jasa ekosistem sudah dijelaskan secara detail yaitu jasa ekosistem penyedia pangan, jasa ekosistem penyedia air bersih, jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir, jasa ekosistem pengendalian bencana, jasa ekosistem pengatur iklim, dan jasa ekosistem pendukung biodiversity
B	Capaian TPB	

No	KLHS RPJMD Tahun 2018-2023	KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
1	Kategori kondisi pencapaian TPB: - Sudah mencapai target - Belum mencapai target - Tidak ada data	Kategori kondisi capaian indikator TPB: - Sudah dilaksanakan dan mencapai target (SS) - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) - Tidak ada data (NA)
2	Tidak dijelaskan baseline data yang digunakan	Baseline data yang digunakan adalah tahun 2020 dan terdapat beberapa data pada tahun 2017-2019
3	Terdapat 220 indikator TPB	Terdapat 220 indikator TPB dengan jumlah capaian: - Sudah dilaksanakan dan mencapai target (SS) 49 indikator atau 22,27% - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) 39 indikator atau 17,73% - Tidak memiliki data (NA) 132 indikator atau 60%
4		Terdapat capaian indikator TPB per pilar dan per organisasi perangkat daerah
C	Isu Prioritas dan Skenario Pencapaian	
1	Isu dikeluarkan dari semua indikator TPB dan belum dijelaskan isu strategis yang akan ditangani. Semua indikator TPB yang sudah mencapai target, belum mencapai target, dan tidak ada data memiliki isu	Isu prioritas ditentukan berdasarkan gap capaian indikator TPB, uji silang TPB dengan isu lingkungan hidup, uji silang TPB dengan isu dari rencana pembangunan serta masukan pada saat konsultasi publik. Isu TPB prioritas adalah sebagai berikut: 1. TPB 1: Tanpa Kemiskinan 2. TPB 2: Tanpa Kelaparan 3. TPB 3: Kehidupan sehat dan sejahtera 4. TPB 4: Pendidikan berkualitas 5. TPB 6: Air bersih dan sanitasi layak 6. TPB 8: Pertumbuhan ekonomi 7. TPB 10: Mengurangi ketimpangan 8. TPB 11: Kota dan Permukiman
2	Alternatif skenario dan rekomendasi diberikan untuk semua indikator TPB bukan untuk indikator TPB prioritas. Skenario tidak disertai dengan proyeksi pencapaian indikator TPB.	Skenario diberikan sesuai dengan isu prioritas yaitu skenario dengan upaya tambahan dan skenario tanpa upaya tambahan (BAU). Skenario diproyeksikan hingga tahun rencana dan tahun akhir TPB yaitu tahun 2030.
D	Arahan Kebijakan dan Arahan Program	

No	KLHS RPJMD Tahun 2018-2023	KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
1	Tidak terdapat arahan kebijakan dan arahan program	Arahan kebijakan dan arahan program berdasarkan TPB prioritas. Arahan program dan kegiatan sudah mengikuti Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
E	Struktur Dokumen	
1	BAB I PENDAHULUAN - Latar Belakang - Dasar Hukum - Maksud dan tujuan - Ruang Lingkup - Sistematikan Penulisan	BAB I PENDAHULUAN - Latar Belakang - Dasar Hukum - Maksud dan Tujuan - Ruang Lingkup - Sistematikan Penulisan
	BAB II DASAR TEORI - Paradigma Pembangunan Berkelanjutan - Nilai Penting KLHS RPJMD - Pendekatan KLHS RPJMD - Konsep RPJMD Berkelanjutan - Mekanisme Penyelenggaraan KLHS RPJMD	Bab II DASAR TEORI - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLJS)
	BAB III KAJIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN - Gambaran Umum Daerah - Aspek Kesejahteraan Masyarakat - Aspek Pelayanan Umum - Aspek Daya Saing Daerah - Daya dukung dan daya tampung - Sumber Daya Alam - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - Analisis Kontribusi Para Pihak - Kajian Muatan Lingkungan Hidup	BAB II GAMBARAN UMUM - Kondisi geografis, fisik, dan lingkungan - Kondisi baseline lingkungan hidup - Land sistem dan kesesuaian lahan Bartim - Kondisi aspek daya saing daerah
	BAB IV ALTERNATIF SKENARIO	BAB IV ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN - Kondisi Umum Capaian Target TPB - Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target (SS) - Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) - Indikator TPB yang belum ada data (NA)

No	KLHS RPJMD Tahun 2018-2023	KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
	BAB V REKOMENDASI	BAB V ANALISIS CAPAIAN TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH - Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) - Proses indentifikasi dan perumusan isu prioritas - Analsis Gap dan/atau kesenjangan dari kebijakan dan strategi pada perubahan RPJMD terhadap pencapaian TPB
	BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	BAB VI SKENARIO DAN REKOMENDASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN - Skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan - Rekomendasi pencapaian target sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan - Integrasi KLHS dalam perubahan RPJMD
		BAB VII KESIMPULAN - Hasil analisis daya dukung dan daya tampung Kabupaten Barito Timur - Hasil analisis capaian Kabupaten Barito Timur terhadap indikator TPB - Hasil analisis capaian OPD kabupaten Barito Timur terhadap indikator TPB - Rekomendasi Kabupaten Barito Timur

Data capaian KLHS RPJMD sebelumnya digunakan untuk memproyeksikan skenario pencapaian target pada tahun rencana. Data capaian indikator pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada lampiran A pada laporan ini. Data capaian sudah menjelaskan mana saja indikator yang sudah tercapai, indikator yang belum tercapai, dan indikator yang belum memiliki data. Pada laporan ini juga sudah terdapat arahan kebijakan dan arahan program berdasarkan isu prioritas. Selain itu, hasil dari KLHS ini juga sudah diintegrasikan dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018-2023 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Latar belakang merupakan dasar untuk memberikan pemahaman mengenai gambaran maksud dan tujuan serta gambaran umum penulisan laporan KLHS-RPJMD.

Bab II Dasar Teori

Memuat pengertian-pengertian istilah yang digunakan dalam penyusunan KLHS RPJMD dan menjelaskan metode pendekatan dan asumsi – asumsi yang digunakan dalam analisis serta alur pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur.

Bab III Gambaran Umum

Memuat kondisi atau gambaran umum Kabupaten Barito Timur yang dilihat dari aspek Geografis dan Demografi, Kondisi *baseline* Lingkungan Hidup, aspek Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum, aspek Daya Saing Daerah, dan Kemampuan Keuangan Daerah dalam upaya mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Barito Timur dalam hal penegakan hukum dan sinergitas antar sektor dan wilayah.

Bab IV Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada bab ini dijelaskan mengenai penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di daerah yang dikategorikan dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional;
3. Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional;.
4. Indikator TPB yang tidak/belum ada data.

Bab V Analisis Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pada bab ini dijelaskan mengenai penilaian dan analisis capaian indikator TPB setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ketercapaiannya dalam penggunaan anggaran untuk program yang berkaitan dengan TPB yang menjadi tugas, pokok dan fungsi OPD. Dalam bab ini dijabarkan capaian indikator TPB yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD; analisis capaian indikator berdasarkan daya dukung dan daya tampung dan proporsi anggaran; serta keterlibatan pihak lain dalam mendukung OPD menyelenggarakan program dan kegiatan untuk mencapai target dalam TPB.

Bab VI Alternatif Skenario dan Rekomendasi

Pada bab ini dijelaskan mengenai alternatif skenario dan rekomendasi daerah dengan upaya tambaha dan dan tanpa upaya tambahan dilihat dari daya dukung dan daya tampung serta ketercapaian terhadap TPB.

Bab VII Kesimpulan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari laporan KLHS-RPJMD dengan mengidentifikasi pada hasil analisis daya dukung dan daya tampung daerah, analisis capaian daerah terhadap indikator TPB, analisis capaian OPD terhadap indikator TPB serta simpulan rekomendasi bagi daerah.

BAB II

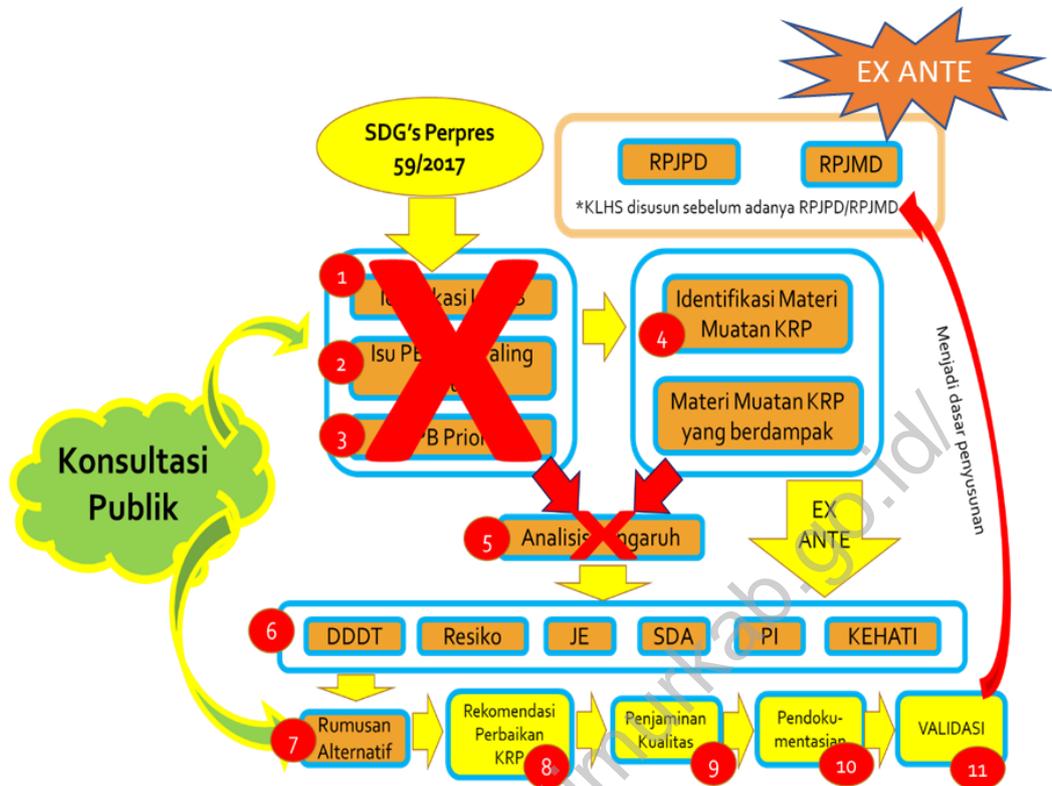
DASAR TEORI

2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Permendagri No. 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program. Penyelenggaraan KLHS khususnya untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/ atau program pada tingkat nasional, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/ Kota. Penyelenggaraan KLHS merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan tata cara penyelenggaraannya diatur di dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2017 tersebut selanjutnya diatur di dalam PerMenLHK Nomor P.69/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penyelenggaraan KLHS untuk RPJMD baik untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota secara khusus telah diatur dalam Permendagri No. 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyelenggaraan KLHS yang sesuai dengan Permendagri No. 7 Tahun 2018 merujuk pada Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) bersifat Ex-Ante, artinya penyusunan KLHS dilakukan sebelum dokumen RPJMD disusun. Tahapan penyusunan KLHS tersebut diuraikan seperti pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2. 1 Tata cara penyusunan KLHS berdasarkan Permendagri 7/2018

KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Berdasarkan Pasal 3 Permendagri No. 7 Tahun 2018, pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme:

- a. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
- b. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
- c. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan
- d. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 di mana Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD guna mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun daftar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Agenda TPB/SDGs 2030

NO	TUJUAN	NO	TUJUAN
	Tanpa Kemiskinan		Berkurangnya Kesenjangan
	Tanpa Kelaparan		Kota & Permukiman yang Berkelanjutan
	Kehidupan Sehat dan Sejahtera		Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab
	Pendidikan Berkualitas		Penanganan Perubahan Iklim
	Kesetaraan Gender		Ekosistem Air
	Air Bersih dan Sanitasi Layak		Ekosistem Daratan
	Energi Bersih dan Terjangkau		Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
	Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi		Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur		

Gambar 2. 2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip TPB yang menjadi dasar dari RPJMD terdiri dari 17 tujuan dengan 169 indikator yang terukur. Prinsip ini dijadikan sebagai tuntunan kebijakan dan pendanaan bagi setiap daerah sampai tahun 2030. Pada dasarnya, 17 tujuan yang terdapat di dalam TPB merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi, sehingga dalam pengelolaan dan analisisnya, perlu diperhatikan keterkaitan untuk setiap tujuan/indikator.

2.2 Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

KLHS RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Barito Timur, akan memberikan pengaruh yang substansial. Pandangan ini menjadi landasan pemikiran bahwa aspek- aspek substansial wilayah menjadi bahan atau masukan dan sekaligus sebagai keluaran utama proses KLHS RPJMD. Sebagai masukan, aspek substansial wilayah terikat pada rasionalitas lokal, yaitu landasan rasional yang berpijak pada aspek substansial wilayah, seperti tipologi ekosistem wilayah, kearifan lokal, dan juga kekhususan sistem ekonomi regional.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan, yang berlandaskan pada pilar: a) ekonomi, b) sosial, dan c) lingkungan, maka dengan mempertimbangkan rasionalitas lokal sebagai masukan utama KLHS RPJMD. Konsep pembangunan berkelanjutan juga perlu ditransformasikan menjadi konsep pembangunan berkelanjutan daerah. Selanjutnya, dalam proses transformasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui proses kajian keberlanjutan terpadu, dikembangkan menjadi suatu kajian pembangunan berkelanjutan daerah yang mempertimbangkan rasionalitas lokal.

2.3 Nilai Penting KLHS RPJMD

Terdapat nilai penting yang harus direfleksikan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Barito Timur adalah keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Selanjutnya Kebijakan, rencana, dan program yang menjadi obyek KLHS adalah suatu sistem yang kompleks dan dinamis, karena berbasiskan pada konteks interaksi sistem alam dan sistem sosial. Tindakan manusia yang mempengaruhi ekosistem akan direspons oleh ekosistem itu sendiri. Sebaliknya, pengaruh ekosistem terhadap manusia akan direspons oleh sistem sosial, dalam berbagai bentuknya. *Systems Thinking* adalah paradigma yang tepat digunakan untuk memandang objek KLHS, sebagai suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Nilai penting dan tujuan KLHS RPJMD ini dikonstruksikan berdasarkan paradigma *Systems Thinking*.

2.3.1 Keterkaitan

Keterkaitan dijadikan nilai penting agar KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, dan globallokal. Paradigma *Systems Thinking* memandang bahwa seluruh komponen sistem dalam suatu sistem tertentu, misalnya sistem pembangunan berkelanjutan, memiliki keterkaitan antar komponennya. Gangguan terhadap keterkaitan antar komponen sistem tersebut akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi seluruh komponen dalam RPJMD, sebagai suatu sistem saling memiliki keterkaitan, dan setiap komponennya memiliki perannya masing-masing. Keterkaitan sangat tepat menjadi nilai penting KLHS.

2.3.2 Keseimbangan

Keseimbangan sebagai nilai penting KLHS, dimaksudkan agar KLHS dijiwai oleh keseimbangan antar berbagai kepentingan, yaitu sosial-ekonomi dan lingkungan hidup, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, serta keseimbangan pusat dan daerah. Paradigma Systems Thinking memahami keseimbangan sistem berbeda dengan pemahaman nilai keseimbangan dalam KLHS ini. Suatu sistem selain memiliki keterkaitan antar komponennya, juga memiliki interaksi diantaranya. Menggunakan paradigma Systems Thinking, keseimbangan yang dimaksud dalam nilai KLHS dapat dijelaskan sebagai keharmonisan interaksi antar komponen sistem.

2.3.3 Keadilan

Keadilan sebagai nilai penting, dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program yang tidak mengakibatkan marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber atau modal atau pengetahuan. Dalam pandangan paradigma Systems Thinking, keadilan dalam konteks KLHS dapat ditempatkan sebagai keluaran dari sistem yang menjadi objek KLHS. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 46 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, KLHS ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan nilai penting KLHS, prinsip tercapainya tujuan RPJMD dan tujuan KLHS, maka nilai penting KLHS RPJMD adalah sebagai berikut:

1) Keterkaitan

KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk menjaga keterkaitan pembangunan antar sektor, wilayah, lingkungan buatan dan lingkungan alam, serta komponen pembangunan berkelanjutan lainnya.

2) Keharmonisan

KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk menjaga interaksi yang harmonis dalam pembangunan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 - 2023 II-4 antar sektor, wilayah, lingkungan buatan dan lingkungan alam, serta komponen pembangunan berkelanjutan lainnya.

3) Keadilan

KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan, menjaga dan atau mencapai keadilan lingkungan, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi.

4) Keberlanjutan KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Berdasarkan tujuan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang berlandaskan dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.4 Pendekatan KLHS RPJMD

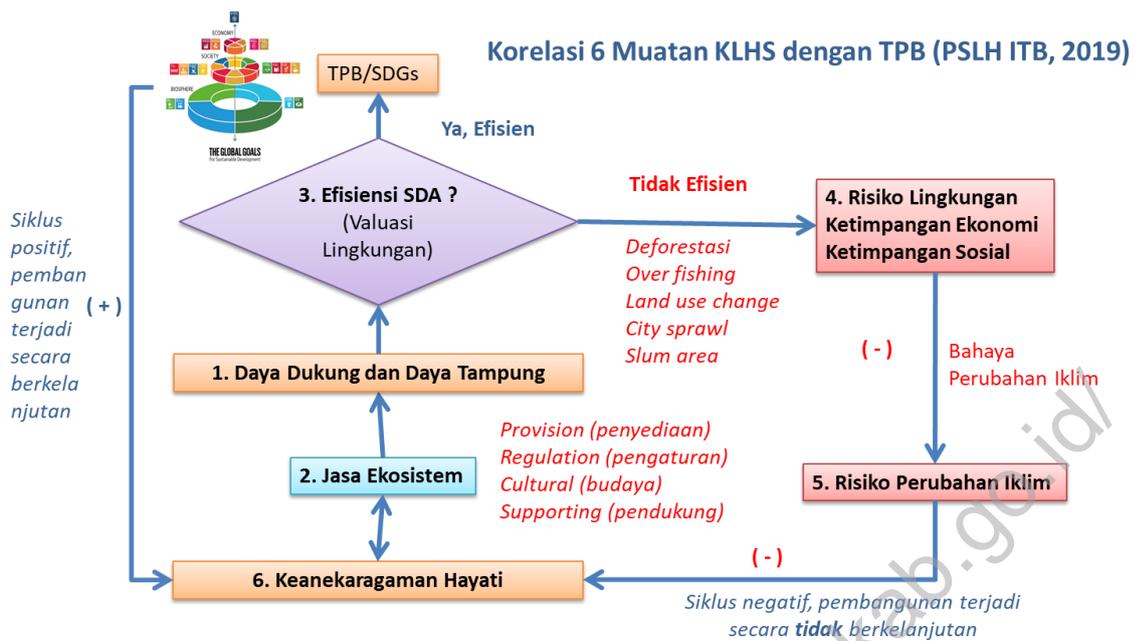
KLHS RPJMD menggunakan pendekatan kajian keberlanjutan secara terpadu yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan berlandaskan pada rasionalitas lokal, baik rasionalitas ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau didasarkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan daerah. Transformasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mempertimbangkan rasionalitas lokal.

Proses isu pembangunan berkelanjutan (PB) KLHS RPJMD mengacu pada pasal 9 sampai pasal 11 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD. Paradigma dan pendekatan baru yang digunakan pada KLHS ini, yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan daerah, dan pendekatan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mempertimbangkan rasionalitas lokal.

2.5 Proses Kajian

Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD diawali dengan mengidentifikasi isu dan masalah terkait dengan pembangunan berkelanjutan serta dampaknya terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Barito Timur. Identifikasi isu-isu dan masalah diperoleh dari FGD yang melibatkan berbagai pihak terkait (Forum Multi Pihak/Multistakeholder Forum) dan Kelompok Kerja (Pokja) menghasilkan daftar panjang isu (long list issues). Sedangkan sasaran strategis diperoleh dari isu-isu strategis dan permasalahannya serta penjabaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur. Sasaran strategis memuat ukuran pencapaian masing-masing tujuan yang telah ditetapkan, dan dirumuskan secara spesifik dan terukur dalam indikator-indikator. Formulasi sasaran strategis dihasilkan berdasarkan hasil FGD serta mengacu pada Perpres 59 tahun 2017.

Rumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan merupakan alternatif proyeksi kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diperoleh dari capaian indikator pembangunan sebelumnya dan arahan kajian perspektif untuk pembangunan berikutnya. Skenario PB terdiri atas 2 pendekatan, yaitu a) pembangunan tanpa upaya tambahan, dan b) pembangunan dengan upaya tambahan. Skenario pembangunan tanpa upayatanambahan dibangun secara similar dan linear dengan capaian indikator pada tahun sebelumnya. Sedangkan, skenario pembangunan dengan upaya tambahan dikembangkan dari capaian pembangunan sebelumnya secara gradual dan linear dengan target yang lebih tinggi dalam rangka mempercepat pencapaian TPB. Skenario pembangunan dengan upaya tambahan menjadi rekomendasi bagi rancangan awal RPJMD, dan juga arahan kebijakan, rencana dan/atau program pada RPJMD dan RAD TPB.

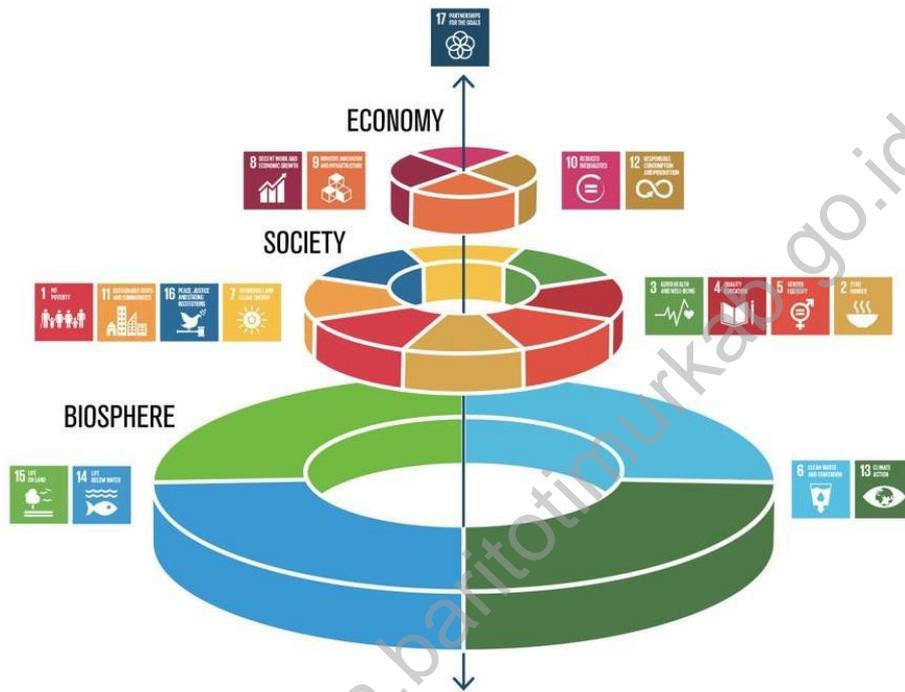


Gambar 2. 3 Korelasi 6 Muatan KLHS dengan TPB
(PSLH ITB, 2019)

Kajian 6 muatan KLHS merupakan amanat dari UU 32/2009 yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan KLHS. Setelah dilakukan kajian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Barito Timur, perlu dilakukan kajian 6 muatan di Kabupaten Barito Timur. Kajian 6 muatan diawali dengan kajian keanekaragaman hayati di Kabupaten Barito Timur, selanjutnya dilakukan kajian Jasa Ekosistem yang memperhatikan tingkat penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung. Selanjutnya dilakukan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung dan Kajian Efisiensi Sumber Daya Alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien akan meningkatkan pencapaian TPB yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati. Siklus ini disebut siklus positif, artinya siklus pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, jika pemanfaatan sumber daya alam tidak efisien maka akan mengurangi pencapaian TPB yang selanjutnya akan mengurangi kualitas keanekaragaman hayati. Siklus ini disebut siklus negatif, artinya siklus pembangunan terjadi secara tidak berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien akan mengakibatkan berbagai risiko lingkungan seperti bencana, ketimpangan sosial dan ekonomi. Perubahan iklim akan meningkatkan intensitas bencana, sehingga dengan adanya perubahan iklim akan meningkatkan risiko perubahan iklim.

Untuk mencapai TPB sebaiknya dilakukan secara bertahap, tahapan pencapaian TPB dapat dilakukan mengikuti Gambar 2.7 tentang Tahapan Pencapaian TPB. Pada Gambar 2.4 tentang korelasi antara kajian 6 muatan KLHS dengan pencapaian TPB diperoleh

gambaran bahwa pencapaian TPB harus didasari pada pencapaian kelestarian lingkungan, dalam artian pencapaian TPB tahap pertama adalah pelestarian ekosistem atau BIOSPHERE. Jika ekosistem lestari maka akan menghasilkan jasa ekosistem yang menunjang pencapaian SOCIETY atau kehidupan sosial. Kehidupan sosial yang baik akan mencapai peningkatan ekonomi atau pencapaian level ECONOMY. Selanjutnya akan tercapai kemitraan dengan wilayah atau negara lain.



Gambar 2. 4 Tahapan Pencapaian TPB

Gambar 2.4 menjelaskan tahapan pencapaian TPB yang terdiri dari 4 (empat) tingkat yaitu:

- biosfer (tingkat pertama) yang terdiri dari TPB 13 (Aksi Perubahan Iklim), 14 (Perairan), 6 (Sanitasi dan Air Bersih) dan 15 (Kehidupan darat);
- sosial (tingkat kedua) terdiri dari TPB 1 (Kemiskinan), 2 (Kelaparan), 3 (Kesehatan), 4 (Pendidikan), 5 (Kesetaraan Gender), 7 (Energi bersih), 11 (Kota dan masyarakat berkelanjutan), dan 16 (Perdamaian dan keadilan);
- ekonomi (tingkat ketiga) terdiri dari TPB 8 (Kerja layak dan pertumbuhan ekonomi), 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), 10 (Pengurangan kesenjangan) dan 12 (Konsumsi yang bertanggung jawab).
- Kemitraan (tingkat keempat) yaitu TPB 17 (Kemitraan demi mencapai tujuan)

BAB III

GAMBARAN UMUM

Secara formal, Kabupaten Barito Timur terbentuk bersama-sama dengan beberapa kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur.

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur ini dikeluarkan, wilayah Kabupaten Barito Timur pernah berkembang dari Kabupaten Barito Timur menjadi Wilayah Pembantu Bupati Barito Timur, sejak undang-undang tersebut berlaku, maka secara resmi wilayah Barito Timur memisahkan diri dari Kabupaten Barito Selatan dan menjadi daerah otonom sendiri dengan nama Kabupaten Barito Timur dengan ibu kota Tamiang Layang.

Gambaran umum kondisi Kabupaten Barito Timur terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut merupakan bentuk nyata dari kinerja pembangunan di Kabupaten Barito Timur oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. Berikut ini gambaran umum Kabupaten Barito Timur yang dilihat dari keempat aspek tersebut.

3.1 Kondisi Geografis, Fisik Dan Lingkungan

3.1.1 Wilayah Administratif

Kabupaten Barito Timur terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten di Tamiang Layang, secara geografis Kabupaten Barito Timur terletak di posisi geografis 1° 38' 38,1" Lintang Selatan - 2° 23' 34,2" Lintang Selatan dan 114° 56' 15" - 115° 26' 31,3" Bujur Timur. Kabupaten Barito Timur memiliki luas wilayah 3.834 km².

Kabupaten Barito Timur terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten di Tamiang Layang. Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Timur memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan orang dan barang, sehingga menjadi Kota Transit, baik dari arah Kota Banjarmasin maupun Kota Palangka Raya. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur berada di bagian paling timur yang berdekatan dengan Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak dan posisi demikian sehingga arah perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara administratif Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 kecamatan dan terbagi menjadi 3 tiga kelurahan, 101 desa termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Secara administratif berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah).
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan).
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah), Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Provinsi Kalimantan Selatan).
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah).

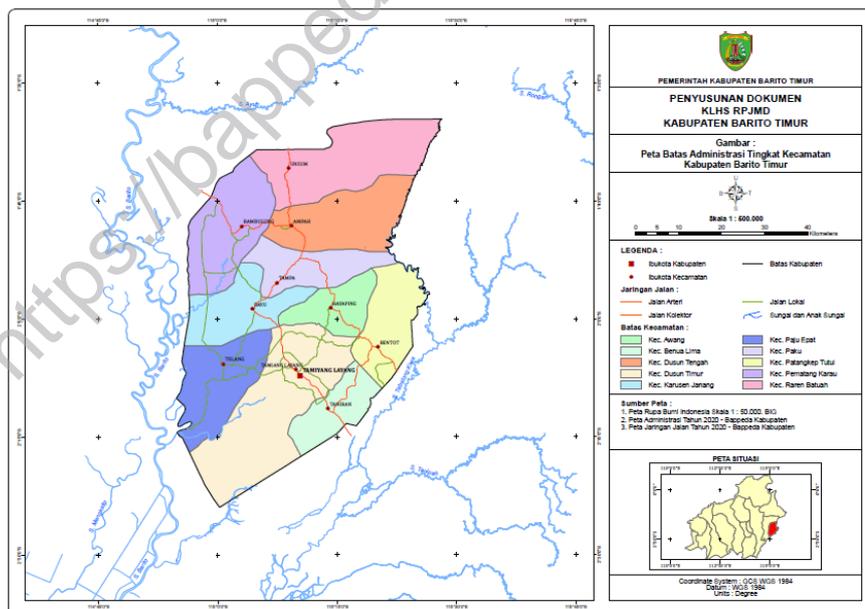
Kabupaten Barito Timur memiliki luas wilayah 3.834 km² (atau 2,50% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153.564 Km²), menduduki urutan ke-12 (dua belas) terluas dari 14 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan jarak sekitar 418 Km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya). Luas wilayah Kabupaten Barito Timur menurut kecamatan berdasarkan data tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur Menurut Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Benua Lima	Taniran	258	6,73
2.	Dusun Timur	Tamiang Layang	867,70	22,63
3.	Paju Epat	Telang	664,30	17,33
4.	Awang	Hayaping	203	5,29
5.	Patangkep Tutui	Bentot	255	6,65
6.	Dusun Tengah	Ampah Kota	371	9,68
7.	Raren Batuah	Unsum	186	4,85
8.	Paku	Tampa	272	7,09
9.	Karusen Janang	Dayu	178	4,64
10.	Pematang Karau	Bambulung	579	15,10
	Barito Timur	Tamiang Layang	3.834	100,00

Sumber: Peta Batas Administrasi Barito Timur, 2019

Wilayah administrasi Kabupaten Barito Timur secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



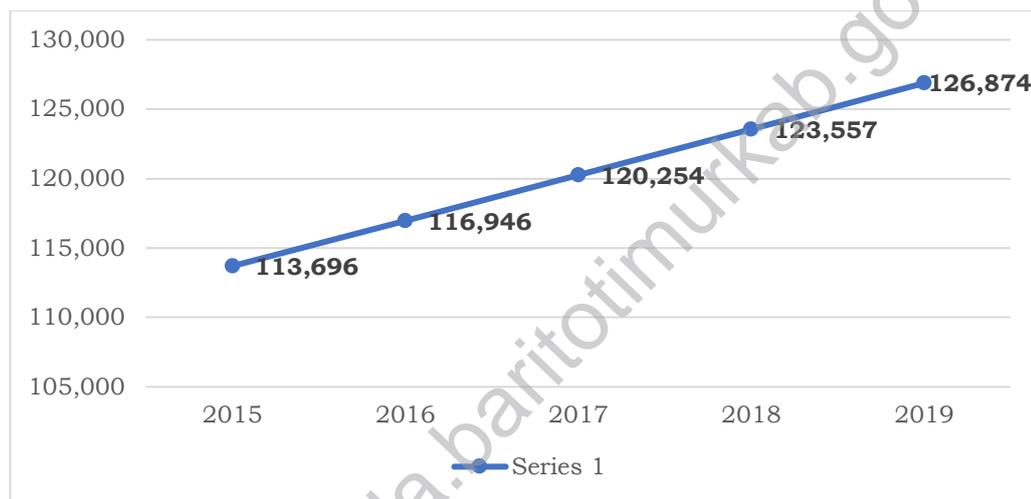
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Barito Timur

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3.1.2 Kondisi Demografis

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang merupakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek).

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Timur cenderung bertambah, pada tahun 2015 jumlah penduduk 113.696 jiwa dan pada tahun 2019 naik menjadi 126.874 jiwa. Ini menunjukkan terjadi pertambahan sebanyak 13.178 jiwa dalam empat tahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2019

Sumber: Barito Timur dalam Angka Tahun 2018 dan 2020 dan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021.

Selanjutnya, berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa jumlah penduduk yang terbanyak pada tahun 2019 ada di Kecamatan Dusun Timur yaitu 33.339 jiwa dan Dusun Tengah yaitu 27.426 jiwa, hal tersebut menggambarkan bahwa kedua Kecamatan dimaksud memiliki pusat kekuatan yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Kecamatan Dusun Tengah sangat strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan yang terletak di daerah segi tiga antara Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Barito Selatan. Sedangkan Kecamatan Dusun Timur merupakan pusat pendidikan dan pemerintahan dan mulai berkembang kearah kota perdagangan.

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019

No	Kecamatan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Benua Lima	3.770	3.367	7.136
2	Dusun Timur	16.931	16.408	33.339
3	Paju Epat	2.764	2.492	5.256
4	Awang	3.227	3.077	6.304
5	Patangkep Tutul	5.409	4.781	10.190
6	Dusun Tengah	13.949	13.477	27.426
7	Raren Batuah	5.067	4.544	9.611
8	Paku	4.637	4.314	8.951
9	Karusen Janang	3.085	2.887	5.972
10	Pematang Karau	6.580	6.110	12.690
	Barito Timur	65.419	61.455	126.874
	2018	63.689	59.868	123.557
	2017	61.962	58.292	120.254
	2016	60.246	56.700	116.946

Sumber: Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2020

Secara administratif, Kabupaten Barito Timur terdiri atas 100 (seratus) desa dan 3 (tiga) kelurahan yang tersebar dalam 10 (sepuluh) kecamatan. Kecamatan Dusun Timur merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yakni 867,70 km² atau 22,63 persen dari total luas wilayah Barito Timur. Sementara itu, Karusen Janang merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni 178,0 km² (4,64 persen).

Tabel 3. 3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

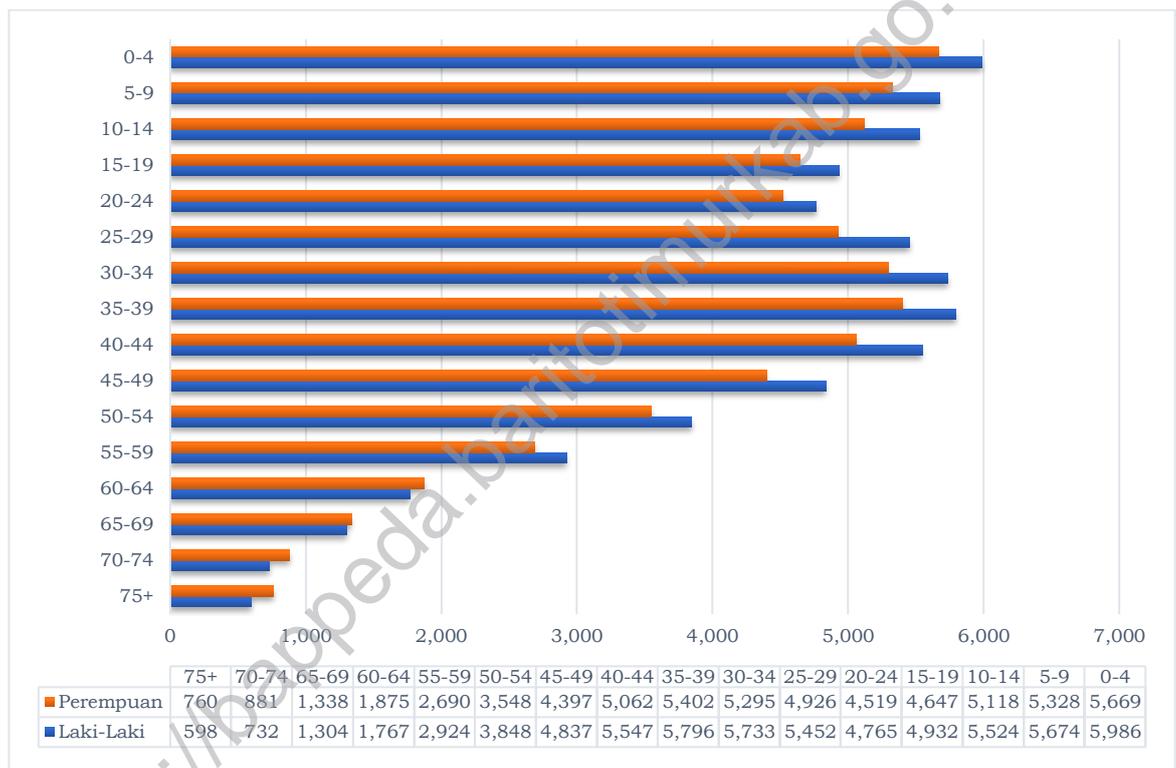
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
1	Benua Lima	258,0	6.686	26
2	Dusun Timur	867,7	28.493	33
3	Paju Epat	664,3	6.060	9
4	Awang	203,0	6.472	32
5	Patangkep Tutul	255,0	7.182	28
6	Dusun Tengah	371,0	26.020	70
7	Raren Batuah	186,0	8.811	47
8	Paku	272,0	9.371	34
9	Karusen Janang	178,0	5.261	30
10	Pematang Karau	579,0	13.365	23
	Barito Timur	3.834,0	117.721	31

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Timur 2020

Persebaran penduduk di Kabupaten Barito Timur masih belum merata. Hampir 50 persen penduduk terkonsentrasi di dua kecamatan yakni Dusun Timur dan Dusun Tengah, sedangkan sisanya tersebar di delapan kecamatan lain. Hal ini disebabkan oleh pusat pemerintahan yang berlokasi di Kecamatan Dusun Timur (Kelurahan Tamiang Layang), serta tersedianya berbagai sarana/fasilitas perekonomian di Kecamatan Dusun Tengah khususnya di Kelurahan Ampah Kota. Posisi geografis Kecamatan Dusun Tengah cukup strategis karena berada di jalur Palangka Raya-Banjarmasin-Muara Teweh. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Dusun Tengah menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni mencapai 70 jiwa/km² mengingat tingginya aktivitas ekonomi di kecamatan

tersebut. Sementara itu, Kecamatan Paju Epat yang memiliki luas wilayah terbesar ke-2 di Kabupaten Barito Timur memiliki jumlah penduduk terkecil sehingga kepadatan penduduk pun menempati posisi terendah, yakni hanya 9 jiwa/km².

Berdasarkan komposisinya, penduduk Barito Timur tahun 2019 didominasi oleh penduduk usia muda dan dewasa. Hal menarik yang dapat diamati pada gambar dibawah ini adalah terjadi pengerucutan pada kelompok penduduk usia 15–24 tahun. Hal ini disebabkan karena pada umumnya penduduk pada usia tersebut sedang mengenyam pendidikan atau mencari pekerjaan di luar Kabupaten Barito Timur.

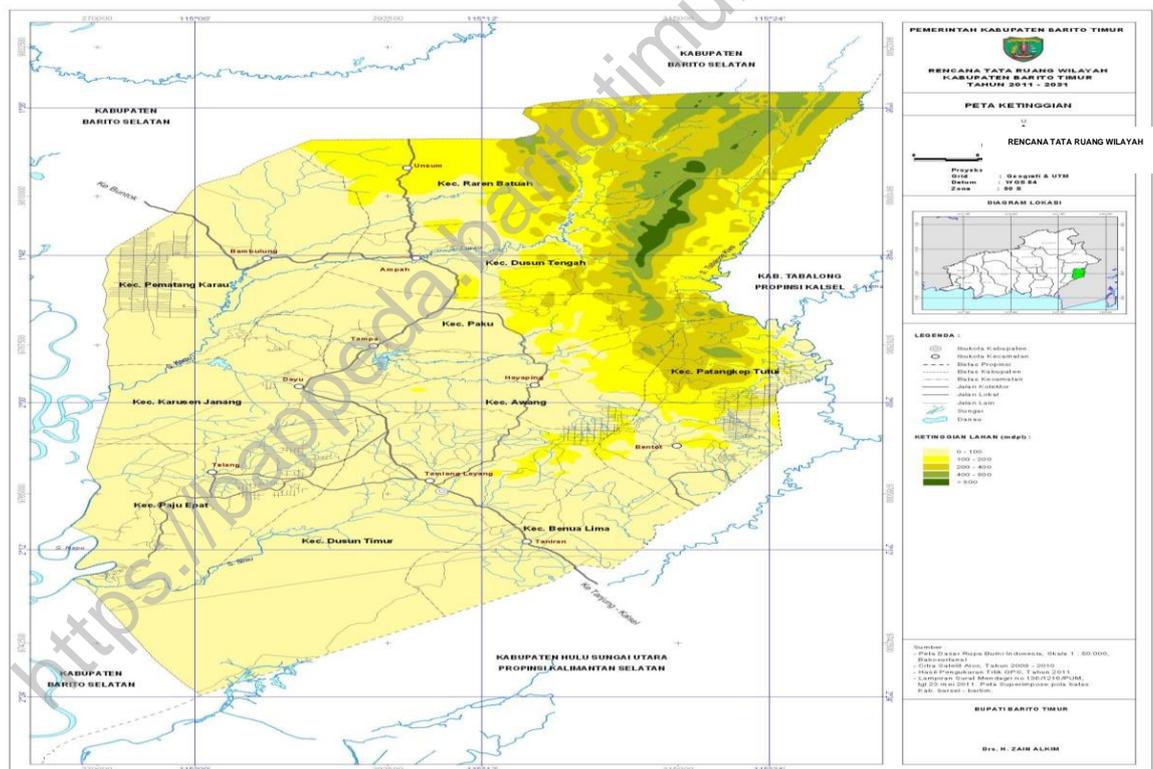


Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019

Sumber: Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2020

3.1.3 Kondisi Topografi

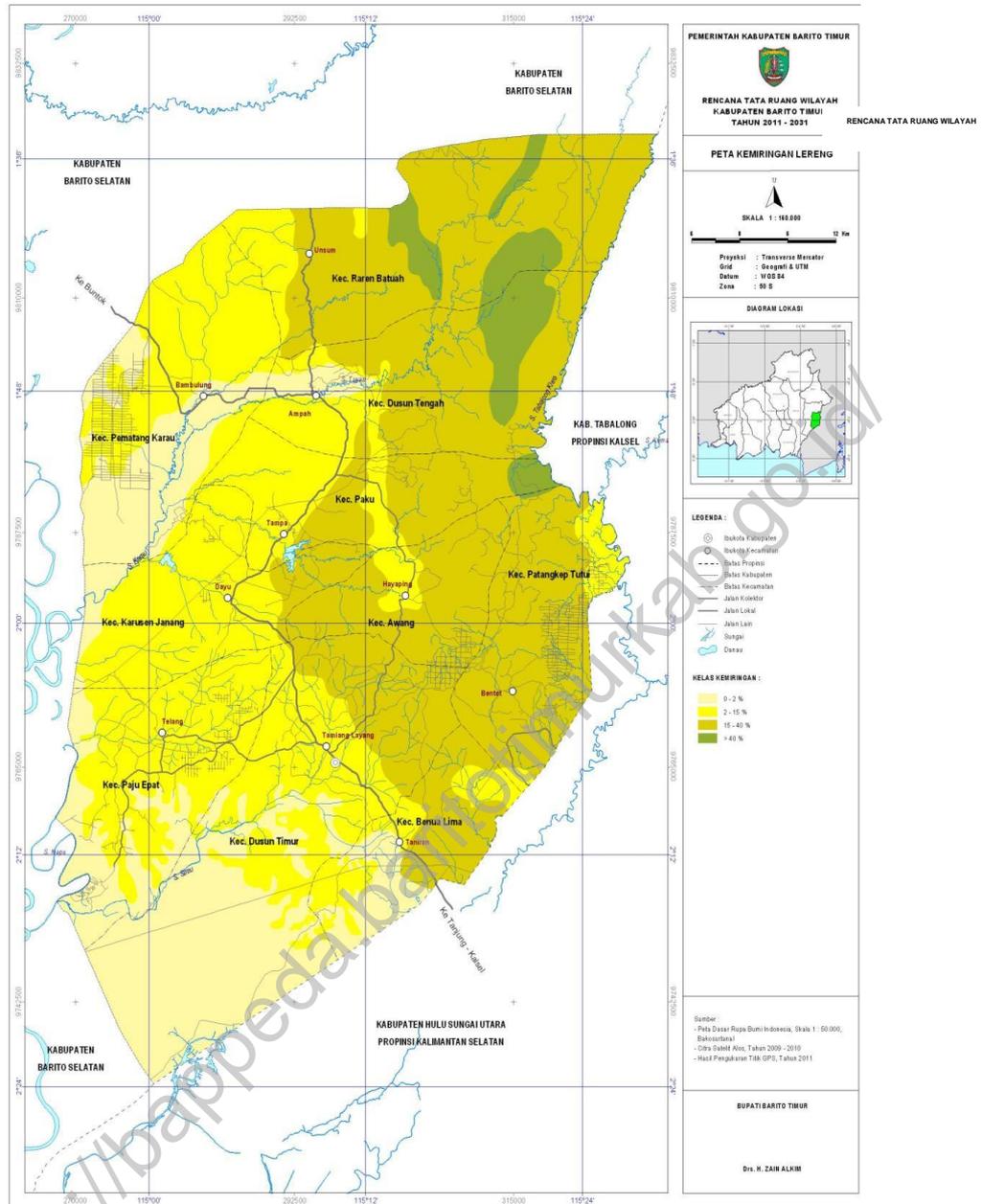
Wilayah Kabupaten Barito Timur berada pada ketinggian 50-100m diatas permukaan laut dengan kondisi bentang alam sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Awang dan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan. Pada umumnya merupakan dataran rendah dengan kemiringan berkisar antara 0 - 2%, 2 - 15% dan 15 - 40 %. Wilayah dengan kemiringan 0 - 2% lebih banyak dijumpai di sisi barat, sedangkan wilayah dengan kemiringan 2 - 15% dan 15 - 40% masing-masing dapat dijumpai di sisi tengah yang membentang dari utara hingga selatan. Sementara itu, untuk wilayah dengan kemiringan di atas 40% dapat dijumpai di bagian sisi utara sebelah timur. Untuk lebih jelasnya mengenai topografi di wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 4 Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Barito Timur

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

Sedangkan kemiringan lereng wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 5 Peta Kemiringan Wilayah Kabupaten Barito Timur

Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

3.1.4 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Barito Timur dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan Oktober arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan

Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Sebagai daerah yang beriklim tropis wilayah Kabupaten Barito Timur rata-rata mendapat penyinaran matahari sebesar 51,48 sepanjang tahun, rata-rata suhu udaranya sepanjang 2017 relative sejuk, yaitu 27,36⁰, sedangkan rata-rata curah hujannya relative tinggi yaitu mencapai 232,06 mm per bulan.

Tabel 3. 4 Statistik Klimatologi Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

Bulan	Rata-rata Suhu Udara	Rata-rata Kelembaban Udara	Tekanan Udara	Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari	Curah Hujan
Januari	26,64	87,59	1.010,8	17	48,79	311,40
Februari	27,03	85,48	1.006,7	7	43,70	221,70
Maret	26,44	86,98	1.011,3	12	43,15	410,70
April	26,98	86,61	1.011,7	12	53,33	224,70
Mei	27,55	86,80	1.011,1	12	56,90	240,90
Juni	27,17	86,80	1.011,9	10	56,77	187,30
Juli	26,84	86,16	1.012,1	10	50,77	133,10
Agustus	26,84	87,00	1.011,4	8	44,29	209,60
September	27,67	83,57	1.012,1	10	57,87	84,80
Oktober	27,45	84,32	1.010,4	15	61,90	128,30
November	27,17	86,03	1.009,1	14	49,20	294,40
Desember	27,00	85,58	1.010,1	25	51,10	337,80

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

3.1.5 Kondisi Geologi

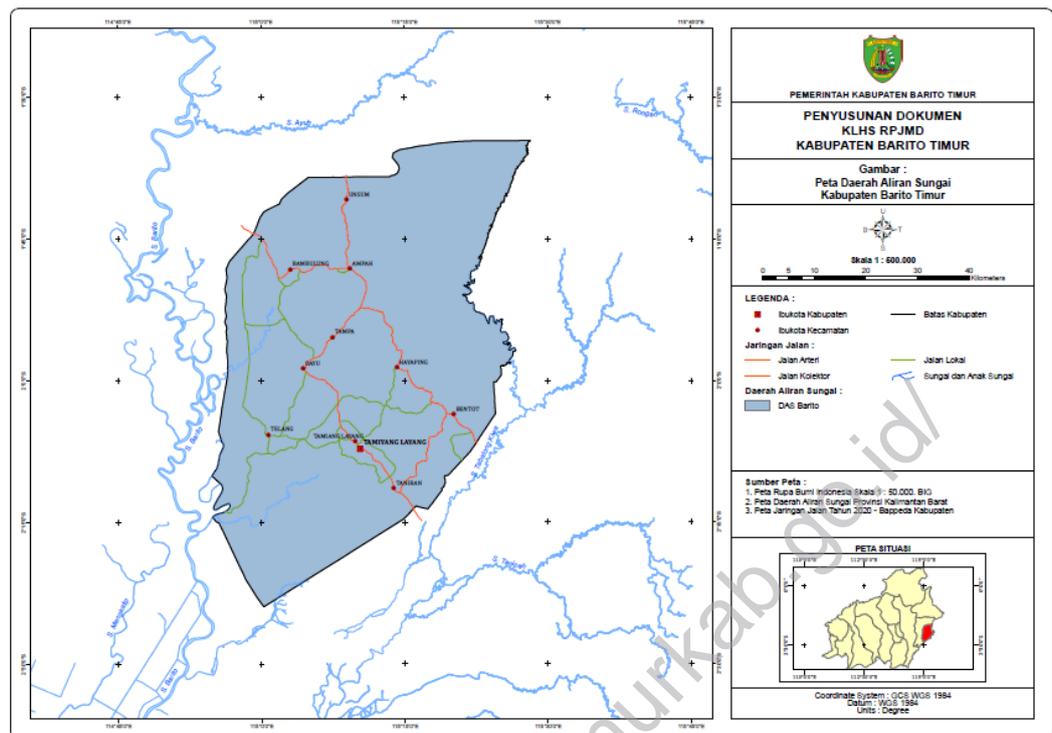
Secara geologis, susunan atau struktur bebatuan di Kabupaten Barito Timur dibentuk oleh formasi geologi sebagai berikut, *Qh/Qvt = Swam Deposit Land, Clay, Ralelygravel, Mut And Decayet Wagelation Brown*, yang terbentuk oleh batuan vulkanik tak terpisahkan, berupa aliran lahar, konglomerat dan endapan kalsium lainnya, bersusunan antara andesit sampai *basalt*.

Berdasarkan informasi geologi, formasi geologi yang terbentuk di wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) jenis formasi, yaitu; Batuan Vulkanik, Formasi Alluvium, Formasi Berai, Formasi Dahor, Formasi Mortalat, Formasi Tanjung, Formasi Warukin dan Granit Kapur.

3.1.6 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Barito Timur cukup banyak, antara lain: Sungai Karau, Sungai Tuyau, Sungai Sirau, dan Sungai Tabalong Kiwa, dan beberapa sungai kecil serta anak-anak sungai lainnya. Sungai-sungai tersebut mengalir dari utara ke selatan dengan pola aliran sungai adalah dendritik, yaitu pola aliran yang berkembang bebas dalam segala arah dan mempunyai banyak cabang. Saat ini sungai-sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sarana transportasi ke berbagai kawasan, sebagai sumber air bersih dan kebutuhan sehari-hari penduduk untuk mandi, cuci, untuk kegiatan pertanian maupun lainnya. Kabupaten Barito Timur memiliki 4 (empat) hulu sungai, yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu: (1) Hulu Sungai Karau terletak di Kecamatan Dusun Tengah di Desa Baruyan, Desa Unsum, Desa Lenggang dan Desa Batuah; (2) Hulu Sungai Paku terletak di Kecamatan Dusun Tengah Desa Kalamus dan Desa Tamiang; (3) Hulu Sungai Sirau terletak di Kecamatan Dusun Timur Desa Pulau Padang dan Desa Jaar dan (4) Hulu Sungai Dayu di Kecamatan Dusun Timur Desa Dayu.

Dari ke empat hulu sungai tersebut mengalir dari arah utara ke selatan yang melalui wilayah Kabupaten Barito Timur yang merupakan saluran utama dalam sistem drainase sebagai saluran pembuangan akhir, baik sisa pembuangan dari limpasan air hujan maupun buangan dari rumah tangga.



Gambar 3. 6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Barito Timur

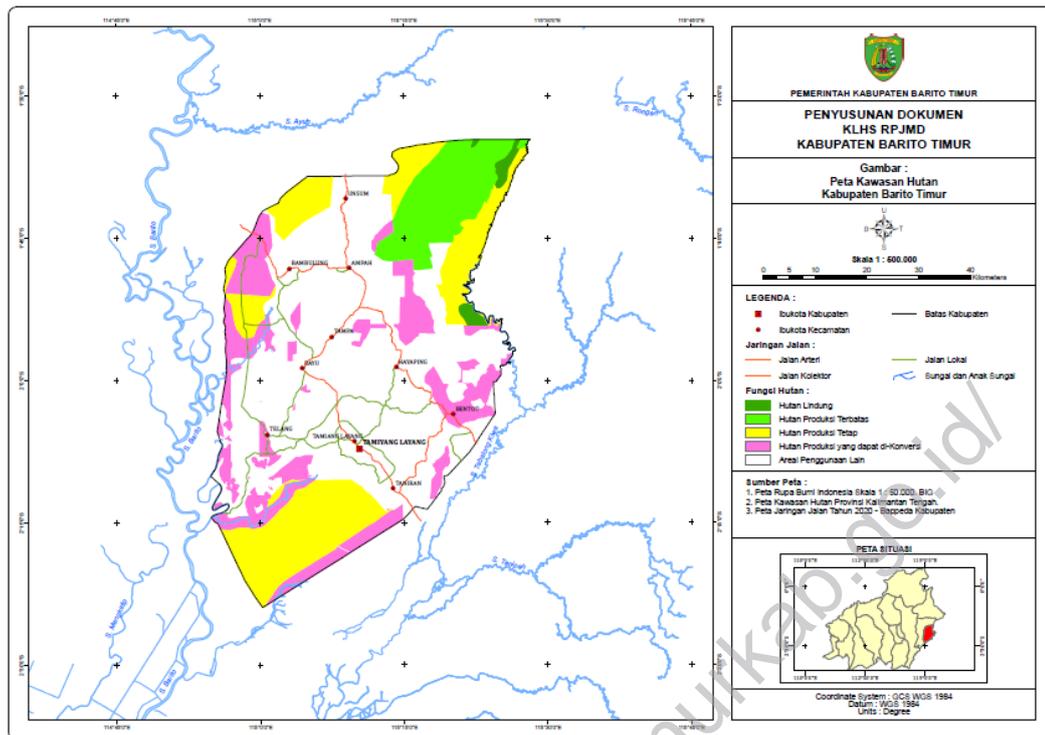
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

3.1.7 Fungsi Kawasan Hutan dan Penggunaan Lahan

Berdasarkan penetapan Kawasan Hutan 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, fungsi kawasan di Kabupaten Barito Timur sebagaimana tabel dan gambar berikut.

Tabel 3. 5 Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

Nomor	Fungsi Kawasan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	HL	3,375	0.88
2	HPT	34,885	9.10
3	HP	76,940	20.07
4	HPK	61,221	15.97
5	APL	206,607	53.89
6	TUBUH AIR	373	0.10
Total		383,400	100.00

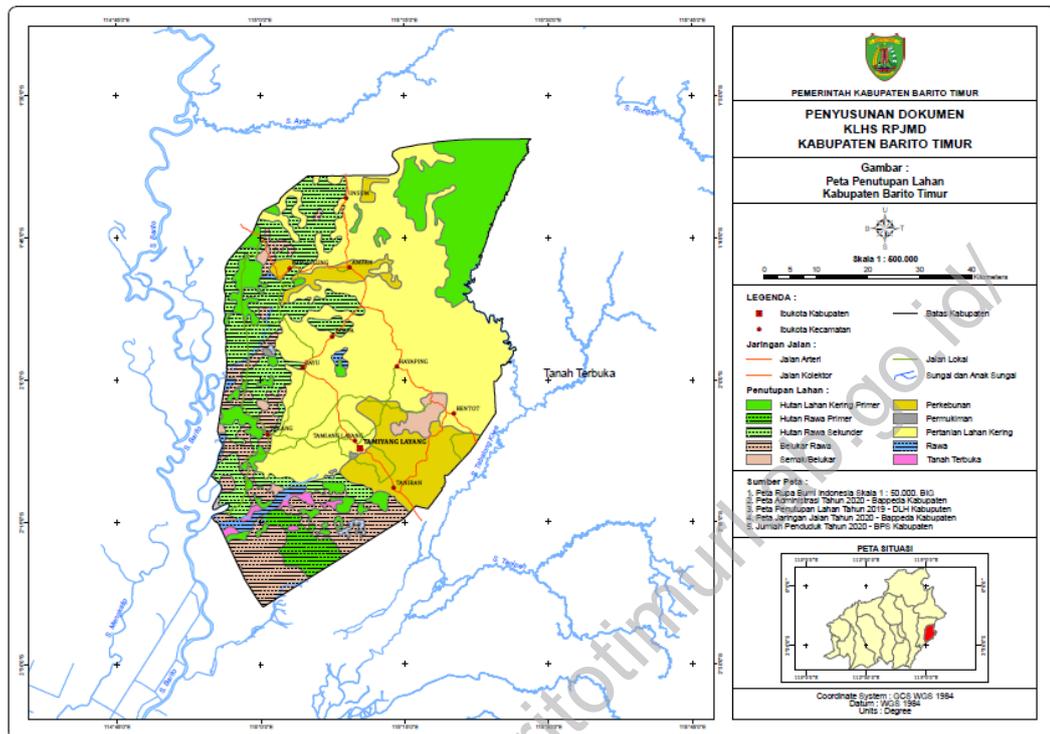


Gambar 3. 7 Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Timur
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Penggunaan lahan atau tutupan lahan di Kabupaten Barito Timur terbagi ke dalam dua tipe lahan, yaitu lahan kering dan lahan basah. Lahan basah terdiri dari belukar rawa, hutan rawa primer, rawa dan tubuh air, sisanya merupakan lahan kering. Dari luasan yang ada, lahan kering merupakan lahan yang memiliki lahan paling luas yaitu 325.485 Ha (84,89%), dan lahan basah 57.915 Ha (15,11%). Dari tutupan lahan (*landcoverage*) hasil analisis citra, di Kabupaten Barito Timur sebagian besar didominasi oleh semak/belukar yaitu 148.113 Ha (38,63%), diikuti hutan rawa sekunder 59.627 Ha (15,55%), dan hutan lahan kering primer 55,467 Ha (14,47%). Pemanfaatan lahan yang paling kecil adalah permukiman 273 Ha dan tubuh air 268 Ha.

Di Kabupaten Barito Timur, proporsi lahan-lahan diluar kawasan hutan yang penguasaannya sudah di administrasikan masih sangat kecil. Proporsi lahan di luar kawasan hutan meliputi lahan-lahan di perkotaan, lahan transmigrasi, dan lahan perkebunan besar. Lahan-lahan tersebut dan lahan yang belum diadministrasikan sudah berupa pemukiman dan pertanian intensif yang berada di perdesaan dengan tingkat penguasaannya sangat tinggi. Sedangkan pada lahan-

lahan pertanian yang penggarapannya tidak intensif, seperti ladang berpindah dan hutan rakyat, tingkat penguasaannya tergolong rendah.



Gambar 3. 8 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Barito Timur

Sumber: Hasil Analisis, 2021

3.2 Kondisi Baseline Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis, analisis materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program paling sedikit memuat kajian:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

3.2.1 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan

Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk menguantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Yang dimaksud dengan "Daya Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ambang batas secara sederhana didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang tersedia. Status DDLH kemudian ditentukan dengan melihat apakah jumlah penduduk suatu wilayah telah melewati ambang batasnya atau belum.

3.2.2 Daya Dukung Pangan

Daya dukung energi pangan di Kabupaten Barito Timur di hitung berdasarkan kebutuhan kalori yang dibutuhkan setiap orang dibandingkan dengan ketersediaan energi yang dapat didukung oleh tanaman pangan khususnya sawah di Kabupaten Barito Timur.

Tingkat ketersediaan energi pangan yang paling besar dapat ditemukan di Kecamatan Dusun Tengah yaitu mencapai 1.401Kkal/tahun. Sedangkan untuk kebutuhan energi pangan tergolong besar ditemukan di Kecamatan Dusun Timur mencapai 21.678.718.750 KKal/tahun. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di kecamatan tersebut yang paling besar sehingga tingkat kebutuhan energi atau konsumsi pangannya pun juga semakin besar.

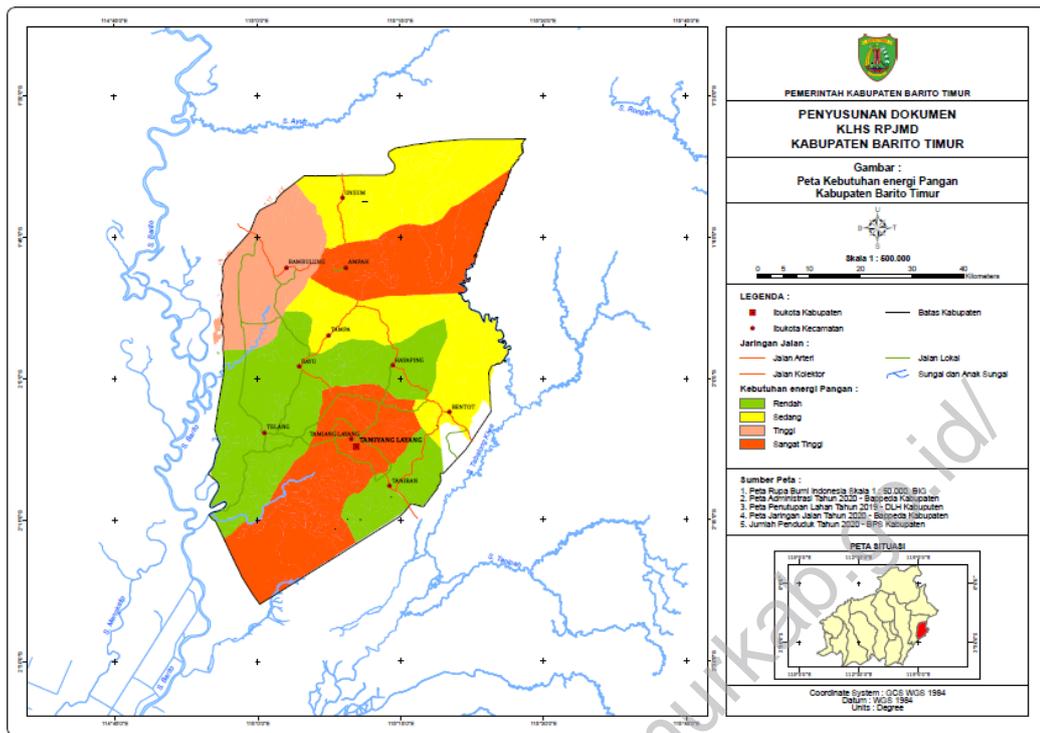
Status data dukung energi pangan di Kabupaten Barito Timur dapat dilihat dari perbandingan antara energi pangan yang tersedia dengan kebutuhan energi

setiap penduduk di tiap kecamatan dalam satu tahun. Kondisi daya dukung energi pangan dapat dilihat pada Tabel 3.6. Secara keseluruhan di Kabupaten Barito Timur memiliki daya dukung pangan adalah surplus dengan nilai DD pangan sebesar 1.97. Namun dari 10 kecamatan di Kabupaten Barito Timur terdapat satu kecamatan yang dinyatakan defisit daya dukung pangannya yakni di Kecamatan Dusun Tengah, artinya lahan pertanian yang terdapat di Kecamatan Dusun Tengah belum dioptimalkan dalam menghasilkan pangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Tabel 3. 6 Daya Dukung Pangan di Kabupaten Barito Timur

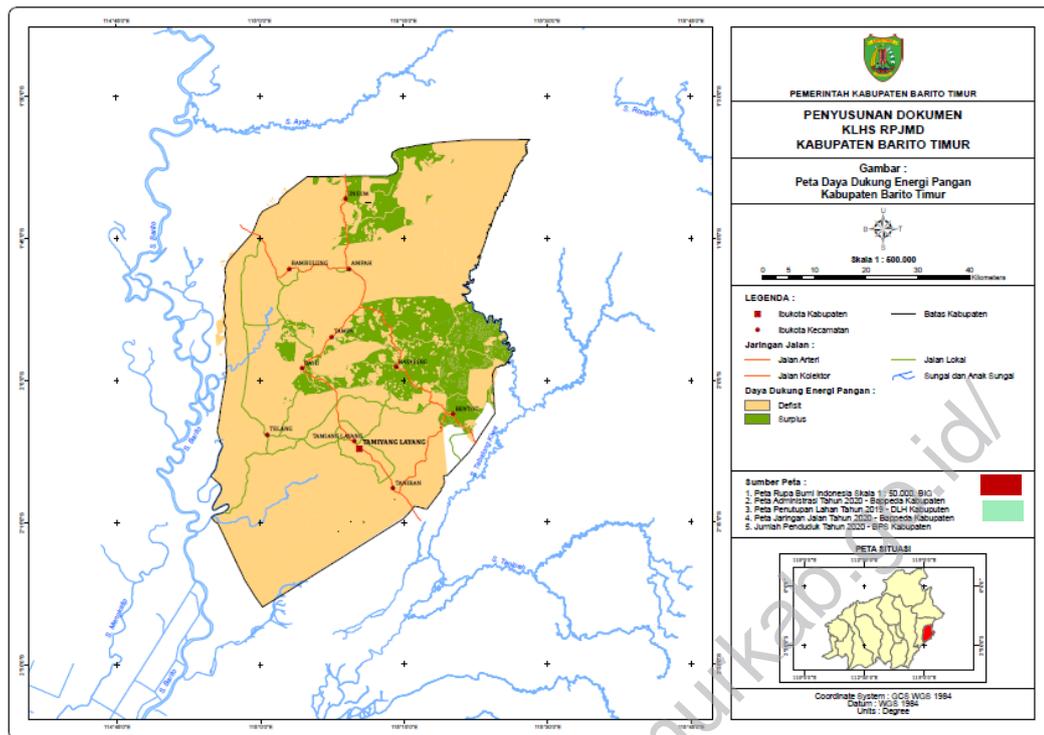
No.	Kecamatan	Luas penghasil pangan (ha)	Ketersediaan pangan (ton kal)	Kebutuhan pangan (tonkal)	DD pangan	Status
1	Awang	21,981	23,638	9,067	2.61	Surplus
2	Banua Lima	26,541	17,389	9,367	1.86	Surplus
3	Dusun Tengah	49,731	35,717	36,454	0.98	defisit
4	Dusun Timur	87,173	58,589	39,919	1.47	Surplus
5	Karusen Janang	49,356	28,235	7,371	3.83	Surplus
6	Paju Epat	59,348	42,738	8,490	5.03	Surplus
7	Paku	35,119	30,121	13,129	2.29	Surplus
8	Patangkep Tutui	32,750	33,312	10,062	3.31	Surplus
9	Pematang Karau	63,236	25,696	18,724	1.37	Surplus
10	Raren Batuah	55,747	28,783	12,344	2.33	Surplus
	Grand Total	480,982	324,219	164,927	1.97	Surplus

Sumber: Hasil analisis, 2021



Gambar 3. 9 Peta Kebutuhan Energi Pangan Kabupaten Barito Timur

Sumber: Hasil analisis, 2021



Gambar 3. 10 Peta Daya Dukung Energi Pangan Kabupaten Barito Timur

Sumber: Hasil analisis, 2021

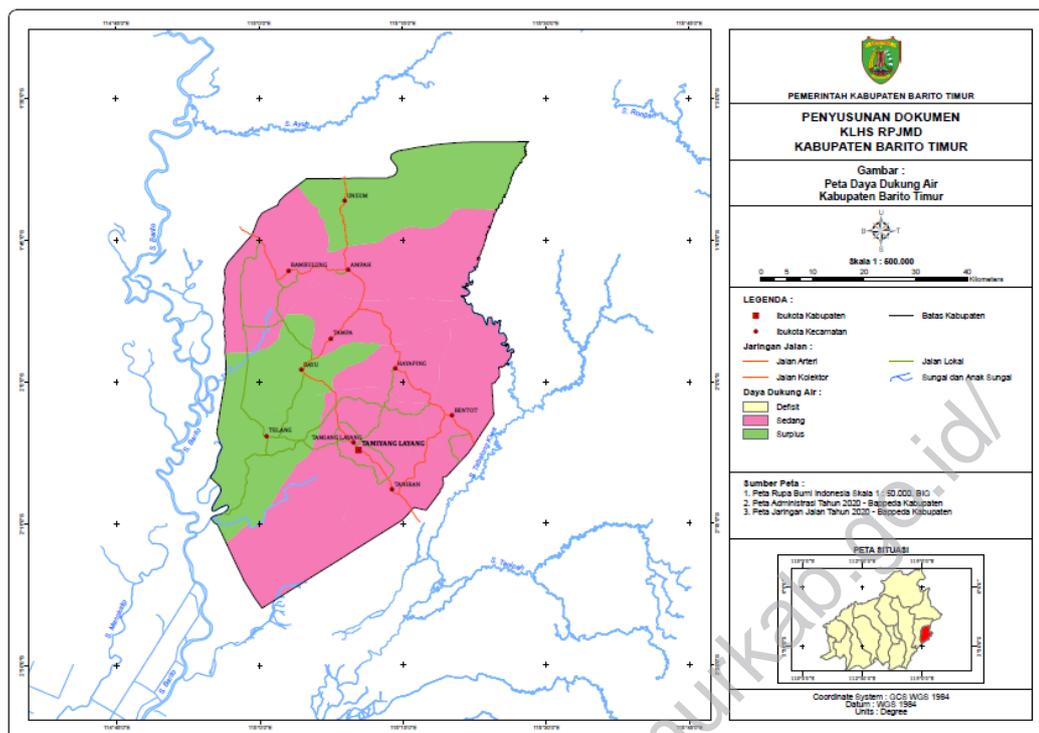
3.2.3 Daya Dukung Air

Daya dukung air di Kabupaten Barito Timur dilakukan berdasarkan analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik. Kondisi ketersediaan air di Kabupaten Barito Timur seluruhnya surplus.

Tabel 3. 7 Daya Dukung Air di Kabupaten Barito Timur

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas areal penghasil air	Sum of supply	Kebutuhan air bersih (m3)	DD Air	Status
1	Awang	6,472	21,981	13,008,565	188,982	68.83	Surplus
2	Banua Lima	6,686	26,541	13,360,769	195,231	68.44	Surplus
3	Dusun Tengah	26,020	49,731	26,339,807	759,784	34.67	Surplus
4	Dusun Timur	28,493	87,173	41,821,753	831,996	50.27	Surplus
5	Karusen Janang	15,783	49,356	17,275,528	153,621	112.46	Surplus Tinggi
6	Paju Epat	6,060	59,348	20,241,534	176,952	114.39	Surplus Tinggi
7	Paku	28,113	35,119	16,171,608	273,633	59.10	Surplus
8	Patangkep Tutui	7,182	32,750	19,870,051	209,714	94.75	Surplus
9	Pematang Karau	13,365	63,236	22,210,609	390,258	56.91	Surplus
10	Raren Batuah	8,811	55,747	32,708,667	257,281	127.13	Surplus Tinggi
	Grand Total	146,985	480,982	223,008,890	3,437,453	64.88	Surplus

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Gambar 3. 11 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Barito Timur
 Sumber: Hasil Analisis, 2021

3.2.4 Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikro organisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional (MA, 2005). Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (De Groot, 1992). Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005).

Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groot, 2002) :

- Jasa penyediaan : (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya, (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias.
- Jasa Pengaturan : (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah.
- Budaya : (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan identitas budaya, (20) Spiritual dan keagamaan, (21) Pendidikan.
- Pendukung : (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma nutfah.

Menurut sistem klasifikasi jasa ekosistem dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005), jasa ekosistem dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa pendukung (*supporting*), dan jasa kultural (*cultural*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Klasifikasi Jasa Lingkungan

No	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (Provisioning)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil

No	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
Fungsi Pengaturan (Regulating)		
1	Iklm	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami (pollination)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies <i>trigger</i> dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (Cultural)		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lanskap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual

No	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>)		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: Millenium Ecosystem Assessment, 2005; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2011

Secara operasional daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut:

- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan)
- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan).

3.2.4.1 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

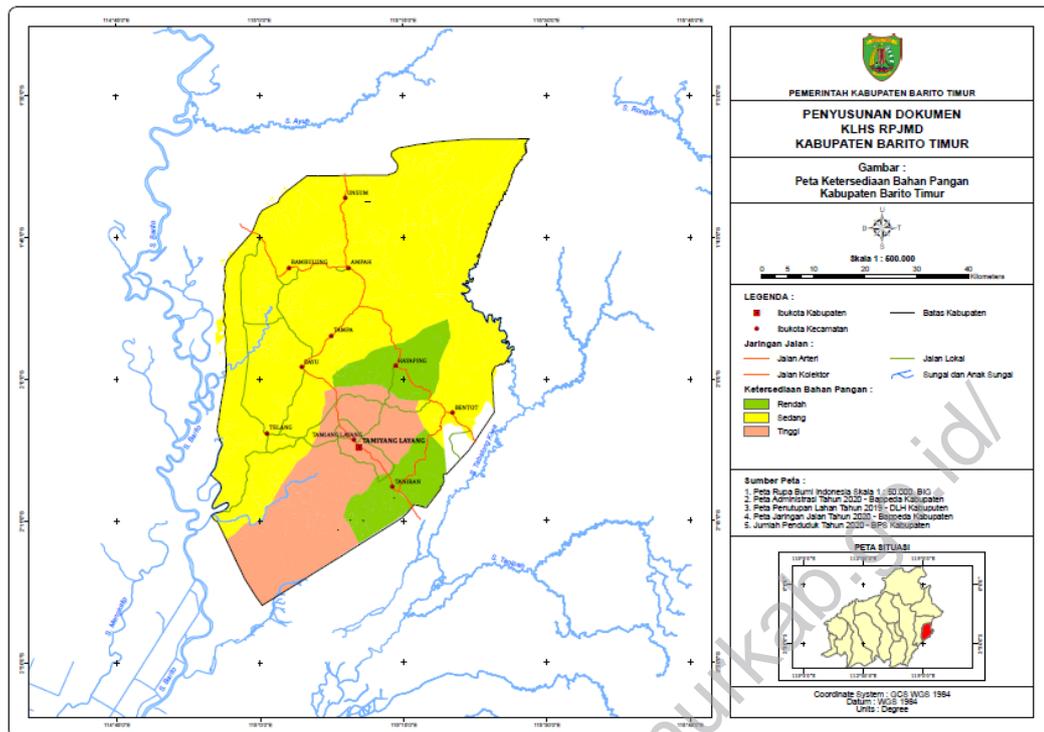
Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Alam diciptakan terdiri dari berbagai ekosistem yang juga memberikan bermacam-macam manfaat bagi makhluk hidup. Salah satu manfaat ini adalah penyediaan

bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukkan bagi konsumsi manusia. Secara umum di Kabupaten Barito Timur lahan yang mampu menyediakan bahan pangan dapat dibagi menjadi lahan berpotensi tinggi, sedang, dan rendah. Lahan yang berpotensi tinggi dalam menyediakan bahan pangan memiliki luasan 868 km² (22.63%), lahan yang berpotensi sedang dalam penyediaan bahan pangan memiliki luasan sebesar 2,505 km² (65.34%), dan lahan yang berpotensi menghasilkan pangan rendah seluas 461 km² (12.02%).

Tabel 3. 9 Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan

No.	Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Grand Total
1	Kec. Awang	203			203
2	Kec. Benua Lima	258			258
3	Kec. Dusun Tengah		371		371
4	Kec. Dusun Timur			867.7	867.7
5	Kec. Karusen Janang		178		178
6	Kec. Paju Epat		664.3		664.3
7	Kec. Paku		272		272
8	Kec. Patangkep Tutui		255		255
9	Kec. Pematang Karau		579		579
10	Kec. Raren Batuah		186		186
	Grand Total	461	2,505	868	3,834
	Persentase (%)	12.02	65.34	22.63	100.00

Sumber: Hasil Analisis, 2021



Gambar 3. 12 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Barito Timur

3.2.4.2 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

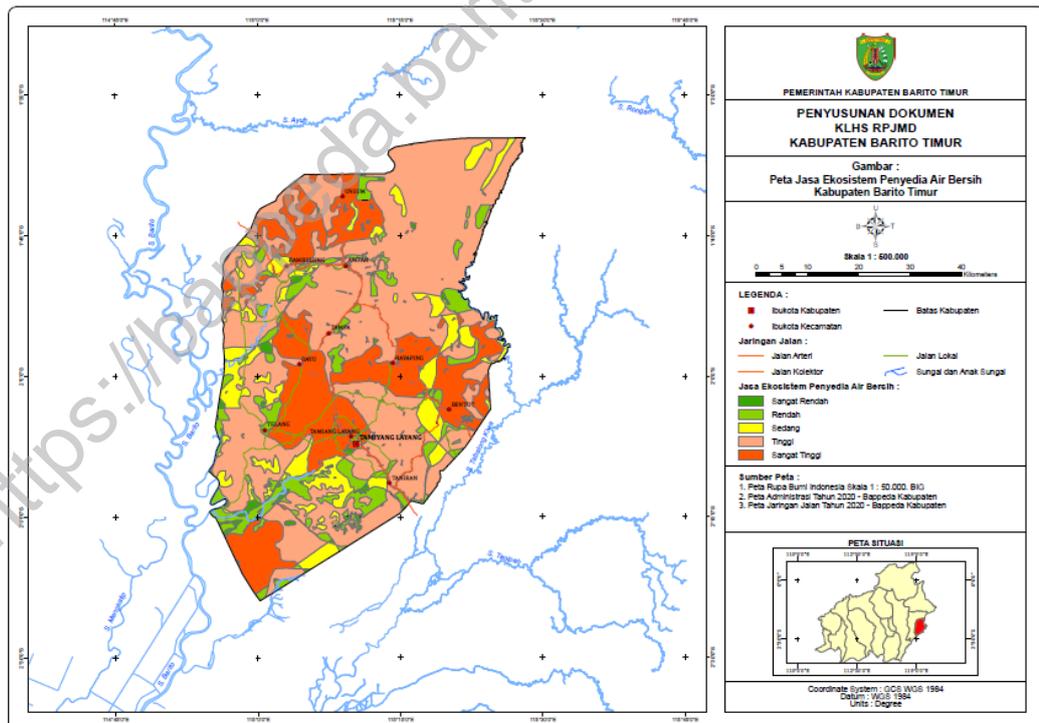
Jasa ekosistem penyedia air bersih merupakan jasa yang disediakan alam untuk kehidupan di permukaan bumi, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sumber utama penyedia air bersih dari ekosistem adalah curah hujan yang jatuh di permukaan bumi. Kemudian curah hujan sampai ke permukaan bumi ditahan oleh tajuk pohon melalui mekanisme intersepsi tajuk (I_c), kemudian yang jatuh ke tanah atau lantai hutan ditahan dan terjadi intersepsi oleh lantai hutan (I_f), kemudian ada aliran permukaan (Q), air yang tersimpan di dalam tanah (ΔS).

Dengan curah hujan sebesar 2784.7 mm per tahun dan tutupan lahan di masing-masing kecamatan, maka potensi jasa ekosistem di Kabupaten Barito Timur didominasi oleh Potensi Tinggi dan Sangat Tinggi yakni sebesar 76.93% dari total wilayah kabupaten Barito Timur, kemudian di susul oleh potensi rendah sebesar 11.18%, potensi sedang sebesar 9.44% dan potensi rendah sebesar 2.45%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3. 10 Jasa Ekosistem Penyedia Air (Dalam luas, ha)

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
1	Kec. Awang	3	4	15	39	141	203
2	Kec. Benua Lima	13	61	20	164	-	258
3	Kec. Dusun Tengah	5	41	-	325	-	371
4	Kec. Dusun Timur	22	105	101	387	253	867.7
5	Kec. Karusen Janang	6	12	37	60	63	178
6	Kec. Paju Epat	25	107	47	337	148	664.3
7	Kec. Paku	4	24	15	229	-	272
8	Kec. Patangkep Tutui	3	23	54	71	104	255
9	Kec. Pematang Karau	11	47	58	302	160	579
10	Kec. Raren Batuah	2	4	15	134	31	186
	Grand Total	94	429	362	2,049	901	3,834
	Persentase (%)	2.45	11.18	9.44	53.43	23.50	100.00

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 3. 13 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Barito Timur (Sumber: Hasil Analisis, 2021)

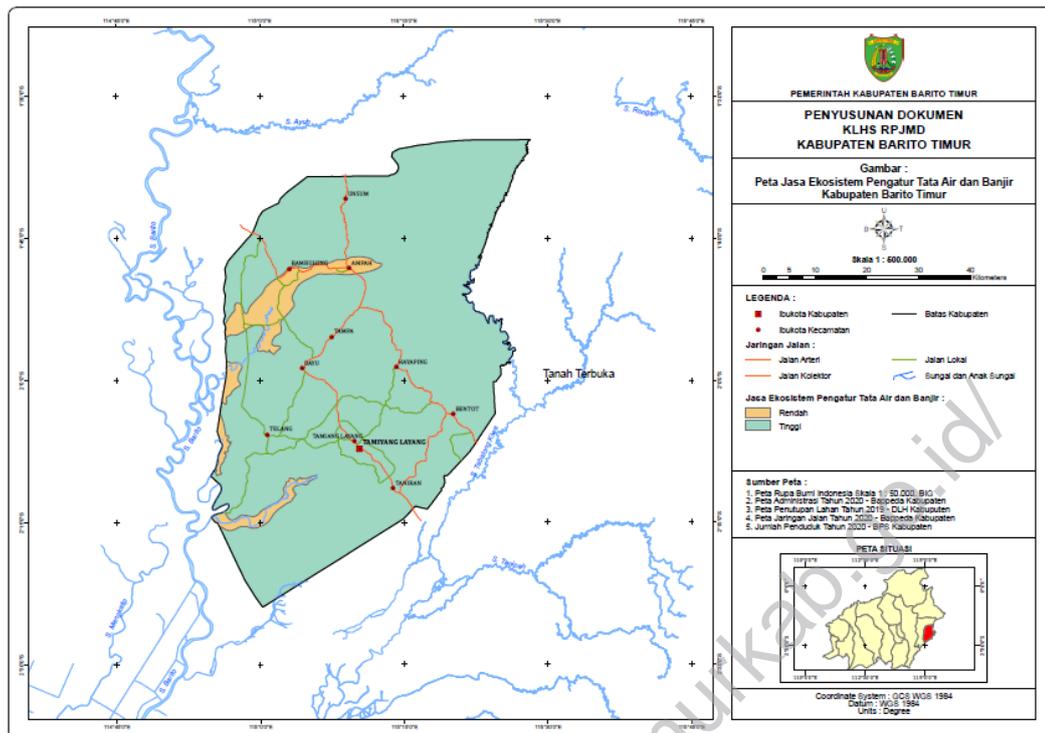
3.2.4.1 Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air dan Banjir

Mengacu pada data RTRW Kabupaten Barito Timur, di Kabupaten Barito Timur terdapat potensi rawan bencana banjir seluas 284 km². Berdasarkan kondisi tersebut, maka di daerah yang diindikasikan berpotensi terjadinya bencana banjir, maka jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir di daerah tersebut adalah rendah, sementara di daerah lainnya yang tidak berpotensi rawan banjir memiliki jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir yang tinggi. Sebaran potensi jasa ekosistem pengatur tata air seperti terlihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3. 11 Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air dan Banjir (Dalam luas, km²)

No.	Kecamatan	Rendah	Tinggi	Grand Total
1	Kec. Awang	-	203	203
2	Kec. Benua Lima	-	258	258
3	Kec. Dusun Tengah	27	344	371
4	Kec. Dusun Timur	27	840	867.7
5	Kec. Karusen Janang	12	166	178
6	Kec. Paju Epat	63	602	664.3
7	Kec. Paku	0	272	272
8	Kec. Patangkep Tutui	-	255	255
9	Kec. Pematang Karau	154	425	579
10	Kec. Raren Batuah	-	186	186
	Grand Total	284	3,550	3,834
	Persentase	7.42	92.58	100.00

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 3. 14 Peta Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air dan Banjir Kabupaten Barito Timur
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

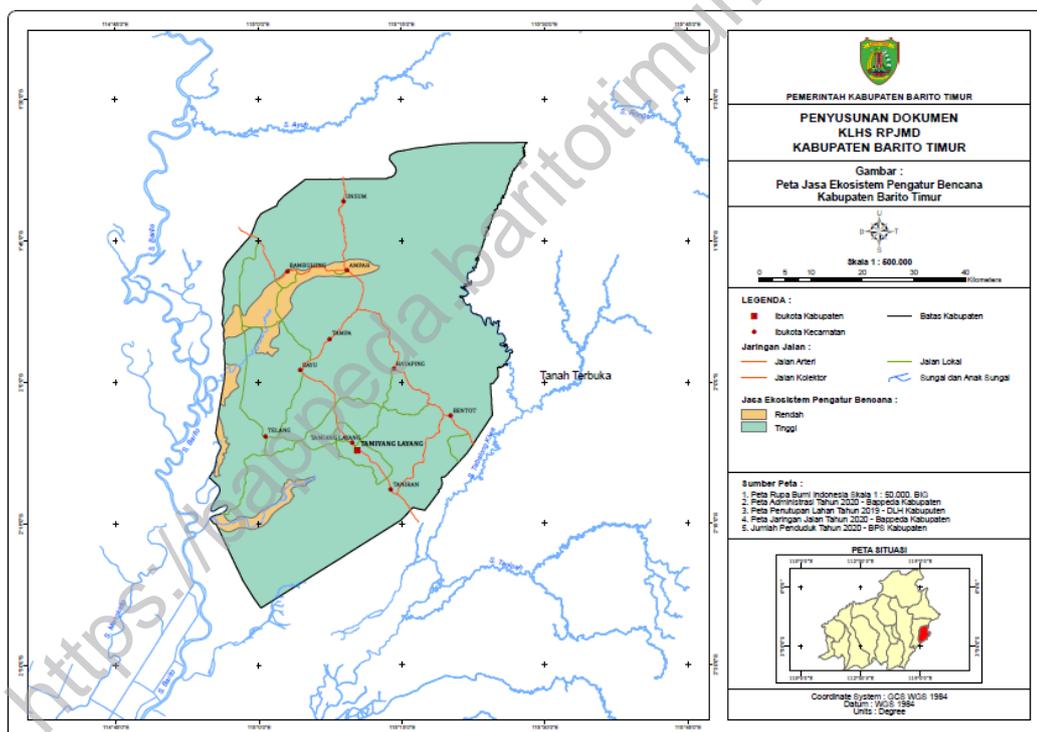
3.2.4.1 Jasa Ekosistem Pengendalian Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Barito Timur jarang berupa gempa bumi tetapi lebih didominasi oleh bencana banjir dan kebakaran hutan. Namun data yang ditemukan berupa data bencana banjir. Seperti halnya dengan jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir, maka jasa ekosistem pengendalian bencana lebih pada jasa ekosistem pengendalian bencana banjir, dengan sebaran sebagaimana tabel dan peta berikut.

Tabel 3. 12 Jasa Ekosistem Pengendalian Bencana (Dalam luas, km²)

No.	Kecamatan	Rendah	Tinggi	Grand Total
1	Kec. Awang	-	203	203
2	Kec. Benua Lima	-	258	258
3	Kec. Dusun Tengah	27	344	371
4	Kec. Dusun Timur	27	840	867.7
5	Kec. Karusen Janang	12	166	178
6	Kec. Paju Epat	63	602	664.3
7	Kec. Paku	0	272	272
8	Kec. Patangkep Tutui	-	255	255
9	Kec. Pematang Karau	154	425	579
10	Kec. Raren Batuah	-	186	186
	Grand Total	284	3,550	3,834
	Persentase	7.42	92.58	100.00

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 3. 15 Peta Jasa Ekosistem Pengendalian Bencana Kabupaten Barito Timur

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

3.2.4.1 Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

Kemampuan pengaturan iklim diukur dari kemampuan tutupan lahan menyimpan karbon dioksida (CO₂) dibandingkan dengan emisi yang dikeluarkan

oleh aktivitas penduduk per kapita per tahun. Metode perhitungan menggunakan rumus yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa, dengan rumus sebagai berikut.

Untuk perhitungan **Simpanan Karbon (Carbon Stock)** menggunakan rumus:

$$CS_i = (SOC + C_{VEG}) \times A$$

Dimana;

CS_i = stok karbon per satuan luas yang terkait dengan penggunaan lahan i (diukur sebagai massa karbon per satuan luas, termasuk tanah dan vegetasi).

SOC = karbon organik tanah (diukur sebagai massa karbon per hektar)

C_{VEG} = stok karbon vegetasi di atas dan di bawah tanah (diukur sebagai massa karbon per hektar)

A = penskalaan faktor ke area yang bersangkutan (diukur sebagai hektar per unit area).

Untuk menghitung SOC menggunakan rumus berikut:

$$SOC = SOC_{ST} \times F_{LU} \times F_{MG} \times F_I$$

dimana:

SOC_{ST} = karbon organik tanah standar dalam lapisan tanah pucuk 0-30 sentimeter (diukur sebagai massa karbon per hektar)

F_{LU} = faktor penggunaan lahan yang mencerminkan perbedaan karbon organik tanah yang terkait dengan jenis penggunaan lahan dibandingkan dengan karbon organik tanah standar

F_{MG} = faktor manajemen yang mencerminkan perbedaan karbon organik tanah yang terkait dengan praktik manajemen prinsip dibandingkan dengan karbon organik tanah standar

F_I = faktor input yang mencerminkan perbedaan karbon organik tanah terkait dengan tingkat input karbon yang berbeda dengan tanah dibandingkan dengan karbon organik tanah standar.

Untuk Indonesia yang termasuk benua Asia, tropika basa dan tanah liat dengan aktivitas pengolahan rendah, besaran SOC per ha sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 13 Total Simpanan Karbon Per ha (dalam ton)

Landuse	SOC _{ST}	FLU	F _{MG}	F _I	SOC	Vegetation Carbon Stock (C _{veg})	Total Carbon Stock (TCS)
Forest>30% Canopy	60	1	1	1	60	230	290
forest (>10% and <30%)	60	1	1	1	60	45	105
Palmoil	60	1	1,22	1	73,2	60	133,2
grassland	60	1	1	1	60	8,1	68,1
scrubland	60	1	1	1	60	46	106
perennial crop	60	1	1,22	1	73,2	34,3	107,5
coconut	60	1	1,22	1	73,2	75	148,2
Cropland	60	0,48	1	1	28,8	0	28,8
Openland	60	1	1	1	60	0	60
peatland							40,33
							1,124
settlement, Industry, Infrstructure						0	0

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Menghitung Emisi Carbon berdasarkan per Kapita per tahun. Gas rumah kaca merupakan kumpulan gas (CO₂, CH₄, dan N₂O) yang menyerap dan memancarkan panas sehingga dapat meningkatkan suhu bumi, khususnya CO₂. Emisi CO₂ per kapita dihasilkan dari perhitungan sektor transportasi, pemakaian listrik, gas, dan sampah, diasumsikan nilainya sebesar 1.602 ton CO₂/kapita/tahun.

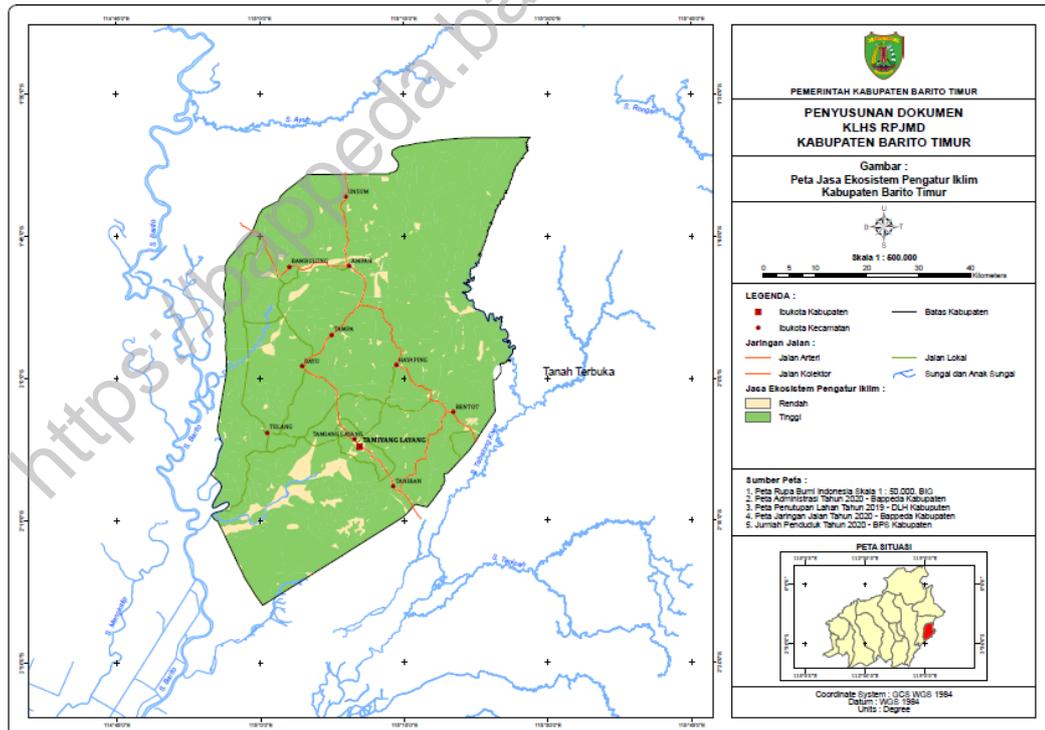
Untuk menghitung jasa ekosistem pengaturan iklim adalah dengan membandingkan kemampuan simpanan karbon (saving) berbagai penggunaan lahan dengan jumlah penduduk kali emisi karbon per kapita per tahun. Kategorisasi terdiri dari tiga jenis yakni defisit jika rasio saving dengan emisi kurang 1, jasa ekosiste sedang jika rasio 1 – 100 dan jasa ekosistem tinggi jika rasio > 100.

Berdasarkan rumus di atas dan asumsi besara emisi sebesar 1.602 ton CO2/kapita/tahun, maka sebaran jasa ekosistem pengaturan iklim sebagaimana tabel dan gambar berikut.

Tabel 3. 14 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur

No.	Kecamatan	Rendah	Tinggi	Grand Total
1	Kec. Awang	3.46	199.54	203.00
2	Kec. Benua Lima	12.37	245.63	258.00
3	Kec. Dusun Tengah	19.81	351.19	371.00
4	Kec. Dusun Timur	99.11	768.59	867.70
5	Kec. Karusen Janang	4.87	173.13	178.00
6	Kec. Paju Epat	27.41	636.89	664.30
7	Kec. Paku	8.18	263.82	272.00
8	Kec. Patangkep Tutui	8.07	246.93	255.00
9	Kec. Pematang Karau	28.07	550.93	579.00
10	Kec. Raren Batuah	1.77	184.23	186.00
	Grand Total	213.13	3,620.87	3,834.00
	Persentase	5.56	94.44	100.00

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 3. 16 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Barito Timur (Sumber: Hasil Analisis, 2021)

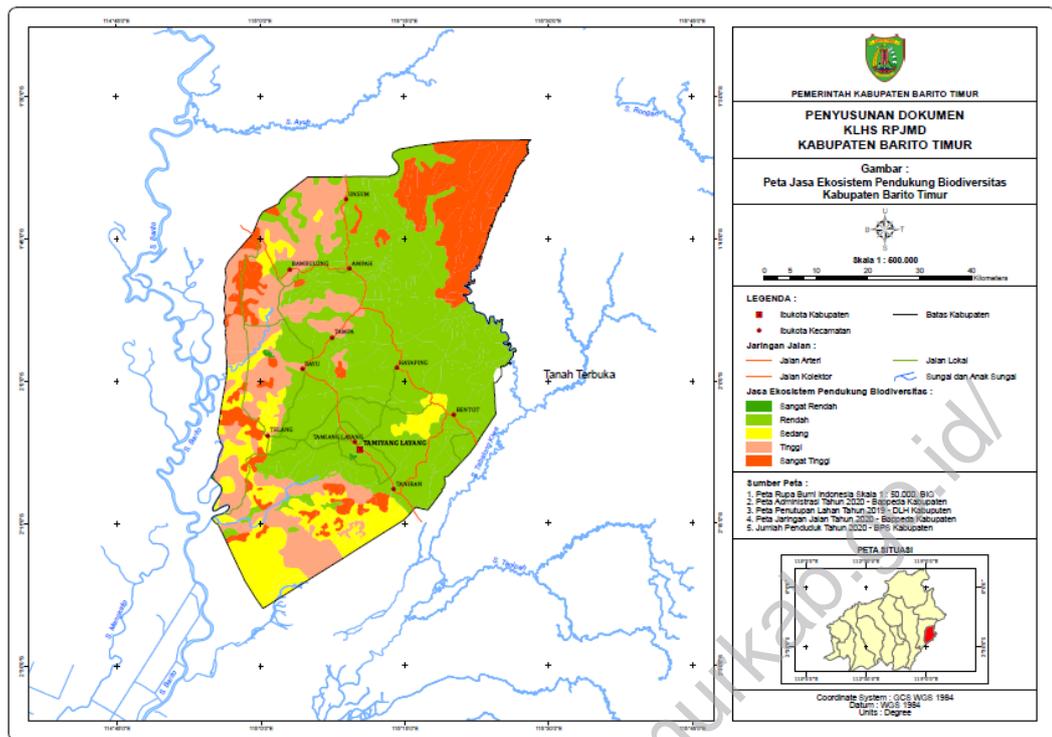
3.2.4.1 Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversity

Estimasi jasa ekosistem pendukung biodiversitas, dilihat dari tutupan lahan dimana tutupan lahannya semakin mendekati tutupan lahan hutan primer, maka semakin tinggi jasa ekosistem pendukung biodiversity. Sebaliknya tutupan lahannya semakin mendekati tanah terbuka dan areal terbangun maka semakin rendah kemampuan jasa ekosistem pendukung biodiversity. Berdasarkan hasil identifikasi, maka sebaran jasa ekosistem pendukung biodiversity seperti tabel dan gambar berikut

Tabel 3. 15 Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversity berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
1	Kec. Awang	-	197.43	2.89	0.23	2.45	203.00
2	Kec. Benua Lima	-	159.14	68.49	12.71	17.67	258.00
3	Kec. Dusun Tengah	-	248.04	-	0.68	122.28	371.00
4	Kec. Dusun Timur	2.06	393.02	263.72	171.14	37.75	867.70
5	Kec. Karusen Janang	1.49	82.47	27.35	55.88	10.81	178.00
6	Kec. Paju Epat	1.33	244.08	161.21	187.20	70.48	664.30
7	Kec. Paku	-	210.57	-	57.84	3.59	272.00
8	Kec. Patangkep Tutui	-	237.23	17.77	-	-	255.00
9	Kec. Pematang Karau	-	111.51	49.20	328.60	89.69	579.00
10	Kec. Raren Batuah	-	69.81	0.13	18.12	97.93	186.00
	Grand Total	4.88	1,953.29	590.77	832.40	452.66	3,834.00
	Persentase (%)	0.13	50.95	15.41	21.71	11.81	100.00

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 3. 17 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kabupaten Barito Timur

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

3.2.5 Dampak Aktivitas Pertambangan dan *Food Estate* Di Kabupaten Barito Timur

3.2.5.1 Dampak Aktivitas Pertambangan

Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup besar. Sumberdaya alam yang terdapat di Kabupaten Barito Timur, sebagian besar adalah batu bara yang telah dilakukan eksploitasi maupun masih dalam taraf eksplorasi. Sumber daya mineral di Kabupaten Barito Timur berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan - perusahaan pertambangan telah diperoleh data adanya beberapa bahan galian di daerah ini. Dari beberapa bahan galian tersebut baru sebagian kecil yang telah diketahui potensinya, dan sebagian besar masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut bila perlu untuk dikembangkan.

Potensi tambang dan bahan galian seperti batu bara, dan bahan galian C serta tanah liat. Jenis bahan galian batu bara ini terletak menyebar di wilayah

timur dan utara Kabupaten Barito Timur. Pada umumnya perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan beberapa telah melakukan eksploitasi dan ada pula yang dalam tahap penyelidikan tahap awal untuk mengetahui cadangan deposit bahan tambang.

Berdasarkan data IPPKH dari Kementerian LHK terdapat perusahaan yang telah melakukan Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya di kawasan hutan bersama dengan Kabupaten Barito Selatan seluas 997,65 ha. Pada tahap eksploitasi selain pertambangan batubara teetpi juga terdapat Eksploitasi Batu Andesit dan sarana penunjangnya 34,28 ha. Dalam penyediaan lapangan pekerjaan, sektor peratambangan dan penggalian memegang peranan penting yakni mencapai 28.02%. Pada umumnya kegiatan penambangan batubara berada di dalam kawasan hutan. Berdasarkan data di KLHK, terdapat izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi/ operasi produksi tambang dan non tambang (aktif) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 16 Izin pinjam pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi tambang dan non tambang

No.	Nama Perusahaan	Jenis Pertambangan	Nomor Izin	Jangka Waktu	Status
1	Indobara Niaga Adhipradana, PT	Eksploitasi Batu Andesit dan sarana penunjangnya	K.82/Menhut-II/2011	18/04/2014	Sudah selesai izin
2.	Trisula Kencana Sakti, PT	Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya	SK.668/Menhut-II/2011	14/08/2019	Izin sudah berakhir
3.	Koperasi Jembatan Dua Mandiri	Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya	SK.697/Menhut-II/2011	31/12/2029	Masih ada izin
4.	Padang Mulia, PT	Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya	SK.110/Menhut-II/2012	17/03/2029	Masih ada izin
5	Multi Tambangjaya Utama, PT	Operasi produksi batubara dan	SK.819/Menhut-II/2013	19/11/2027	Masih ada izin

No.	Nama Perusahaan	Jenis Pertambangan	Nomor Izin	Jangka Waktu	Status
		sarana penunjangnya			
6.	Putra Asyano Mutiara Timur, PT	Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.686/Menhut-II/2013	05/02/2021	Berakhir di 2021
7.	Sarana Putra Perdana, PT	Sarana Putra Perdana, PT Operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya	SK.656/Menhut-II/2013	16/04/2019	Sudah berakhir

Kegiatan penambangan batubara seperti halnya di tempat lain adalah menggunakan sistem pertambangan terbuka. Kegiatan pertambangan batubara dengan sistem terbuka ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan di Wilayah IUP Tambang Batubara, di Wilayah DAS Tambang Batubara.

1. Kerusakan Lingkungan Di Wlayah IUP Tambang Batubara

Sebagaimana halnya kegiatan pertambanangan batubara di lokasi lain, dengan sistem pertambangan terbuka (open mining), diindikasikan di perusahaan tambang batubara sistem terbuka menimbulkan kerusakan lingkungan yaitu (1) luas permukaan lubang galian yang terbentuk lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terkonsentrasi atau lebih dari 30% (tigapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terfragmentasi dan setiap lubang lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP, (2) parameter kualitas udara pada saat operasi menurun dibandingkan sebelum penambangan dan melampaui ABL, (3) kebisingan pada saat operasi dan pasca produksi meningkat dan melampaui BML dibandingkan sebelum penambangan, (4) penurunan kualitas air dibandingkan sebelum penambangan dan melampaui BML, (5) tidak dilakukan perlindungan tanah pucuk, (6) peningkatan erosi dibandingkan sebelum penambangan, (7) parameter tingkat kesuburan tanah menurun dibandingkan sebelum penambangan, (8) hilangnya jenis dan jumlah vegetasi, (9) menurunnya indeks keanekaragaman, (10) hilangnya jenis satwa

liar yang dilindungi, (11) menurunnya jenis dan jumlah plankton, (12) menurunnya jenis dan jumlah benthos, (13) menurunnya jenis dan jumlah nekton, (14) munculnya lokasi prostitusi, (15) terjadi prevalensi penyakit yang disebabkan polusi udara, (16) terjadi prevalensi penyakit yang disebabkan polusi air, (17) berkembangnya vektor penyakit, dan (18) terdapat kandungan E. coli dalam sumber air minum.

Indikator yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau menunjukkan perusahaan tambang mengikuti regulasi, berdampak baik terhadap kondisi biologi, fisik dan kimia, serta kondisi sosial-ekonomi-budaya dan kesehatan masyarakat di IUP sampel adalah sebanyak 15 indikator (42%). Tiga indikator yang belum dapat diverifikasi yaitu (1) kandungan logam berat meningkat dibandingkan sebelum penambangan, (2) menurunnya jenis, jumlah dan keanekaragaman mangrove, dan (3) menurunnya kualitas terumbu karang.

Berdasarkan literatur menunjukkan bahwa di perusahaan tambang batubara sistem tambang terbuka, pada umumnya kegiatan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur menimbulkan kerusakan lingkungan di tingkat IUP.

2. Kerusakan Lingkungan Di Wilayah DAS Tambang Batubara

Berdasarkan studi literatur menunjukan bahwa diindikasikan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Sub DAS adalah penurunan kualitas air yang telah berdampak pada penurunan produktivitas produktivitas ikan kolam, ikan tangkapan laut, menurunnya Jumlah Penduduk yang menangkap ikan di sungai, menurunnya jumlah nelayan dan mengindikasikan adanya peningkatan prevalensi penyakit yang disebabkan oleh penceamaran air. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tambang batubara di Kabupaten Barito Timur diindikasikan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan di tingkat DAS tersebut dipicu oleh kerusakan lingkungan di wilayah IUP tambang batubara di Kabupaten Barito Timur, diantaranya luas permukaan lubang galian yang terbentuk lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terkonsentrasi atau lebih

dari 30% (tigapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terfragmentasi dan setiap lubang lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP serta kualitas air di wilayah tambang yang sudah menurun.

Kondisi tersebut dan keadaan bahwa tambang batubara merupakan komoditas tambang utama di Kabupaten Barito Timur, namun juga mencerminkan bahwa Kabupaten Barito Timur mengalami penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan terutama oleh kegiatan tambang batubara.

3.2.5.1 Isu Food Estate

Kerja Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi di-orientasi-kan untuk melaksanakan reformasi struktural di segala bidang, termasuk untuk ketahanan pangan. Reformasi struktural ketahanan pangan ini dilakukan untuk memperkuat cadangan pangan nasional yang antara lain akan dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan nasional (food estate) sehingga ketahanan pangan nasional dapat diwujudkan. Pengembangan lumbung pangan nasional (food estate) ini akan dibangun secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir dan menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Pengembangan lumbung pangan nasional ini sekaligus dikaitkan dengan intervensi investasi dalam rangka memperkuat daya saing negara yang dilakukan secara terintegrasi berbasis pada pertanian modern (high-tech), pemulihan fungsi lingkungan hidup dan penataan hutan yang berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan (sustainability), modernisasi serta keterpaduan desa, adat dan elemen masyarakat/dunia usaha untuk memperkuat kohesi sosial dengan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk investasi dunia usaha (swasta), migrasi profesional (pemuda/angkatan kerja), dan SDM unggul (pelopor). Reformasi struktural pada konteks pangan ini menjadi sangat erat dengan program pengembangan wilayah seperti pengembangan destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan SDM serta governance khususnya good environmental governance sebagai instrumen penting untuk menciptakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan.

Sebelum terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah dikeluarkan Permen LHK NOMOR P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020. Menurut Pasal 2 disebutkan bahwa Kegiatan penyediaan Kawasan Hutan untuk

pembangunan Food Estate dilakukan dengan mekanisme (1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; atau (2) penetapan KHKP.

Setelah keluarnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 55, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 108, Pasal 114-115 Peraturan Menteri LHK No 7/2021 Pasal 483, dan Pasal 485-486.

1. Pelepasan Kawasan Hutan

Pelepasan kawasan hutan mengacu pada Pasal 55: Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan melalui Pelepasan Kawasan Hutan. Kemudian mengacu pada Pasal 58, disebutkan bahwa:

- (1) Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada provinsi yang tidak tersedia lagi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif.

Kriteria Hutan tidak produktif ditentukan berdasarkan dominasi tutupan lahan tidak berhutan lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus) yang terdiri tutupan lahan antara lain semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur (Pasal 273 ayat (2) huruf d, Permen LHK 7/2021)

Berdasarkan ketentuan tersebut, dimana Kabupaten Barito Timur memiliki Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi (HPK), dan kondisi hutannya sudah tidak produktif, maka dimungkinkan untuk membangun food estate. Selain itu, juga pengembangan food estate ini bisa di areal penggunaan lain (APL) yang kondisi saat sekarang sudah digarap oleh penduduk. Dengan pengembangan food estate yang terintegrasi dan berkelanjutan tersebut, maka pembangunan food estate bersama masyarakat sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat peladang.

2. Penetapan KHKP

Mengacu pada Pasal 108 (1) Untuk tujuan tertentu Kawasan Hutan dapat ditetapkan sebagai: a. Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;

b. Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus; atau

c. *Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan.*

Selanjutnya pada Pasal 114, dan Pasal 115.disebutkan:

(1) Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan ketahanan pangan (food estate) dengan mekanisme Penetapan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dilakukan pada:

a. Kawasan Hutan Lindung; dan/atau

b. Kawasan Hutan Produksi.

(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung dilakukan melalui kegiatan pemulihan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan ketahanan pangan (food estate) dapat dilakukan pada Kawasan Hutan:

a. yang telah dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan;

b. yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya; dan

c. yang telah dicadangkan atau telah dibebani persetujuan Perhutanan Sosial atau telah dicadangkan untuk tanah objek reforma agraria dengan menyesuaikan program yang berorientasi pada rakyat dan reforma agraria.

- (4) Menteri menetapkan batasan luasan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dengan mempertimbangkan luasan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan dan kecukupan luas Kawasan Hutan dan hasil kajian lingkungan hidup strategis.
- (5) Pengelolaan penggunaan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c. pelaksanaan kegiatan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan;
 - d. kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan;
 - e. Pemanfaatan Hutan pada areal Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pendukung;
 - g. pemulihan dan rehabilitasi Hutan; dan
 - h. pelaporan pengelolaan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, serta masih terdapat kawasan hutan produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL), maka Kabupaten Barito Timur memiliki peluang untuk dapat membangun food estate. Selain untuk meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Barito Timur, tetapi juga dapat meningkatkan peluang investasi dan sekaligus dapat meningkatkan petani peladang berpindah yang dewasa ini masih mendominasi usaha budidaya pertanian di Kabupaten Barito Timur.

3.3 Land Sistem dan Kesesuaian Lahan Bartim

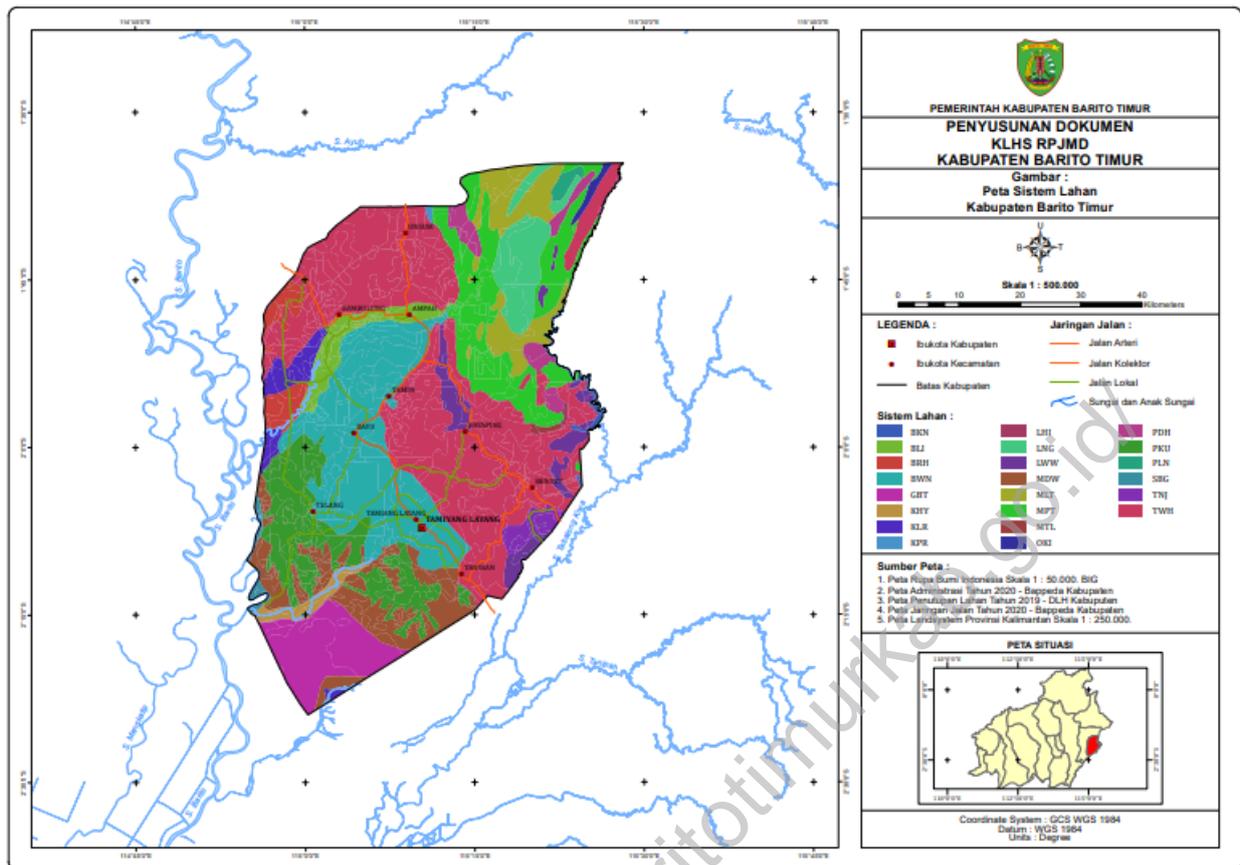
3.3.1 Sistem Lahan Wilayah Kajian

Berdasarkan sistem lahan (*land system*) di kabupaten Barito Timur terdapat 21 sistem lahan dengan luasan terbesar yaitu TWH (Teweh) 113,94 ha (30,74%) selanjutnya BWN (Bawin) seluas 58.175 ha (15,74%) sebagaimana yang terlihat pada **Tabel 3.17** dan **Gambar 3.18** berikut.

Tabel 3. 17 Kondisi Sistem Lahan Di Kabupaten Barito Timur

No	Land System	Deskripsi	Luas	Proporsi	Keterangan
1	BKN	Bakunan	1.092	0,30%	
2	BRH	Barah	6.883	1,86%	
3	BWN	Bawin	58.175	15,74%	
4	BLI	Beliti	9.129	2,47%	
5	GBT	Gambut	21.054	5,70%	
6	KHY	Kahayan	3.886	1,05%	
7	KPR	Kapor	265	0,07%	
8	KLR	Klaru	6.684	1,81%	
9	LWW	Lawangguwang	10.566	2,86%	
10	LHI	Lohai	308	0,08%	
11	LNG	Luang	14.031	3,80%	
12	MLT	Mantalat	17.678	4,78%	
13	MPT	Maput	34.037	9,21%	
14	MDW	Mendawai	25.421	6,88%	
15	OKI	Okki	1.210	0,33%	
16	PLN	Pakalunai	1.432	0,39%	
17	PKU	Pakau	31.808	8,61%	
18	PDH	Pendreh	7.045	1,91%	
19	SBG	Sebangau	1.388	0,38%	
20	TNJ	Tanjung	3.869	1,05%	
21	TWH	Teweh	113.594	30,74%	
	Jumlah		369.555	100,00%	

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 3. 18 Peta Sebaran Sistem Lahan Di Kabupaten Barito Timur
 (Sumber: Hasil Analisis, 2021)

3.3.2 Jenis Tanah Wilayah Kajian

Di wilayah Kabupaten Barito timur terdapat jenis tanah yaitu aluvial, organosol, latosol, dan asosiasi dari beberapa jenis tanah secara setempat-setempat. Berdasarkan analisis dari land system jenis tanah didominasi oleh Tanah Latosol di Kabupaten Barito Timur mencapai luasan 175.557 ha (47,50%) dan Tanah organosol / tanah gambut seluas 21.054 ha (5,70%) sebagaimana yang terlihat pada **Tabel 3.18** dan **Gambar 3.19** berikut.

Tabel 3. 18 Kondisi Jenis Tanah Di Kabupaten Barito Timur

No	USDA/Soil Taxonomy (1975)	Sistem Dudal-Suprptohardjo (1957 – 1961)	PPT 1983	Luas	Proporsi
1	Dystropepts Tropudults	Latosol	Kambisol, Latosol	1.432	0,39%
2	Fluvaquents Tropaquents	Aluvial	Aluvial	6.684	1,81%
3	Fluvaquents Tropaquepts Tropohemists	Komplek Tanah aluvial, organosol	Komplek Tanah aluvial, organosol	9.129	2,47%
4	Paleudults Tropudults Tropaquents	komplek tanah Latosol, aluvial	komplek tanah Latosol, aluvial	6.293	1,70%
5	Placaquods Tropopsammets Dystropepts	komplek podsol, regosol, Latosol	komplek podsol, regosol, Latosol	31.808	8,61%
6	Rendolls Eutropepts Tropotolists	Komplek tanah Molisol, latosl, organosol	Komplek tanah Molisol, latosl, organosol	1.210	0,33%
7	Tropaquepts Fluvaquents	Aluvial	Aluvial	3.869	1,05%
8	Tropaquepts Fluvaquents Sulfaquents	Aluvial	Aluvial	3.886	1,05%
9	Tropaquepts Tropaquents Tropofluvents	Aluvial	Aluvial	1.092	0,30%
10	Tropofluvents Fluvaquents	Aluvial	Aluvial	1.388	0,38%
11	Tropohemmists Placaquods Tropohemists	Komplek tanah Organosol, podsol	Komplek tanah Organosol, podsol	6.883	1,86%
12	Tropohemmists Tropofibrists	Organosol	Organosol	21.054	5,70%
13	Tropohemmists Troposaprists Tropaquents	Komplek tanah organosol Aluvial	Komplek tanah organosol Aluvial	25.421	6,88%
14	Tropudults Dystropepts	Latosol	Latosol	59.911	16,21%

No	USDA/Soil Taxonomy (1975)	Sistem Dudal-Suprptoaharjo (1957 – 1961)	PPT 1983	Luas	Proporsi
15	Tropudults Dystropepts Placaquods	Komplek Tanah Latosol, podsol	Komplek Tanah Latosol, kambisol,po dsol	58.175	15,74%
16	Tropudults Dystropepts Troporthods	kompleks Latosol, podsol	Komplek Tanah Latosol, kambisol, podsol	17.106	4,63%
17	Tropudults Plinthudults Paleudults	Latosol	Latosol	109.676	29,68%
18	Tropudults Tropaquepts	Latosol	Latosol	4.273	1,16%
19	Tropudults Tropudalts Eutropepts	Latosol	Latosol	265	0,07%
	Jumlah			369.555	100,00%

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Adapun karakteristik jenis tanah tersebut sebagai berikut:

1. Latosol

Tanah Latosol di Kabupaten Barito Timur mencapai luasan 175.557 ha (47,50%) tersebar pada kemiringan lereng 0 – 8 % (2,58%), 15 – 25% (64,70%), 25 – 40 % (17,14%) dan pada kemiringan lereng > 40 % (15,57%). Tanah ini mempunyai solum tanah yang dalam sampai sangat dsalam (130-150 cm) bahkan lebih, sedangkan batasantara horizonnya tidak begitu jelas. Warnanya merah, coklat sampai kekuning-kuningan. Kandungan bahan organiknya berkisar 3 – 9 persen tetapi biasanya sekitar 5 % saja. Kemasaman tanah 4,5 – 6,5 (masam sampai agak masam). Tekstur liat, struktur remah dengan konsistensi gembur. Pada tanah latosol, semakin merah warna tanah semakin miskin unsur haranya. Pada umumnya kandungan unsur hara dari rendah sampai sedang. Mudah sampai agak sukar untuk merembeskan air, oleh sebab itu infiltrasi dan perkolasinya dari agak cepat sampai agak lambat, daya menahan air cukup baik dan agak tahan terhadap erosi.

Pada umumnya unsur hara dan kandungan bahan organiknya cukup rendah sehingga produktivitasnya dari sedang sampai tinggi. Tana ini juga berasosiasi dengan jenis tanah lainnya yaitu membentuk kompleks tanah dengan aluvial, podsol, regosol, dan Latosol.

2. Podsol

Tanah podsol terbentuk karena pengaruh curah hujan yang tinggi dan suhu yang rendah. Tanah podsol mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu jenis tanah ini tidak mempunyai perkembangan profil, tekstur lempung hingga pasir (bertekstur sedang sampai kasar), kandungan pasir kuarsanya tinggi, daya menahan air jelek, peka terhadap erosi, mempunyai pH 3,5 sampai 5,5, kesuburannya rendah – sangat rendah dengan kandungan dari unsur hara yang rendah dan sampai paling rendah dan Warna tanah podsol ini ialah coklat pucat atau juga dengan keputih – putihan sampai warnanya ini coklat kekuning kuningan. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 2000 mm/tahun. Di Kabupaten Barito Timur, tanah ini ditemukan berasosiasi dengan regosol dan latosol seluas 31.808 ha (8,61%) berada pada kemiringan

lereng 0 – 8% dan berasosiasi dengan organosol dan podsol seluas 6.883 ha (1,86%) berada pada kemiringan lereng 0 – 8%.

3. Aluvial

Tanah Alluvial ditemukan DI Kabupaten Barito Timur seluas seluas 16.919 (ha) 4,58 % di Kabupaten Barito Timur dengan sebaran 0-8% seluas 77,13% dan 15 – 25% seluas 22,87%. Alluvial adalah tanah yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa melalui sungai-sungai. Tanah lain yang tidak mempunyai horison penciri, tidak bertekstur kasar dari bahan albik atau horison apapun (kecuali jika tertimbun > 50 cm bahan baru) selain horison A okrik, horison H histik serta mempunyai tekstur kasar (pasir, pasir berlempung) pada kedalaman antara 25-100 cm dari permukaan tanah mineral.

Secara umum, sifat jenis tanah ini mudah digarap, dapat menyerap air, dan permeabel sehingga cocok untuk semua jenis tanaman pertanian. Ciri-ciri tanah alluvial yaitu, jenis tanah masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka, Tekstur tanahnya liat atau liat berpasir, mempunyai konsistensi keras waktu kering dan teguh pada waktu lembab. Aluvial berwarna kelabu sampai kecoklat-coklatan.

Tanah ini mempunyai sifat kimia antara lain kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya, Reaksi tanahnya dari masam, netral sampai basa , kandungan bahan organik dari rendah sampai tinggi, kejenuhan basa dan kapasitas tukar kation juga bervariasi karena tergantung dari bahan induk dan kesuburan umumnya sedang hingga tinggi.

4. Organosol

Tanah ini disebut juga tanah gambut. Jenis tanah ini terdapat sekitar 21.054 ha (5,70%) dan seluruhnya berada pada kemiringan lereng 0 – 8%. Tanah organosol ditemukan berasosiasi juga dengan tanaha aluvial seluas 9,35 %, dan berasosiasi dengan podsol seluas 1,86%.

Tanah organosol mempunyai profil tanah yang tersusun dari timbunan-timbunan bahan organik yang umumnya belum melapuk sempurna dengan ketebalan sangat bervariasi, dengan substratum berupa tanah mineral.

Kandungan bahan organiknya lebih dari 80 %. Tanah ini mempunyai tingkat kematangan fibrik, hemik dan saprik, tanpa horizon, tanpa struktur. Konsistensinya lepas, berwarna coklat kemerahan, sampai coklat hitam. Tanah gambut yang dalam kondisi tidak rusaak, kondisinya hamper sepanjang tahun tergenang air sehingga mempunyai aewrase dan drainase yang jelek. Sifat fisik tanah ini lainnya yaitu mempunyai kapasitas menahan air yang besar. Bahan organik yg telah melapuk sebagian besar bersifat koloidal sehingga mempunyai kemampuan menjerap unsure (kation –kation) yang cukup tinggi, sedang kohesi dan plastisitanya agak rendah.

Tanah ini mempunyai sifat kimia yaitu tingkat kemasaman tanah yang tinggi (masam – sangat masam), mengandung unsure hara yang rendah-sangat rendah, Kandungan nitrogen total terdapat sangat bervariasi, dari yang rendah hingga tinggi, C/N ratio yang tinggi, Kandungan unsure fosfor (P) kalium (K), dan alkali tanah lainnya rendah, dan kandungan Unsur mikronya juga rendah

3.3.3 Sistem Lahan dan Kesesuaian Lahan di Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan pada masing-masing land system di Kabupaten Barito Timur untuk komoditas tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan menunjukkan pada masing-masing land system (Bakunan, Barah, Bawin, Beliti, Gambut, Kahayan, Kapor, Klaru, Lawangguwang, Lohai, Luang, Mantalat, Maput, Mendawai, Okki, Pakalunai, Pakau, Pendreh, Sebangau, Tanjung, dan Teweh) mempunyai kelas kesesuaian yang bervariasi.

1. Tanaman Pangan dan Palawija

a) Tanaman Padi Sawah

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk tanaman padi sawah pada masing-masing system lahan, di Kabupaten Barito Timur **Tabel 3.19**, **Gambar 3.20**, dan **Gambar 3.21** menunjukkan terdapat kelas kesesuaian lahan aktual sebagai berikut:

- N1r (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama media perakaran) seluas 26.046 ha (7,05%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase, dan

penataan lahan dengan tingkat pengelolaan sedang sampai tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2

- N1rfn (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama media perakaran, retensi hara dan hara tersedia) 31.795 ha (8,60%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.
- N1rn (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama media perakaran, dan hara tersedia) 5.212 ha (1,41%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.
- N1s (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama kemiringan lereng) 134.569 ha (36,41%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.
- N2 (tidak sesuai permanen) seluas 79.689 ha (21,56%). Pada Kelas kesesuaian lahan ini umumnya tidak dapat dilakukan upaya perbaikan sehingga kelas kesesuaian lahan potensialnya juga N2.
- S3rfn (Sesuai marjinal dengan factor pembatas utama media perakaran, retensi hara dan hara tersedia) seluas 22.084 ha ha (5,98%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3fn (Sesuai marjinal dengan factor pembatas utama retensi hara dan hara tersedia) seluas 10.831ha (2,93%). Upaya perbaikan yang dilakukan

yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.

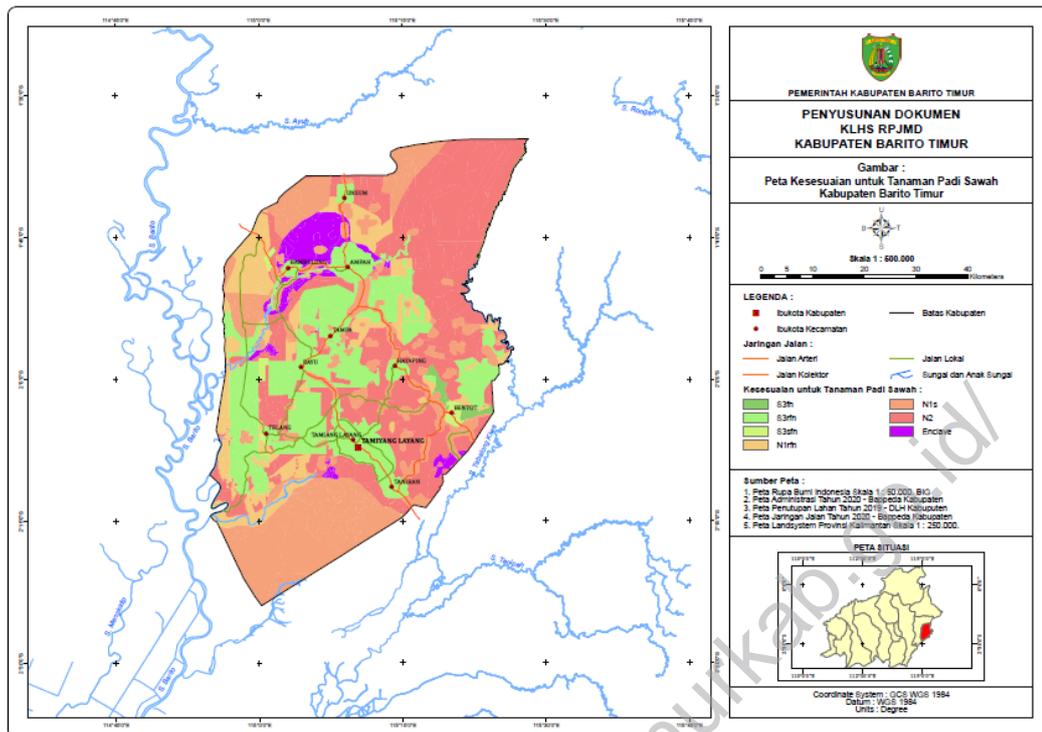
- S3sfn (Sesuai marjinal dengan factor pembatas utama kemiringan lereng, retensi hara dan hara tersedia) seluas 10.831ha (2,93%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan, perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.

Tabel 3. 19 Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Sawah dan Jenis Usaha Perbaikannya

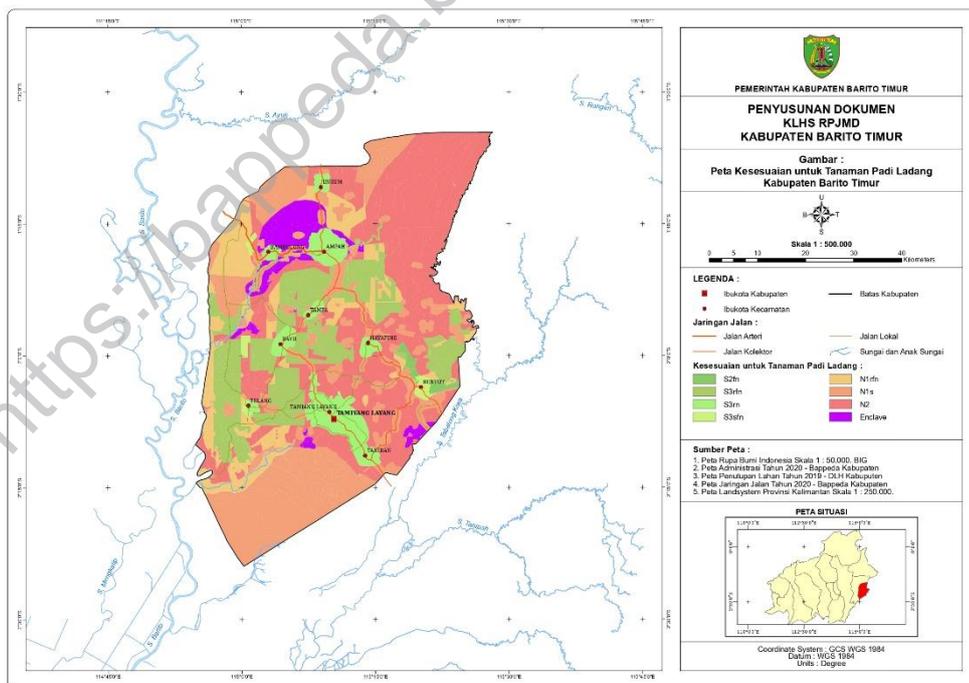
No	Kesesuaian Aktual	Jenis usaha Perbaikan	Kesesuaian Lahan Potensial	Luas	Proporsi	Tingkat Pengelolaan/Keterangan
1	Enclave			1.707	0,46%	Permukiman dan Tubuh air
2	N1r	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase, dan penataan lahan	S2	26.046	7,05%	Sedang-tinggi
3	N1rfn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S2	31.795	8,60%	Sedang-tinggi
4	N1rn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pemupukan	S2	5.212	1,41%	Sedang-tinggi

No	Kesesuaian Aktual	Jenis usaha Perbaikan	Kesesuaian Lahan Potensial	Luas	Proporsi	Tingkat Pengelolaan/Keterangan
5	N1s	Pembuatan teras sering/penataan lahan	S2	134.569	36,41%	Sedang-tinggi
6	N2	Umumnya tidak dapat dilakukan perbaikan	N2	79.689	21,56%	Umumnya tidak dapat dilakukan perbaikan
7	S3fn	Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	10.831	2,93%	Sedang-tinggi
8	S3rfn	Pengaturan drainase/penataan lahan, Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	22.084	5,98%	Sedang-tinggi
9	S3sfn	Pembuatan teras sering/penataan lahan, Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	57.622	15,59%	Sedang-tinggi
	JUMLAH			369.555	100,00%	

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 3. 20 Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Sawah Di Kabupaten Barito Timur
 Timur
 (Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 3. 21 Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Ladang Di Kabupaten Barito Timur

b) Tanaman Palawija (jagung)

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk tanaman palawija (jagung) pada masing-masing system lahan, di Kabupaten Barito Timur **Tabel 3.20** dan **Gambar 3.21** menunjukkan terdapat kelas kesesuaian lahan 76rgani sebagai berikut:

- N1r (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama media perakaran) seluas 19.141 ha (5,18%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase, dan penataan lahan dengan tingkat pengelolaan sedang sampai tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2
- N1rfn (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama media perakaran, retensi hara dan hara tersedia) 28.239 ha (7,64%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan 76rganic, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.
- N1s (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama kemiringan lereng) 134.501 ha (36,40%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.
- N2 (tidak sesuai permanen) seluas 79.689 ha (21,56%). Pada Kelas kesesuaian lahan ini umumnya tidak dapat dilakukan upaya perbaikan sehingga kelas kesesuaian lahan potensialnya juga N2.
- S2rfn (Cukup sesuai dengan factor pembatas utama media perakaran, retensi hara dan hara tersedia) seluas 1.277 ha (0,35%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan 76rganic, pemupukan dengan tingkat pengelolaan

sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.

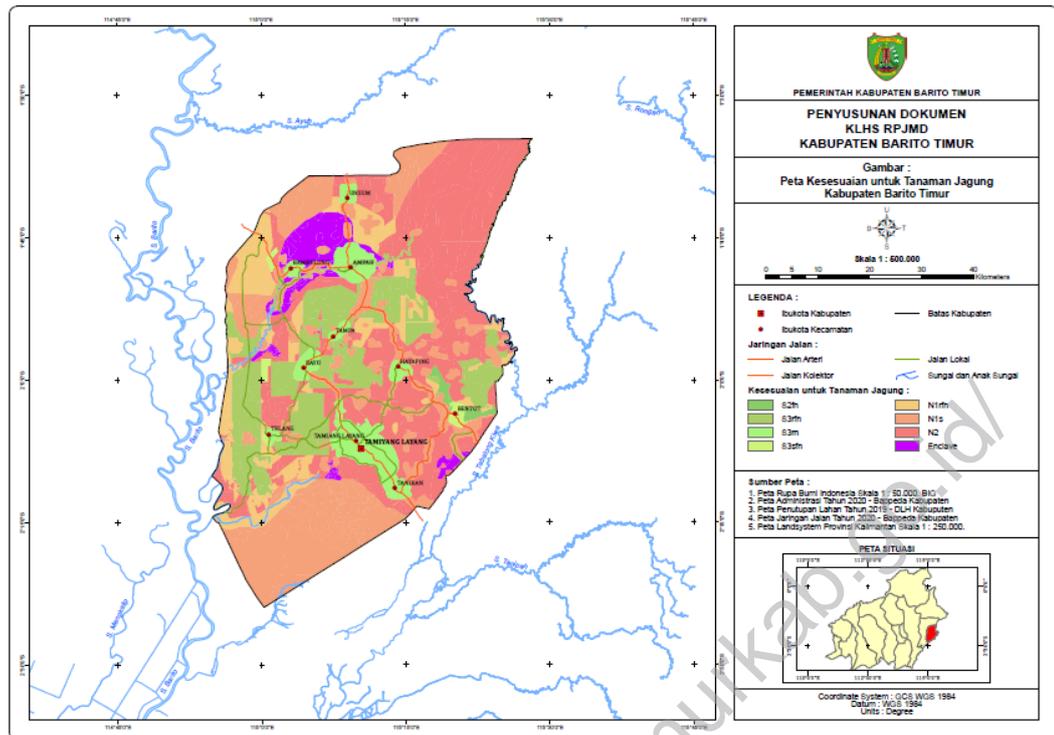
- S2fn (Cukup sesuai dengan factor pembatas utama retensi hara dan hara tersedia) seluas 3.879 ha (1,05%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan 77rganic, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3fn (Sesuai Marjinal dengan factor pembatas utama retensi hara dan hara tersedia) seluas 980 ha (0,27%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan 77rganic, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3sfn (Sesuai marjinal dengan factor pembatas utama kemiringan lereng, retensi hara dan hara tersedia) seluas 12.541 ha (3,39%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan, perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan 77rganic, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3sn (Sesuai marjinal dengan factor pembatas utama kemiringan lereng, dan hara tersedia) seluas 12.541 ha (3,39%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan, perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, dan pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.

Tabel 3. 20 Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Palawija (jagung) dan Jenis Usaha Perbaikannya

No	Kesesuaian Lahan Aktual	Jenis usaha Perbaikan	Kesesuaian Lahan Potensial	Luas	Proporsi	Tingkat Pengelolaan/Keterangan
1	Enclave			1.707	0,46%	Permukiman, Tubuh Air
2	N1r	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan	S2	19.141	5,18%	Sedang- tinggi
3	N1rfn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S2	28.239	7,64%	Sedang- tinggi
4	N1s	Pembuatan teras sering/penataan lahan	S2	134.501	36,40%	Sedang- tinggi
5	N2	Umumnya tidak dapat dilakukan perbaikan	N2	79.689	21,56%	Sedang- tinggi
6	S2fn	Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	3.879	1,05%	Rendah - sedang
7	S2rfn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	1.277	0,35%	Sedang- tinggi
8	S3fn	Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	980	0,27%	Rendah - sedang

No	Kesesuaian Lahan Aktual	Jenis usaha Perbaikan	Kesesuaian Lahan Potensial	Luas	Proporsi	Tingkat Pengelolaan/Keterangan
9	S3n	pemupukan	S1	6.293	1,70%	Rendah - sedang
10	S3rfn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	35.004	9,47%	Sedang- tinggi
11	S3rn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pemupukan	S1	1.223	0,33%	Sedang- tinggi
12	S3sfn	Pembuatan teras sering/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	12.541	3,39%	Sedang- tinggi
13	S3sn	Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	45.081	12,20%	Rendah - sedang
	Grand Total			369.555	100,00%	

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 3. 22 Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Jagung Di Kabupaten Barito Timur
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

2. Tanaman Perkebunan

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk komoditas tanaman perkebunan (sawit, kopi, dan karet) pada masing-masing system lahan, di Kabupaten Barito Timur **Tabel 3.21**, **Gambar 3.23**, **Gambar 3.24**, dan **Gambar 3.25** menunjukkan terdapat kelas kesesuaian lahan aktual sebagai berikut:

- N1rf (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama media perakaran, dan retensi hara) 21.368 ha (5,78%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, dan pengapuran atau penambahan bahan organik dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.
- N1rfn (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama media perakaran, retensi hara dan hara tersedia) 6.871 ha (1,86%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik,

pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.

- N1s (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama kemiringan lereng) 3.087 ha (8,14%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.
- N2 (tidak sesuai permanen) seluas 49.602 ha (13,42%). Pada Kelas kesesuaian lahan ini umumnya tidak dapat dilakukan upaya perbaikan sehingga kelas kesesuaian lahan potensialnya juga N2.
- S2rf (Agak sesuai dengan factor pembatas utama media perakaran, dan retensi hara) seluas 1.277 ha (0,35%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan rendah-sedang sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S2rfn (Agak Sesuai dengan factor pembatas utama media perakaran, retensi hara dan hara tersedia) 16.926 ha (4,58%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase, Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S2rn (Agak Sesuai dengan factor pembatas utama media perakaran, dan hara tersedia) 68 ha (0,02%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase, dan pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3fn (Sesuai marjinal dengan factor pembatas utama retensi hara dan hara tersedia) seluas 3.869 ha (1,05%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.

- S3f (Sesuai marginal dengan factor pembatas utama retensi hara) seluas 56.051 ha (15,17%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pengapuran atau penambahan bahan organik dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3rf (Sesuai marginal dengan factor pembatas utama media perakaran dan retensi hara) 16.926 ha (4,58%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase, Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3rfn (Sesuai marginal dengan factor pembatas utama media perakaran, retensi hara dan hara tersedia) 38.814 ha (9,24%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase, Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3rn (Sesuai marginal dengan factor pembatas utama media perakaran dan hara tersedia) 38.814 ha (9,24%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase, dan pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3sfn (Sesuai marginal dengan factor pembatas utama kemiringan lereng, retensi hara dan hara tersedia) seluas 107.919 ha (29,20%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3sn (Sesuai marginal dengan factor pembatas utama kemiringan lereng, dan hara tersedia) seluas 22.781 ha (6,16%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.

Tabel 3. 21 Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Perkebunan (sawit, kopi, dan karet) dan Jenis Usaha Perbaikannya

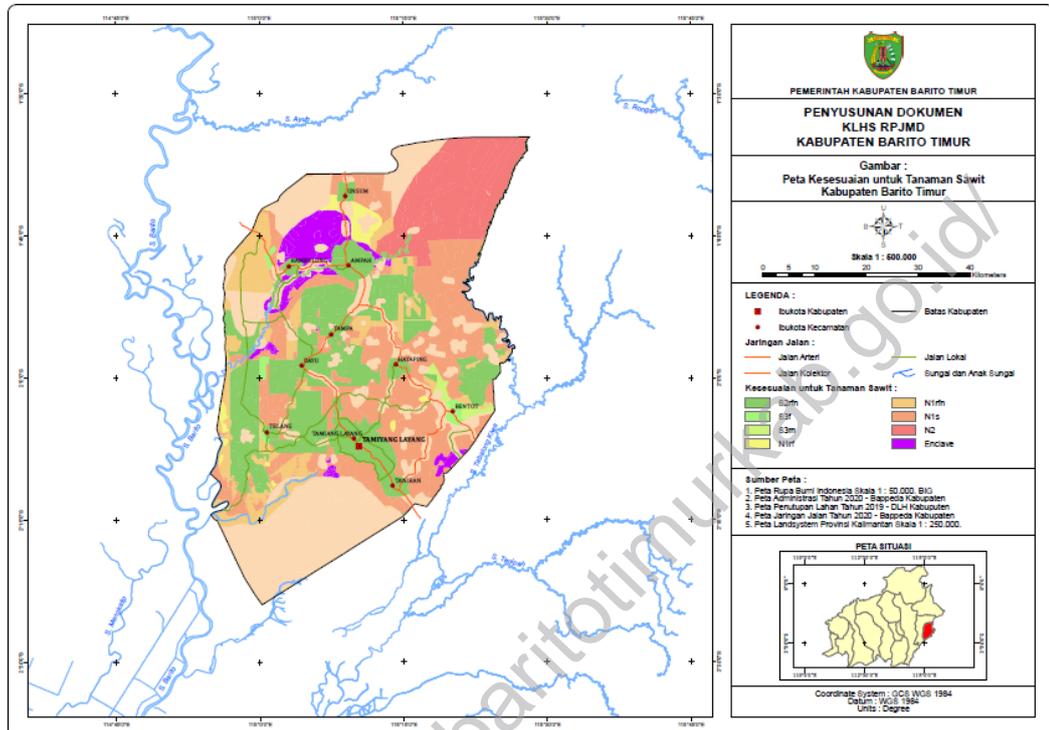
No	Kesesuaian Lahan Aktual	Jenis usaha Perbaikan	Kesesuaian Lahan Potensial	Luas	Proporsi	Tingkat Pengelolaan/Keterangan
1	Enclave			1707	0,46%	Permukiman, Tubuh Air
2	N1rf	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase, dan penataan lahan	S2	21368	5,78%	Sedang - tinggi
3	N1rfn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S2	6871	1,86%	Sedang - tinggi
4	N1s	Pembuatan teras sering/penataan lahan	S2	30087	8,14%	Sedang - tinggi
5	N2	Umumnya tidak dapat dilakukan perbaikan	N2	49602	13,42%	Sedang - tinggi
6	S2rf	Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	1277	0,35%	Rendah - sedang
7	S2rfn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	16926	4,58%	Sedang - tinggi
8	S2rn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran	S1	68	0,02%	Sedang - tinggi

No	Kesesuaian Lahan Aktual	Jenis usaha Perbaikan	Kesesuaian Lahan Potensial	Luas	Proporsi	Tingkat Pengelolaan/Keterangan
		drainase/penataan lahan, pemupukan				
9	S3f	Pengapuran atau penambahan bahan organik	S1	56051	15,17%	Sedang - tinggi
10	S3fn	Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	3869	1,05%	Rendah - sedang
11	S3rf	Perbaikan sistem drainase/penataan lahan, pemupukan	S1	11745	3,18%	Rendah - sedang
12	S3rfn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	34814	9,42%	Sedang - tinggi
13	S3rn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pemupukan	S1	4470	1,21%	Sedang - tinggi
14	S3sfn	Pembuatan teras sering/penataan lahan, Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	107919	29,20%	Sedang - tinggi
15	S3sn	Pembuatan teras sering/penataan lahan, pemupukan	S1	22781	6,16%	Sedang - tinggi
	Grand Total			369555	100,00%	

Tingkat Pengelolaan :

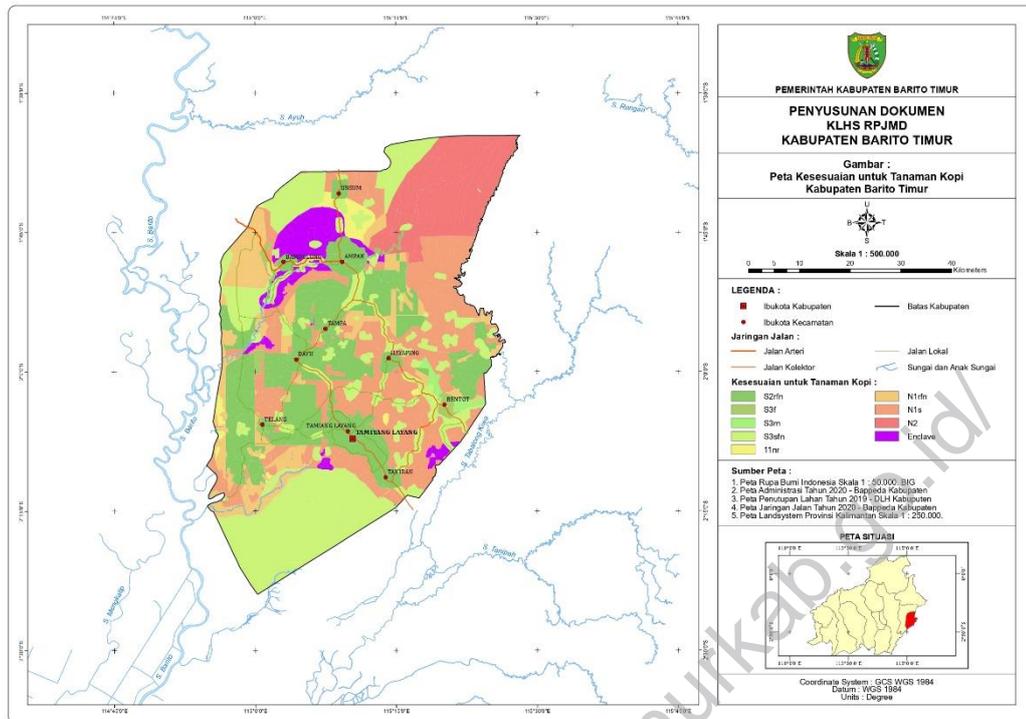
- Sedang : Pengelolaan dapat dilaksanakan pada petani tingkat menengah, memerlukan modal menengah dan teknik pertanian sedang
- Tinggi : pengelolaan hanya dapat dilaksanakan dengan modal yang relatif besar, umumnya dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan besar atau perusahaan menengah

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



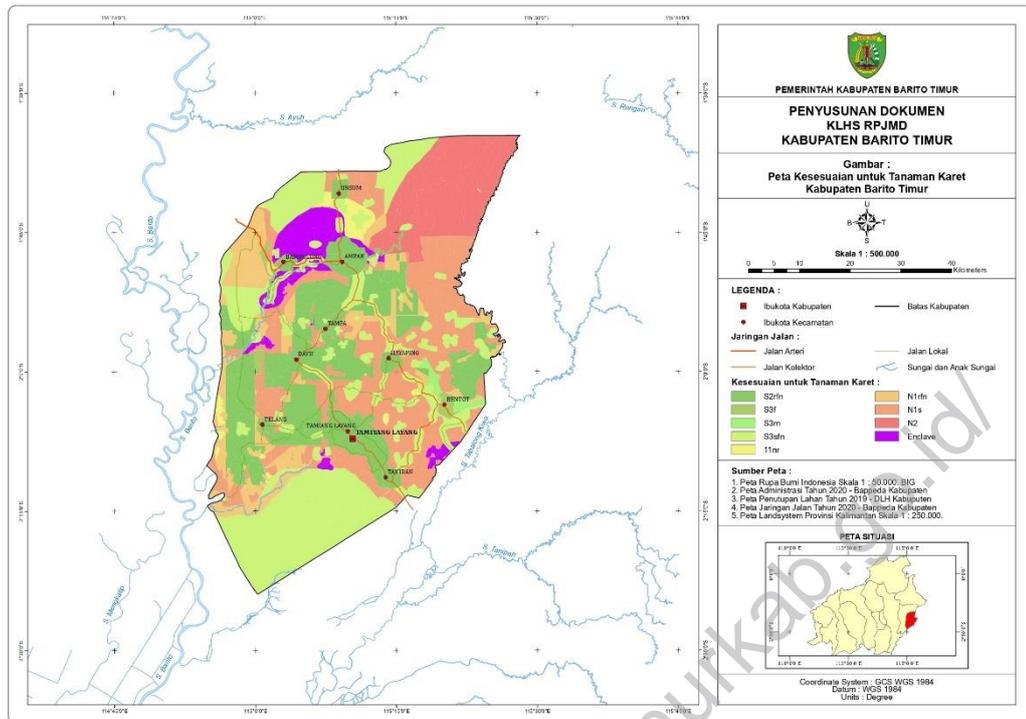
Gambar 3. 23 Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Sawit Di Kabupaten Barito Timur

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 3. 24 Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Kopi Di Kabupaten Barito Timur

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 3. 25 Peta Kesesuaian Lahan Tanaman Karet Di Kabupaten Barito Timur

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

3. Kegiatan Peternakan

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk peternakan (sapi) pada masing-masing system lahan, di Kabupaten Barito Timur **Tabel 3.22** dan **Gambar 3.26** menunjukkan terdapat kelas kesesuaian lahan aktual sebagai berikut:

- N1rf (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama media perakaran, dan retensi hara) 68 ha (0,02%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, dan pengapuran atau penambahan bahan organik dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.
- N1rfn (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama media perakaran, retensi hara dan hara tersedia) 28.171 ha (7,62%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik,

pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.

- N1s (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama kemiringan lereng) 30.087 ha (8,14%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.
- N2 (tidak sesuai permanen) seluas 49.602 ha (13,42%). Pada Kelas kesesuaian lahan ini umumnya tidak dapat dilakukan upaya perbaikan sehingga kelas kesesuaian lahan potensialnya juga N2.
- S2fn (Agak sesuai dengan factor pembatas utama retensi hara dan hara tersedia) seluas 3.869 ha (1,05%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S2rf (Agak sesuai dengan factor pembatas utama media perakaran dan retensi hara) 185 ha (0,05%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase, Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S2rfn (Cukup Sesuai dengan factor pembatas utama media perakaran, retensi hara dan hara tersedia) 7.385 ha (1,23%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3fn (Sesuai marginal dengan factor pembatas utama retensi hara dan hara tersedia) 7.385 ha (1,23%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3rfn (Sesuai marginal dengan factor pembatas utama media perakaran, retensi hara dan hara tersedia) 55.621 ha (15,05%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan

lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.

- S3sfn (Sesuai marjinal dengan factor pembatas utama kemiringan lereng, retensi hara dan hara tersedia) seluas 109.676 ha (29,68%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3sf (Sesuai marjinal dengan factor pembatas utama kemiringan lereng, dan retensi hara) seluas 17.106 ha (4,63%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3sn (Sesuai marjinal dengan factor pembatas utama kemiringan lereng, dan hara tersedia) seluas 61.540 ha (16,65%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.

Tabel 3. 22 Kelas Kesesuaian Lahan Peternakan (sapi) dan Jenis Usaha Perbaikannya

No	Kesesuaian Lahan Aktual	Jenis usaha Perbaikan	Kesesuaian Lahan Potensial	Luas	Proporsi	Tingkat Pengelolaan/Keterangan
1	Enclave			1707	0,46%	
2	N1rf	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik	S2	68	0,02%	Sedang - tinggi
3	N1rfn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran	S3	28171	7,62%	Sedang - tinggi

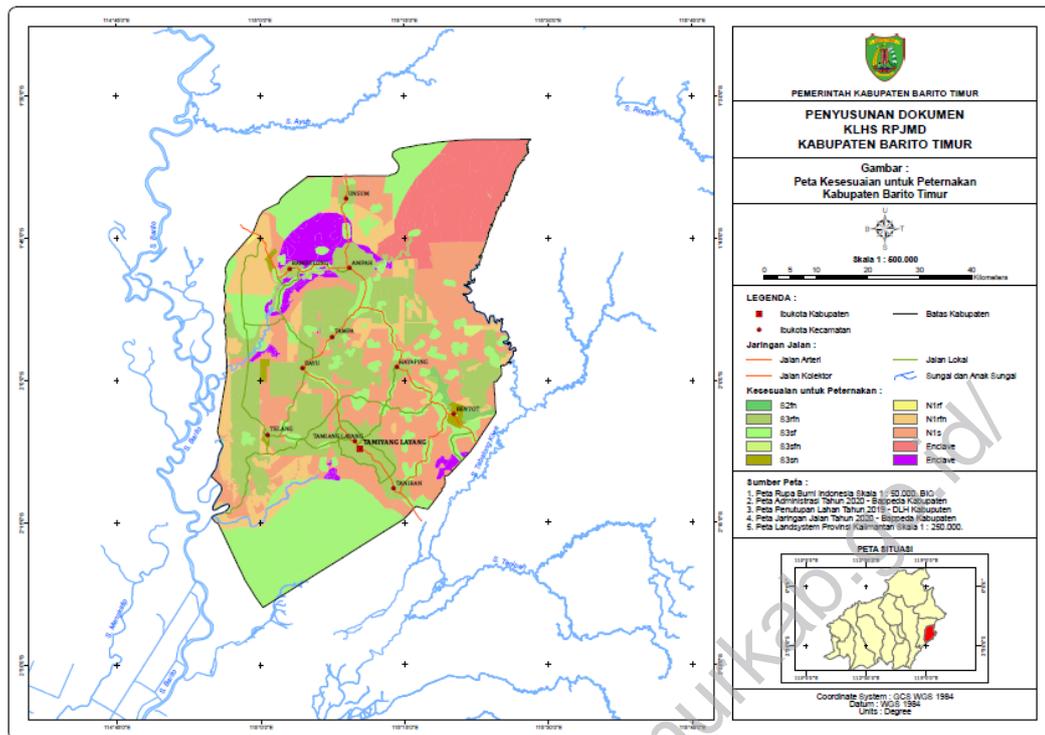
No	Kesesuaian Lahan Aktual	Jenis usaha Perbaikan	Kesesuaian Lahan Potensial	Luas	Proporsi	Tingkat Pengelolaan/Keterangan
		drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan				
4	N1s	Pembuatan teras sering/penataan lahan	S4	30087	8,14%	Sedang - tinggi
5	N2	Umumnya tidak dapat dilakukan perbaikan	N2	49602	13,42%	Umumnya tidak dapat dilakukan perbaikan
6	S2fn	Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	3879	1,05%	Rendah - sedang
7	S2rf	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik	S1	185	0,05%	Sedang - tinggi
8	S2rfn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	7385	2,00%	Sedang - tinggi
9	S3fn	Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	4528	1,23%	Rendah - sedang
10	S3rfn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan,	S1	55621	15,05%	Sedang - tinggi

No	Kesesuaian Lahan Aktual	Jenis usaha Perbaikan	Kesesuaian Lahan Potensial	Luas	Proporsi	Tingkat Pengelolaan/Keterangan
		pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan				
11	S3sf	Pembuatan teras sering/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik	S1	17106	4,63%	Sedang - tinggi
12	S3sfn	Pembuatan teras sering/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	109676	29,68%	Sedang - tinggi
13	S3sn	Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	61540	16,65%	Rendah - sedang
	Grand Total			369555	100,00%	

Tingkat Pengelolaan :

- Sedang : Pengelolaan dapat dilaksanakan pada petani tingkat menengah, memerlukan modal menengah dan teknik pertanian sedang
- Tinggi : pengelolaan hanya dapat dilaksanakan dengan modal yang relatif besar, umumnya dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan besar atau perusahaan menengah

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 3. 26 Peta Kesesuaian Lahan Peternakan (Sapi) Di Kabupaten Barito Timur

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

4. Kegiatan Perikanan (kolam air tawar)

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk perikanan (kolam air tawar) pada masing-masing system lahan, di Kabupaten Barito Timur **Tabel 3.23** dan **Gambar 3.27** menunjukkan terdapat kelas kesesuaian lahan aktual sebagai berikut:

- N1r (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama media perakaran) 31.258 ha (8,46%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, dan pengapuran atau penambahan bahan organik dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.
- N1rfn (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama media perakaran, retensi hara dan hara tersedia) 6.803 ha (1,84%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.

- N1rs (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama media perakaran dan kemiringan lereng) 30.087 ha (8,14%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan dan Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.
- N1s (Tidak sesuai sementara dengan factor pembatas utama kemiringan lereng) 147.550 ha (39,93%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S2.
- N2 (tidak sesuai permanen) seluas 49.602 ha (13,42%). Pada Kelas kesesuaian lahan ini umumnya tidak dapat dilakukan upaya perbaikan sehingga kelas kesesuaian lahan potensialnya juga N2.
- S3sfn (Sesuai marginal dengan factor pembatas utama kemiringan lereng, retensi hara dan hara tersedia) 57.622 ha (15,59%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pembuatan teras sering/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan rendah-sedang sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3rf (Sesuai marginal dengan factor pembatas utama media perakaran, retensi hara) 24.913 ha (6,74%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1.
- S3rfn (Sesuai marginal dengan factor pembatas utama media perakaran, retensi hara dan hara tersedia) 5.265 ha (1,42%). Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan dengan tingkat pengelolaan sedang – tinggi sehingga berpotensi kelas kesesuaian lahannya menjadi S1

Tabel 3. 23 Kelas Kesesuaian Lahan Perikanan (kolam air tawar) dan Jenis Usaha Perbaikannya

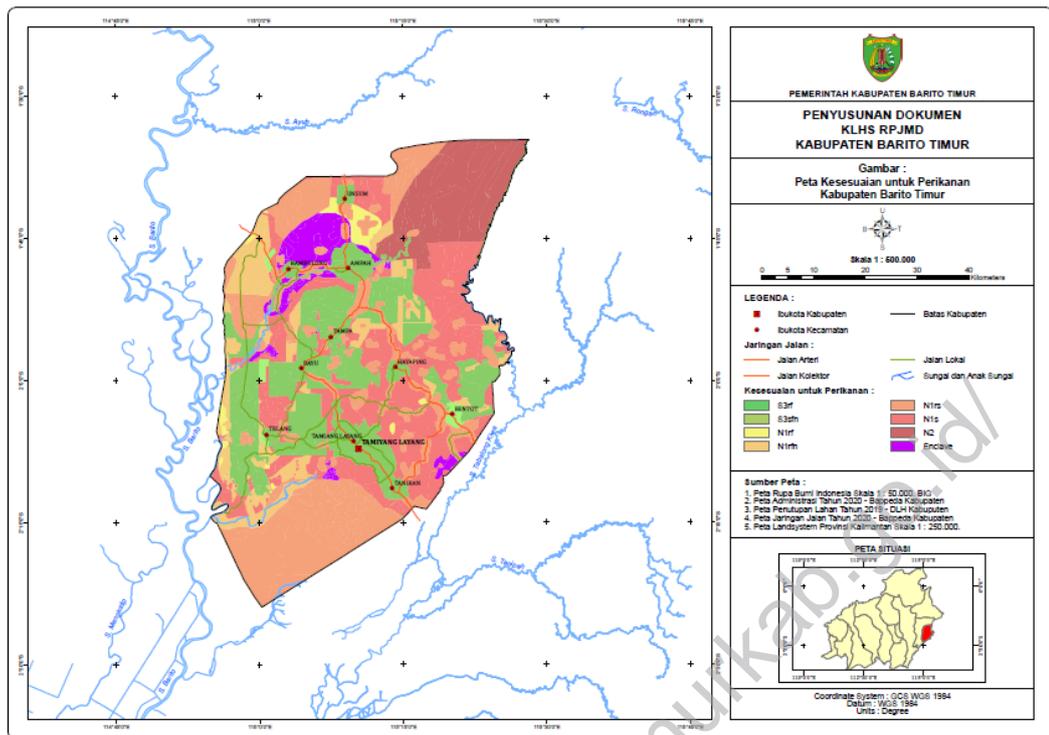
No	Kesesuaian Lahan Aktual	Jenis usaha Perbaikan	Kesesuaian Lahan Potensial	Luas	Proporsi	Tingkat Pengelolaan/Keterangan
1	Enclave			1.707	0,46%	
2	N1r	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan	S2	31.258	8,46%	Sedang - tinggi
3	N1rf	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik	S3	21.436	5,80%	Sedang - tinggi
4	N1rfn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S4	6.803	1,84%	Sedang - tinggi
5	N1rs	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan	S5	17.106	4,63%	Sedang - tinggi
6	N1s	Pembuatan teras sering/penataan lahan	S6	147.550	39,93%	Sedang - tinggi
7	N2	Umumnya tidak dapat dilakukan perbaikan	N2	49.602	13,42%	Umumnya tidak dapat dilakukan perbaikan
8	S3fn	Pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S1	6.293	1,70%	Rendah - Sedang

No	Kesesuaian Lahan Aktual	Jenis usaha Perbaikan	Kesesuaian Lahan Potensial	Luas	Proporsi	Tingkat Pengelolaan/Keterangan
9	S3rf	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik	S2	24.913	6,74%	Sedang - tinggi
10	S3rfn	Perbaikan sistem drainase seperti pembuatan saluran drainase/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S3	5.265	1,42%	Sedang - tinggi
11	S3sfn	Pembuatan teras sering/penataan lahan, pengapuran atau penambahan bahan organik, pemupukan	S4	57.622	15,59%	Sedang - tinggi
Grand Total				369.555	100,00%	

Tingkat Pengelolaan :

- Sedang : Pengelolaan dapat dilaksanakan pada petani tingkat menengah, memerlukan modal menengah dan teknik pertanian sedang
- Tinggi : pengelolaan hanya dapat dilaksanakan dengan modal yang relatif besar, umumnya dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan besar atau perusahaan menengah

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 3. 27 Peta Kesesuaian Lahan Perikanan (Kolam Air Tawar) Di Kabupaten Barito Timur
 (Sumber: Hasil Analisis, 2021)

3.4 Kondisi Aspek Daya Saing Daerah

3.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat melalui pendekatan kondisi ekonomi di Kabupaten Barito Timur melalui analisis laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian di Kabupaten Barito Timur.

3.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah. laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur terus menunjukkan tren yang positif, khususnya pada sektor pertanian dalam arti luas, bidang jasa hingga perdagangan. Dengan kekayaan alam yang ada, Kabupaten Barito Timur diyakini dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2017, sektor yang menunjukkan persentase tertinggi dalam

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 9,58 persen, sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,35 persen, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9 persen. Secara lebih rinci laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2017 berdasar lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 24 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Timur
Tahun 2013-2017

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	2,83	1,35	6,03	3,91	6,54
2	Pertambangan Dan Penggalian	8,63	5,43	1,1	3,44	4,31
3	Industri Pengolahan	5,65	8,38	9,69	9,75	7,84
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	13,46	8,94	16,89	6,38	9,58
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	3,07	5,64	9,84	8,74	4,84
6	Konstruksi	11,98	10,08	12,37	8,86	5,18
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	6,87	793	10,81	8,94	9
8	Transportasi Dan Pergudangan	7,48	8,33	8,21	9,46	7,81
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	7,14	8,87	9,57	9,08	7,98
10	Informasi Dan Komunikasi	9,7	9,54	11,96	9,83	9,35
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	8,65	7,86	10,46	10,12	7,83
12	Real Estat	4,71	4,69	4,95	4,44	8,74
13	Jasa Perusahaan	8,01	4,48	5,89	5,43	8,2
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan	2,91	2,9	8,53	6,69	6,18
15	Jasa Pendidikan	2,94	4,36	9,98	9,95	8,84
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan	4,75	4,98	10,98	8,98	7,79
17	Jasa Lainnya	3,19	5,83	8,89	7,91	8,7
PDRB		6,73	5,25	5,16	5,5	5,98

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur secara keseluruhan, pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Timur mencapai 6,73 persen. Angka ini menurun di tahun berikutnya menjadi 5,25 persen di tahun 2014. Namun perlahan angka ini meningkat hingga di tahun 2017 sebesar 5,98 persen. Jika dibandingkan dengan sektor lain, sektor yang memiliki nilai persentase yang besar adalah dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur adalah sektor pengadaan listrik dan gas, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Timur dipengaruhi oleh ke tiga sektor tersebut.

3.4.3 Struktur Perekonomian

Berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Timur, struktur perekonomian Kabupaten Barito Timur dengan kontribusi perekonomian yang tertinggi diperoleh dari Sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang 37,02% terhadap pendapatan keseluruhan di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2017, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 18,56%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 3.25**.

Tabel 3. 25 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Timur 2013-2017

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	19,97	19,74	19,81	19,03	18,56
2	Pertambangan Dan Penggalian	45,04	42,93	39,17	37,40	37,02
3	Industri Pengolahan	5,54	6,04	6,60	7,06	7,34
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,07	0,06
6	Konstruksi	5,94	6,53	7,35	7,90	7,99
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	5,33	5,87	6,49	6,83	6,95
8	Transportasi Dan Pergudangan	3,62	3,96	4,33	4,59	4,72

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	1,10	1,19	1,31	1,40	1,44
10	Informasi Dan Komunikasi	0,97	1,00	1,08	114,00	1,16
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	1,08	1,11	1,18	1,23	1,23
12	Real Estat	2,02	2,13	2,22	2,29	2,36
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan	3,49	3,52	3,77	3,92	3,94
15	Jasa Pendidikan	3,98	3,95	4,44	4,82	4,84
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan	1,29	1,37	1,53	1,64	1,66
17	Jasa Lainnya	0,49	0,51	0,57	0,58	0,61
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

3.4.4 Potensi Pengembangan Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Barito Timur merupakan komoditi utama Kabupaten Barito Timur untuk dikembangkan menjadi agribisnis. Sektor pertanian secara umum terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Sektor perkebunan Kabupaten Barito Timur sedang dikembangkan dengan komoditi utama karet dan kelapa sawit. Kabupaten Barito Timur menghasilkan beraneka tanaman perkebunan seperti kelapa, kopi, karet, kelapa sawit, dan cacao. Tanaman perkebunan yang memiliki produksi tanaman paling banyak adalah karet sebanyak 11.862,78 ton pada tahun 2017. Produksi karet di Kabupaten Barito Timur sangat terkenal di dunia industri karena kualitasnya. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB dalam lima tahun menunjukkan angka yang semakin menurun. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur yang ingin mengembangkan pertanian sebagai basis ekonomi selain sektor pertambangan. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Tabel 3.26**

Tabel 3. 26 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	19,97	19,74	19,74	19,81	18,56
2	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,83	1,35	6,03	3,91	6,54

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

3.4.5 Potensi Pengembangan Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang sedang berkembang di Kabupaten Barito Timur dan diharapkan bisa menjadi andalan ekonomi Barito Timur. Sektor industri terbagi ke dalam tiga jenis, antara lain industri kecil, industri menengah dan industri besar. Industri kecil dan industri menengah menjadi industri yang berkembang di Kabupaten Barito Timur. Sektor industri kecil merupakan sektor industri yang mempunyai banyak unit usaha dan menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan industri menengah dan besar. Unit usaha industri kecil dan menengah menunjukkan masyarakat tidak terpaku dalam harapan menjadi pegawai dan bekerja, namun membuka usaha dan memberikan lapangan kerja. Jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan nilai produksi pada masing-masing industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Tabel 3.27**

Tabel 3. 27 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	5,54	6,04	6,60	7,06	7,34
2	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	5,65	8,38	9,69	9,75	7,84

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2018

3.5 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu disajikan untuk menghasilkan gambaran kemampuan keuangan daerah serta pengelolaan keuangan dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Mengingat pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu anggaran daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Barito Timur, dijabarkan sebagai berikut:

3.5.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD merupakan gambaran dari struktur dan akurasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Secara rinci gambaran kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang disajikan secara beberapa tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur pada tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017. Pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur dalam beberapa tahun terakhir (2013-2017) selalu meningkat nilainya. Namun, peningkatan nilai pendapatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan PAD secara konsisten. Meskipun secara tren nilai PAD dari tahun 2013-2017 terbilang meningkat, namun fluktuasi masih terjadi di dalamnya. PAD pernah meningkat secara signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014 dari Rp. 15,68 miliar menjadi Rp. 60,79 miliar. Namun dari tahun 2014 ke tahun 2016 nilainya justru menurun drastis menjadi Rp. 34,09 miliar di tahun 2016. Walaupun akhirnya di tahun 2017 terjadi peningkatan nilai PAD secara drastis menjadi Rp. 85,51 miliar, namun ketidakkonsistenan PAD tersebut perlu dianalisis dan ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Jika dianalisis secara lebih rinci, ketidakstabilan peningkatan PAD tersebut sangat dipengaruhi oleh besaran hasil pajak daerah yang tidak menentu hasilnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemandirian daerah, maka pengelolaan sumber-sumber pajak daerah harus lebih ditingkatkan.

Selain PAD, sumber pendapatan daerah yang lain seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah trennya semakin meningkat tiap tahun. Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Barito timur pada tahun 2013 mencapai Rp. 546,566 miliar dan menjadi Rp. 609,128 miliar di tahun 2017. Sedangkan sumber sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah di tahun 2013 sebesar Rp. 90,009 miliar dan menjadi Rp. 105,849 miliar ditahun 2017.

Tabel 3. 28 Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	PENDAPATAN	634.427.268.692	760.360.620.234	781.059.959.000	856.991.556.255	800.494.154.102	6,43%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	15.688.848.273	60.796.731.625	37.869.997.230	34.092.360.685	85.515.924.312	40,38%
1.1.1	Pajak daerah	3.291.846.529	35.479.847.408	5.518.676.628	7.048.900.549	51.907.816.235	73,60%
1.1.2	Retribusi daerah	4.010.291.201	3.871.721.033	5.109.930.967	2.845.408.698	2.454.459.173	-9,35%
1.1.3	Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	3.026.489.291	2.611.767.641	3.644.726.070	6.470.006.257	8.638.910.497	23,34%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	5.360.221.253	18.833.395.544	23.596.663.565	17.728.045.180	22.514.738.407	33,25%
1.2.	Dana Perimbangan	546.566.450.310	609.554.690.329	625.485.350.001	690.787.003.368	609.128.868.099	2,19%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	82.720.533.310	99.464.292.329	102.062.746.001	65.154.514.565	53.023.605.621	-8,51%
1.2.2	Dana alokasi umum	424.326.347.000	464.678.658.000	468.744.476.000	482.815.506.000	477.145.707.000	2,37%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.519.570.000	45.411.740.000	54.678.128.000	90.453.091.553	25.854.788.000	-8,14%
1.2.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	52.363.891.250	53.104.767.478	0,70%
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	72.171.970.108	90.009.198.280	117.704.611.769	132.112.192.203	105.849.361.691	7,96%
1.3.1	Hibah	3.037.302.695	15.092.870.155	1.435.334.790	31.069.456.844	1.680.655.594	-11,16%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	20.091.114.065	22.595.274.367	19.427.739.175	24.145.026.359	26.567.196.097	5,75%

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	37.789.426.000	44.282.576.000	61.342.732.000	1.212.544.000	-	-57,68%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				-		
1.3.6	Pendapatan Lainnya	11.254.127.348	8.038.477.758	35.498.805.804	75.685.165.000	77.601.510.000	47,13%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018

Untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah secara lebih jelas, maka dapat dilihat melalui capaian Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) yang merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesenambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Timur dari tahun 2013-2017 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2013 mencapai rasio 2,47% dan meningkat menjadi 8,0% pada tahun 2014, namun pada dua tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga menyentuh angka 3,98%, yang kemudian pada tahun 2017 meningkat tajam mencapai angka 10,68%. Dari capaian DOFD pada lima tahun terakhir, dapat di rata-rata bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar pada angka 6,00%. Secara keseluruhan perkembangan DOFD Kabupaten Barito Timur periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 29 Derajat Otonomi Fiskal daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2013	15.688.848.273	634.427.268.692	2,47%
2014	60.796.731.625	760.360.620.234	8,00%
2015	37.869.997.230	781.059.959.000	4,85%
2016	34.092.360.685	856.991.556.255	3,98%
2017	85.515.924.312	800.494.154.102	10,68%
Rata-rata	46.792.772.425	766.666.711.656	6,00%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

Jika kita perbandingan kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap total pendapatan, maka dalam 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) kontribusi PAD hanya sebesar 6,00%, Dana Perimbangan sebesar 80,62% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 13,38%. Melihat rata-rata tersebut, peningkatan PAD harus menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam meningkatkan kemandirian daerah.

a. Pendapatan asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan data realisasi PAD dalam beberapa tahun terakhir, realisasi PAD yang mencapai target terjadi di tahun 2014 dan 2015 dimana target PAD tahun 2014 sebesar Rp. 36,23 miliar dan realisasinya mencapai Rp. 60,80 miliar, untuk target PAD tahun 2015 sebesar Rp. 34,30 miliar dan realisasinya mencapai Rp. 37,87 miliar.

Sedangkan realisasi PAD tahun 2013, 2016, dan tahun 2017 tidak mencapai target. Jika dilihat sedikit lebih rinci, sumber PAD yang realisasinya dalam kurun waktu 2013-2017 tidak pernah mencapai target ialah retribusi daerah. Untuk itu pengelolaan retribusi daerah harus lebih ditingkatkan disamping juga tetap meningkatkan pengelolaan sumber PAD lainnya khususnya pajak daerah.

Jika dilihat secara umum, pada tahun 2017 sebagian besar PAD Barito Timur berasal dari pajak daerah dimana persentasenya mencapai 60,70%, padahal tahun-tahun sebelumnya pajak daerah berada jauh di bawah Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah. Disamping itu, retribusi daerah memiliki andil yang sangat rendah jika dibandingkan yang lain yakni hanya sebesar 2,45 milyar rupiah atau sebesar 2,86% dari total PAD. Hal ini dikarenakan retribusi daerah sangat jarang mencapai target PAD sehingga perlu adanya peningkatan “kantong-kantong” yang dapat meningkatkan PAD dari retribusi daerah. Sedangkan pada PAD hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara umum mencapai target yang ditetapkan dimana pada tahun 2017 mencapai 8,64 milyar rupiah dengan proporsi sebesar 10,10% dari total PAD.

Rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2013-2017 sebesar 97,67% (**Tabel 3.30**). PAD yang mengalami kenaikan signifikan terjadi pada tahun

2014 dan 2017 yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan tahun 2014 sebesar 288% dengan realisasi sebesar 60,796 miliar dan tahun 2017 sebesar 151% dengan realisasi sebesar Rp. 85,515 miliar.

Tabel 3. 30 Realisasi PAD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	PAD	Pertumbuhan
2013	15.688.848.273	-
2014	60.796.731.625	288%
2015	37.869.997.230	-38%
2016	34.092.360.685	-10%
2017	85.515.924.312	151%
Rata-rata	46.792.772.425	97,67%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

b. Dana perimbangan

Bagian Dana Perimbangan ini adalah perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab. Dana perimbangan merupakan pendapatan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus.

Jika dilihat dari pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dari tahun 2013-2017 sebesar 3,19%. Penerimaan dari dana perimbangan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 11,52% dan tahun 2016 sebesar 10,44%. Sedangkan penurunan yang cukup drastic terjadi di tahun 2017 dimana dana perimbangan turun sebesar 11,82%. Realisasi pendapatan sumber Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017 disajikan pada **Tabel 3.31** berikut ini:

Tabel 3. 31 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Dana Perimbangan	Pertumbuhan
2013	546.566.450.310	-
2014	609.554.690.329	11,52%
2015	625.485.350.001	2,61%
2016	690.787.003.368	10,44%
2017	609.128.868.099	-11,82%
Rata-rata	616.304.472.421	3,19%

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 (diolah)

c. Lain-lain pendapatan yang sah

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan.

Rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2013-2017 sebesar 11,96%. Pertumbuhan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2014 sebesar 24,71% dan tahun 2015 sebesar 30,77%. Sedangkan pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2017 sebesar -19,88%. Artinya, terdapat penurunan capaian realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah di tahun 2017 sebesar 19,88% dibandingkan realisasi 2016.

Perkembangan realisasi dan pertumbuhan pendapatan daerah dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 32 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Pertumbuhan
2013	72.171.970.108	-
2014	90.009.198.280	24,71%
2015	117.704.611.769	30,77%
2016	132.112.192.203	12,24%
2017	105.849.361.691	-19,88%
Rata-rata	103.569.466.810	11,96%

2. Belanja Daerah

Kinerja Pelaksanaan APBD juga dapat dilihat sisi realisasi belanja pemerintah daerah, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) atau belanja program dan kegiatan. Dalam beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017, realisasi belanja baik berupa BL maupun BTL besarnya selalu di bawah dari target pagu anggaran yang telah direncanakan.

Jika dilihat pertumbuhannya, rata-rata pertumbuhan belanja daerah dari tahun 2013-2017 sebesar 6,94% atau rata-rata nominal belanja sebesar Rp. 757,83 miliar. Pertumbuhan belanja yang paling signifikan terjadi di tahun 2015 dari Rp. 666,28 miliar di tahun 2014 menjadi Rp. 801,88 miliar di tahun 2016. Pertumbuhan yang negatif terjadi di tahun 2017, dimana besaran belanja daerah di tahun 2016 sebesar Rp. 861,361 miliar menjadi Rp. 822,232 miliar di tahun 2017.

Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,98%. Belanja Tidak Langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,84%, pertumbuhan yang cukup signifikan terdapat pada komponen Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik yaitu sebesar 56,37%.

Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan realisasi sebesar 1,14%, diantaranya belanja pegawai sebesar 0,7%, belanja barang dan jasa sebesar 38,39%, namun komponen belanja barang dan jasa dan belanja modal mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan sebesar 4,335 dan 1,62%.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

Tabel 3. 33 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

No.	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
2	BELANJA	637.431.025.410	666.286.842.292	801.880.185.942	861.362.730.834	822.232.855.195	6,94
2.1	Belanja Tidak Langsung	321.122.337.682	343.246.937.046	417.528.181.926	474.752.029.380	501.798.950.134	11,98
2.1.1	Belanja Pegawai	257.638.189.146	287.250.383.585	321.654.416.656	317.970.242.373	321.263.724.956	5,84
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	25.479.075.000	18.611.564.200	17.495.050.000	33.193.787.499	33.783.317.000	14,64
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.741.617.500	2.741.990.000	244.600.000	268.660.000	225.000.000	-39,21
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	2.234.650.000	6.755.521.797	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	26.814.267.280	34.192.999.261	77.684.115.270	120.634.689.508	139.321.386.381	56,37
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.999.188.756	-	-	-	-	
2.2	Belanja Langsung	316.308.687.727	323.039.905.245	384.352.004.016	386.610.701.454	320.433.905.061	1,14
2.2.1	Belanja Pegawai	33.876.701.125	40.894.204.674	41.656.779.500	104.563.893.874	83.613.561.121	38,39
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.547.061.530	143.026.343.351	181.968.845.174	136.197.474.791	113.069.750.187	-4,33
2.2.3	Belanja Modal	135.884.925.072	139.119.357.221	160.726.379.343	145.849.332.789	123.750.593.752	-1,62

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2013-2017

3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada tahun 2013-2017 diperoleh gambaran bahwa Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 2346,7%. Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata penurunan sebesar 26,5%. Komponen Pengeluaran Pembiayaan yang penurunannya signifikan dari pernyataan modal dengan rata-rata penurunan sebesar -37,7%.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

Tabel 3. 34 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2013-2017

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
3	PEMBIAYAAN						-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	94.895.850.463	46.207.090.092	8.576.313.788	-
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)			94.895.850.463	46.207.090.092	8.576.313.788	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan						-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan						-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah						-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman						-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah						-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan						-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah						-
3.2.3	Pembayaran pokok utang						-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah						-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	94.895.850.463	46.207.090.092	8.576.313.788	-

Sumber: Laporan Realiasi Anggaran 2014-2017

3.5.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu *entitas* pelaporan mengenai asset, utang, dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Barito Timur serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembanguna daerah. Selanjutnya terdapat analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*.

1. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan social bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) asset lancar, (ii) investasi jangka Panjang, (iii) asset tetap, (iv) dan cadangan, dan (v) asset lainnya. Jumlah aset dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan. Tercatat nilai aset Kabupaten Barito Timur pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,155 triliun, menjadi Rp. 1,232 triliun pada tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp. 1,341 triliun pada tahun 2017.

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar Kabupaten Barito Timur mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2017. Nilai aset lancar pada tahun 2015 sebesar Rp. 115,03 miliar, menurun menjadi Rp. 65,688 miliar pada tahun 2016 dan menurun kembali menjadi Rp. 31,908 miliar pada tahun 2017.

Investasi jangka Panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka Panjang untuk Kabupaten Barito Timur pada tahun 2015 sebesar Rp. 35,136 miliar dan meningkat menjadi Rp. 41,515 miliar pada tahun 2017. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah.

2. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi menjadi dua yaitu kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2015 ke 2017 dimana nilai kewajiban pada tahun 2015 sebesar Rp. 782 juta menjadi Rp. 23,017 miliar pada tahun 2017. Nilai kewajiban pada tahun 2015 dan 2016 seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek dan pada 2017 lebih dari 99% juga merupakan kewajiban jangka pendek yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus kondisi keuangan suatu daerah. Nilai ekuitas dana Kabupaten Barito Timur meningkat dimana pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,155 triliun menjadi Rp. 1,341 triliun pada tahun 2017. Itu menunjukkan bahwa sumberdaya keuangan daerah Kabupaten Barito Timur juga semakin baik.

Tabel 3. 35 Rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2015-2017

No	Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.1	ASET				
5.3.1.1	ASET LANCAR				
5.3.1.1.1	Kas				
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas daerah	93.638.802.154,64	41.227.250.874,91	4.279.633.226,69	-73
5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	360.277.794,00	0,00	0,00	
5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	445.609.320,20	91.166,20	123.869,20	-32
5.3.1.1.1.4	Kas di BLUD	0,00	3.010.098.385,40	4.055.300.812,40	17
5.3.1.1.1.5	Kas Lainnya	464.305.529,20	1.981.189.809,50	251.971.571,01	120
5.3.1.1.2	Piutang Pendapatan	16.973.567.570,01	14.803.916.935,41	13.523.964.574,22	-11
5.3.1.1.3	Piutang Lainnya	1.225.117.614,00	1.583.317.228,00	4.016.749.988,54	91
5.3.1.1.4	Penyisihan Piutang	(4.887.642.977,00)	(4.130.661.852,80)	(4.249.893.049,47)	-6
5.3.1.1.5	Beban Dibayar Dimuka	35.812.886,85	41.112.958,25	74.270.375,00	48
5.3.1.1.6	Persediaan	6.775.756.053,90	7.172.373.601,17	9.956.148.255,49	22
	JUMLAH ASET LANCAR	115.031.605.945,80	65.688.689.106,04	31.908.269.623,08	-47
5.3.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG				
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	
	Dana Bergilir	0,00	0,00	0,00	
	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	
	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	

No	Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Permanen				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	35.136.208.304,00	41.619.910.595,00	41.515.576.352,00	9
	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	35.136.208.304,00	41.619.910.595,00	41.515.576.352,00	9
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	35.136.208.304,00	41.619.910.595,00	41.515.576.352,00	9
5.3.1.3	ASET TETAP				
5.3.1.3.1	Tanah	215.298.530.835,00	230.063.141.260,00	230.205.139.160,00	3
5.3.1.3.2	Peralatan dan mesin	193.066.372.023,91	215.924.473.981,30	218.177.290.618,20	6
5.3.1.3.3	Gedung dan bangunan	420.561.031.163,11	443.724.134.267,12	419.472.369.821,92	0
5.3.1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	474.800.133.472,69	565.935.224.147,69	630.345.055.525,69	15
5.3.1.3.5	Aset tetap lainnya	11.708.211.648,00	13.899.614.674,57	16.407.558.545,01	18
5.3.1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	5.821.696.223,00	5.027.895.028,00	3.507.455.728,00	-22
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(327.714.188.370,90)	(361.406.306.465,90)	(366.787.267.647,07)	6
	JUMLAH ASET TETAP	993.541.786.994,81	1.113.168.176.892,77	1.151.327.601.751,75	8
	DANA CADANGAN				
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.4	ASET LAINNYA				
5.3.1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	2.877.556.175,67	2.879.135.876,64	2.491.750.224,10	-7
5.3.1.4.2	Aset Tidak Berwujud	629.489.600,01	812.252.866,67	646.761.766,67	4
5.3.1.4.3	Aset Lain-lain	8.016.549.607,00	8.320.184.959,84	113.779.833.293,28	636
	JUMLAH ASET LAINNYA	11.523.595.382,68	12.011.573.703,15	116.918.345.284,05	439

No	Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	JUMLAH ASET	1.155.233.196.627, 29	1.232.488.350.296, 95	1.341.669.793.010, 88	8
5.3.2	KEWAJIBAN				
5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	13.144.335,00	11.540.144,00	10.591.822,00	-10
	Utang Bunga				
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
5.3.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	62.084.561,33	86.955.350,00	281.341.812,50	132
5.3.2.1.3	Utang Beban	558.210.169,00	1.258.536.890,70	2.026.651.163,00	93
5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	148.830.036,84	148.830.036,84	20.550.515.506,00	6854
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	782.269.102,17	1.505.862.421,54	22.869.100.303,50	756
5.3.2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
	Utang Dalam Negeri	0	0		
5.3.2.2.1	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	148.830.036,84	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	148.830.036,84	
	JUMLAH KEWAJIBAN	782.269.102,17	1.505.862.421,54	23.017.930.340,34	761
5.3.3	EKUITAS	1.154.450.927.525,1 2	1.230.982.487.875,4 1	1.318.651.862.670,5 4	7
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.155.233.196.627, 29	1.232.488.350.296, 95	1.341.669.793.010, 88	8

Sumber: LKPJ Kabupaten Barito Tmiur TA. 2015-2017

Berdasarkan dari neraca Kabupaten Barito Timur tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, maka dapat dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Berdasarkan **Tabel 3.36** hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio *likuiditas* dan *solvabilitas* yang positif.

Tabel 3. 36 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2017

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	147,04	43,62	1,39
2	Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	138,38	38,85	0,95
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0,00067715	0,00122	0,01716
4	Rasio hutang terhadap modal	0,00067761	0,00122	0,01746

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

a. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemamuan dalam memenuhi kewajiban angka pendek dan merupakan suatu indicator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Barito Timur yaitu:

1) Rasio lancar

Rasio lancar menghitung sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar pada tahun 2013 adalah sebesar 147,0 dan tahun 2017 sebesar 4,5. Hal ini menunjukkan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 kemampuan membayar hutang pemerintah Kabupaten Barito Timur sebesar empat kali lebih.

2) Rasio cepat

Rasio cepat digunakan menghitung kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penghitungan *quick ratio* dengan mengurangkan aktivas lancar dengan persediaan, hal ini dikarenakan

persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi *likuiditas*. *Quick ratio* pada tahun 2013 sebesar 138,3 serta periode tahun 2017 *quick ratio* sebesar 3,68 hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

b. Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan Analisa kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jasi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1) Rasio total hutang terhadap total asset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2013 sebesar 0,00067 dan pada tahun 2017 sebesar 0,0101 hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2) Rasio hutang terhadap modal

Rasio hutang terhadap modal merupakan perhitungan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimilikinya, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2013 rasio hutang terhadap modal pemerintah Kabupaten barito Timur sebesar 0,00067 serta periode tahun 2017 sebesar 0,00102. Berdasarkan Analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Barito Timur, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

BAB IV

ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1. Kondisi Umum Capaian Target TPB

Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 *goals* dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jumlah Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya 319 indikator dan pembagian Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi:

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222

Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator (2), kondisi geografis (3) dan ketentuan indikator RPJMD (4). Kabupaten Barito Timur telah mulai melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
3. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

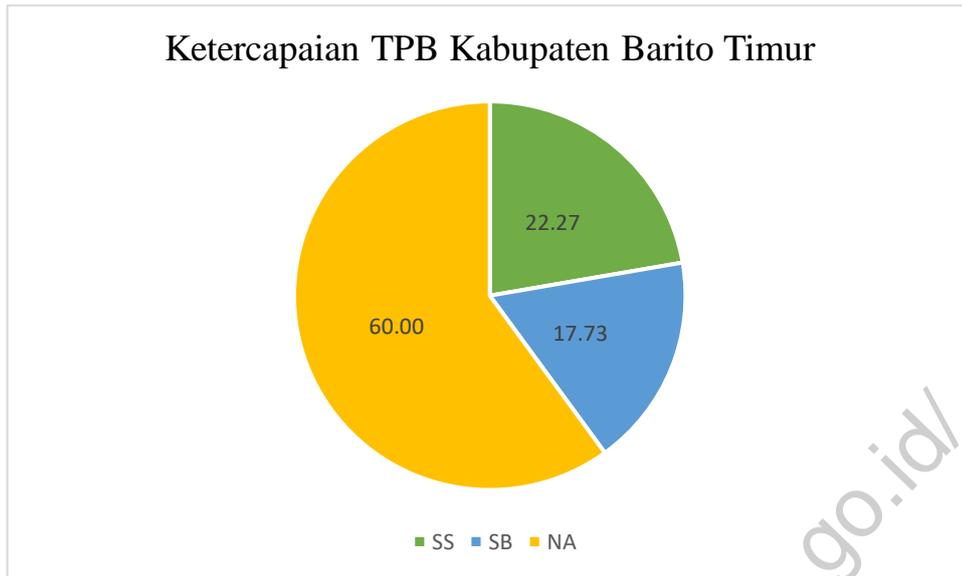
Secara umum terdapat sekitar 40% dari 220 indikator TPB yang relevan untuk Kabupaten Barito Timur yang telah diisi. Sementara 60% sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data. Dari banyak Indikator TPB yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten telah dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Timur yaitu 49 indikator atau sekitar 22,27% telah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 39 indikator atau sekitar

17,73% sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, dan 132 indikator atau 60% belum ada datanya.

Tabel 4. 1 Ketercapaian Indikator Kabupaten Barito Timur terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No.	Status	Jumlah Indikator	Persentase
1	Telah dilaksanakan dan mencapai target (SS)	49	22,27%
2	Telah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)	39	17,73%
3	Belum dilaksanakan dan tidak memiliki data (NA)	132	60%
Jumlah		220	100%

Grafik di bawah ini (**Gambar 4.1**) menunjukkan komposisi ketercapaian target TPB, dimana persentase indikator TPB yang tidak memiliki data mencapai 63,30%. Indikator-indikator tersebut perlu dijadikan perhatian sebagai upaya untuk mengukur dan mendokumentasikan data capaian dengan lebih akurat.



Gambar 4. 1 Ketercapaian Indikator Kabupaten Barito Timur terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

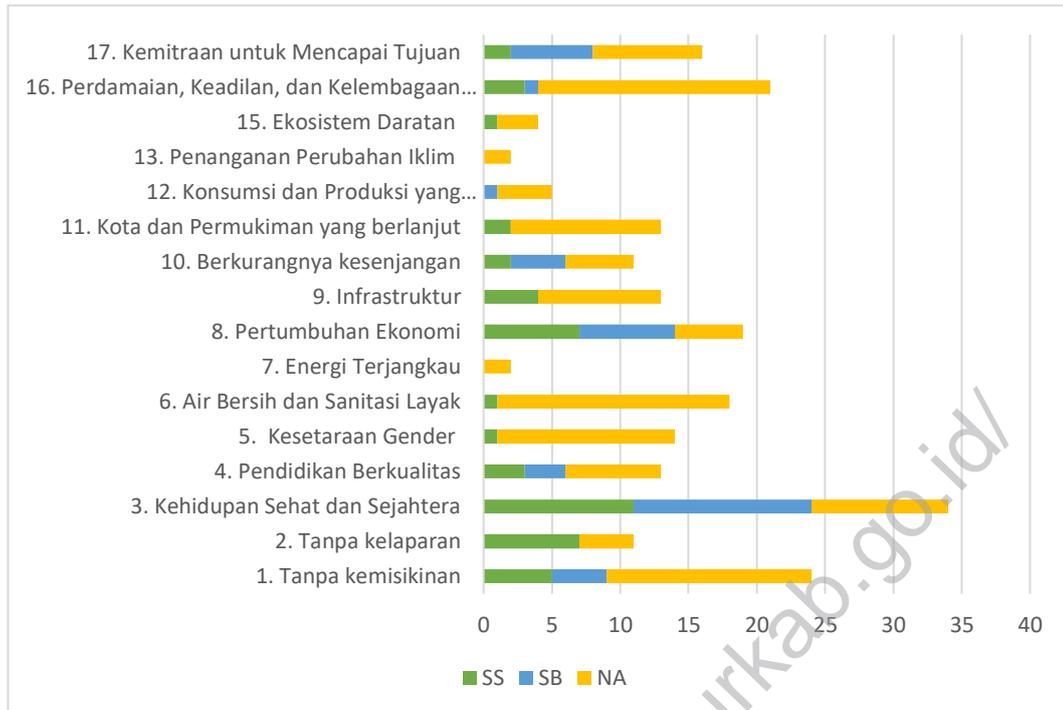
Secara lebih rinci, total indikator dari masing – masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Analisis Ketercapaian Indikator TPB

TPB	SS	SB	NA	Ketercapaian	Total Indikator
1. Tanpa kemiskinan	5	4	15	20,83	24
2. Tanpa kelaparan	7	0	4	63,64	11
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	11	13	10	32,35	34
4. Pendidikan Berkualitas	3	3	7	23,08	13
5. Kesenjangan Gender	1	0	13	7,14	14
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	0	17	5,56	18
7. Energi Terjangkau	0	0	2	0,00	2
8. Pertumbuhan Ekonomi	7	7	5	36,84	19
9. Infrastruktur	4	0	9	30,77	13
10. Berkurangnya kesenjangan	2	4	5	18,18	11
11. Kota dan Permukiman yang berlanjut	2	0	11	15,38	13
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	0	1	4	0,00	5

TPB	SS	SB	NA	Ketercapaian	Total Indikator
13. Penanganan Perubahan Iklim	0	0	2	0,00	2
15. Ekosistem Daratan	1	0	3	25,00	4
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	3	1	17	14,29	21
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	2	6	8	12,50	16
Total	49	39	132	22,27	220

Ketercapaian indikator TPB yang relevan untuk Kabupaten Barito Timur yang sudah mencapai 30% terdiri dari TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Sedangkan untuk indikator TPB lainnya secara keseluruhan masih dibawah 30%, total ketercapaian secara keseluruhan semua indikator TPB adalah 22,27%. Indikator TPB Kabupaten Barito Timur yang telah mencapai target nasional paling banyak adalah tujuan TPB 02 (Tanpa Kelaparan) dengan jumlah 7 indikator dari 11 indikator. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbesar dan masih belum diketahui gapnya dengan jumlah terbanyak terdapat pada TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kokoh) dengan jumlah 17 indikator dari 21 indikator. Indikator TPB yang memiliki kriteria tidak adanya data (N/A) terbanyak, yakni TPB 06 dan TPB 16 dengan jumlah 17 indikator. Total pencapaian indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB beserta dengan rincian masing-masing kelompok capaian disajikan pada **Gambar 4.2**.



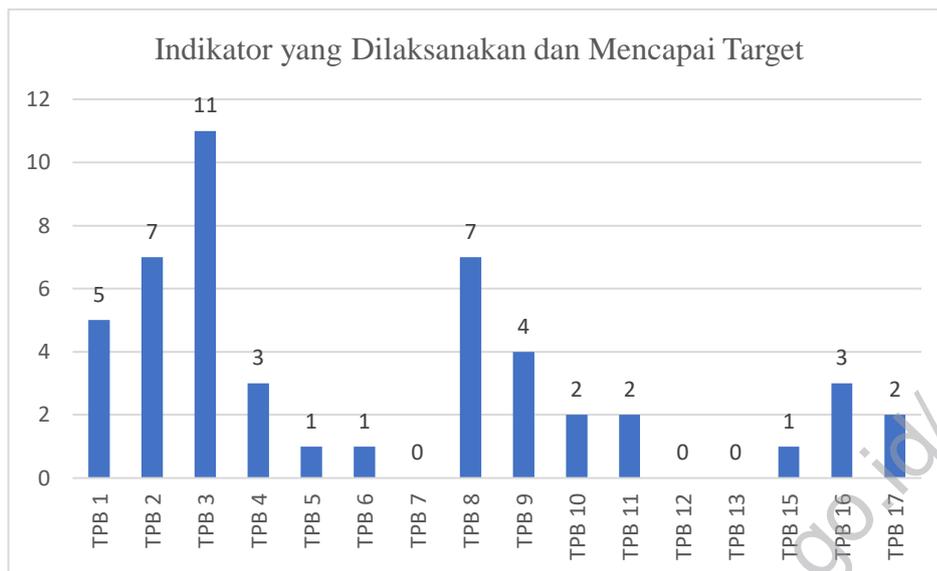
Gambar 4. 2 Capaian TPB Setiap Tujuan Kabupaten Barito Timur

Sumber: Hasil analisis, 2021

Selanjutnya uraian masing-masing ketercapaian indikator TPB berdasarkan kategori capaiannya secara lebih rinci dijelaskan pada sub-bab dibawah ini.

4.2 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori sudah mencapai target nasional sebanyak 49 indikator atau 22,27% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan pemerintah kabupaten. Berikut grafik indikator capaian masing-masing tujuan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target.

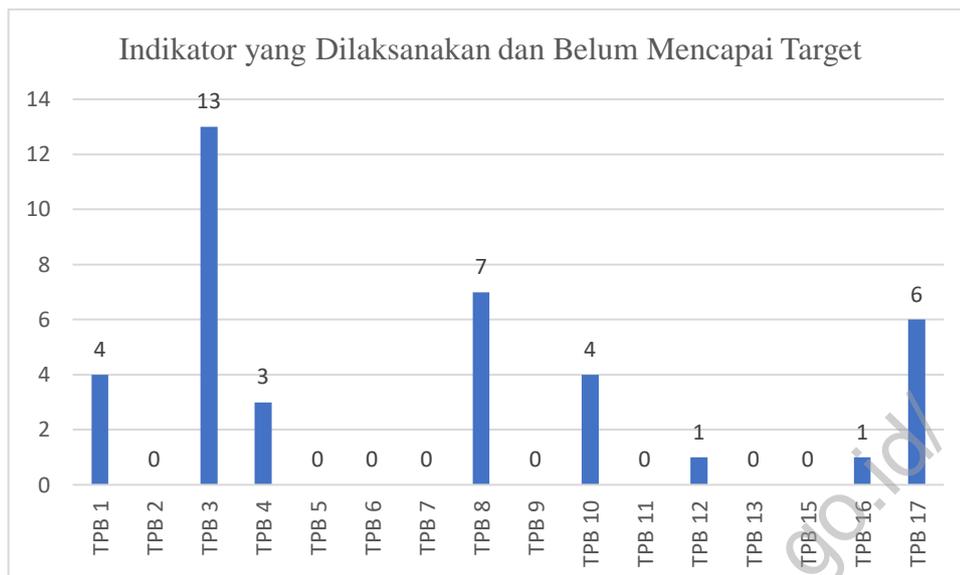


Gambar 4.3 Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai (SS)

Sumber: Hasil analisis, 2021

4.3 Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori belum mencapai target sebanyak 39 indikator atau 17,73% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian TPB kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) Kabupaten Barito Timur dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

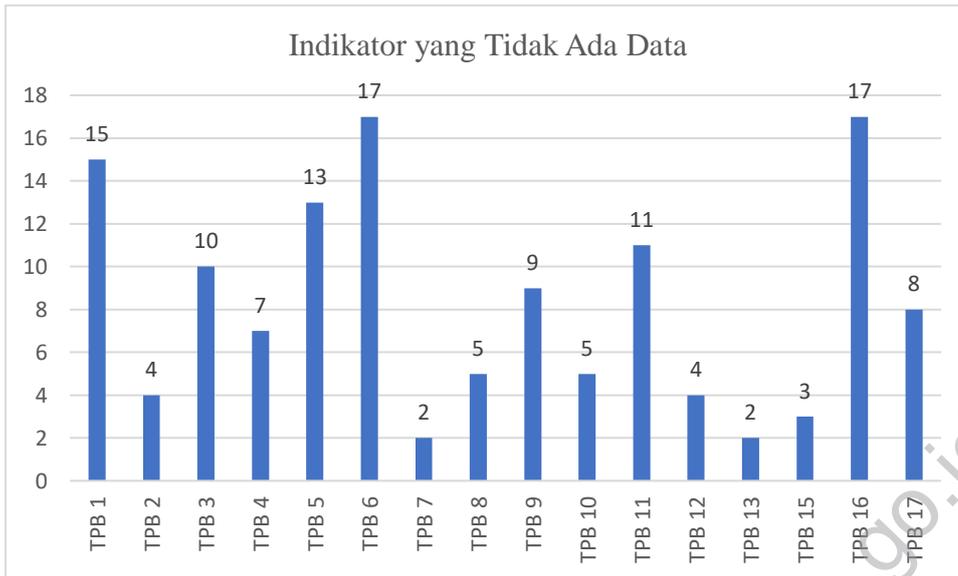


Gambar 4. 4 Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)

Sumber: Hasil analisis, 2021

4.4 Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA)

Indikator ini tidak ada data yang dapat mendukung penjelasan capaiannya. Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori belum ada data sebanyak 132 indikator atau 60 % dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan pemerintah Kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai target TPB yang belum ada data (NA) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.5 Capaian TPB Kategori Tidak Ada Data (NA)

Sumber: Hasil analisis, 2021

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Barito Timur terhadap target nasional, TPB 03 adalah tujuan dengan indikator yang di analisis terbanyak. Untuk tujuan 14 yaitu konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim tidak relevan dengan kondisi geografis Kabupaten Barito Timur.

BAB V

ANALISIS CAPAIAN TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

5.1 Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan hasil analisis setiap indikator TPB di Kabupaten Barito Timur dengan total 218 indikator yang terbagi atas 3 kategori, dimana:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target/SS;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB;
3. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA.

Capaian indikator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pilar pembangunan memiliki tingkat pencapaian yang berbeda di setiap pilar pembangunan berkelanjutan.

5.1.1 Capaian Indikator TPB Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, adalah Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, Tujuan 5. Total jumlah indikator pada pilar sosial adalah 96 indikator, dengan indikator tercapai sebanyak 28 indikator. Berikut merupakan capaian TPB dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

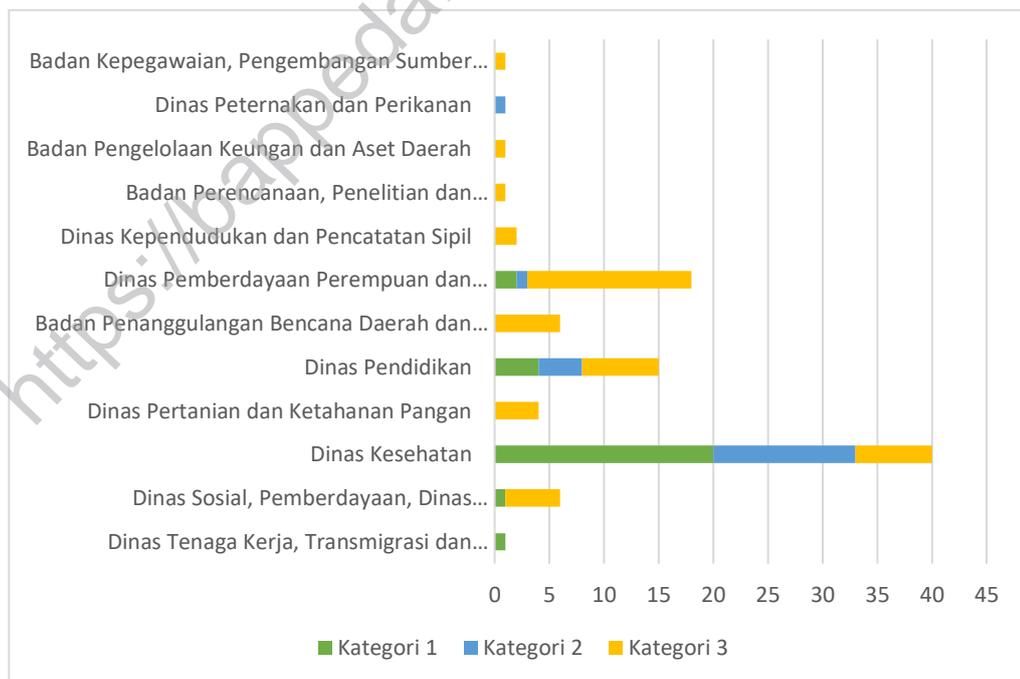
Tabel 5. 1 Capaian Indikator TPB Pilar Sosial Setiap OPD

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	1	0	0
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur	1	0	5
3	Dinas Kesehatan	20	13	7
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	4
5	Dinas Pendidikan	4	4	7
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	0	0	6

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	1	15
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	2
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan	0	0	1
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	1
11	Dinas Peternakan dan Perikanan	0	1	0
12	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	1

Sumber: Hasil analisis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 12 OPD yang memiliki wewenang pada pilar sosial. Dinas Kesehatan merupakan OPD yang telah menyelesaikan indikator terbanyak, yaitu 20 indikator. Total indikator yang telah diselesaikan dalam pilar sosial ini sebanyak 28 indikator, yang belum diselesaikan sebanyak 19 indikator dan indikator TPB yang belum memiliki data dalam pilar sosial sebanyak 49 indikator.



Gambar 5.1 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Sosial

5.1.2 Capaian Indikator TPB Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan

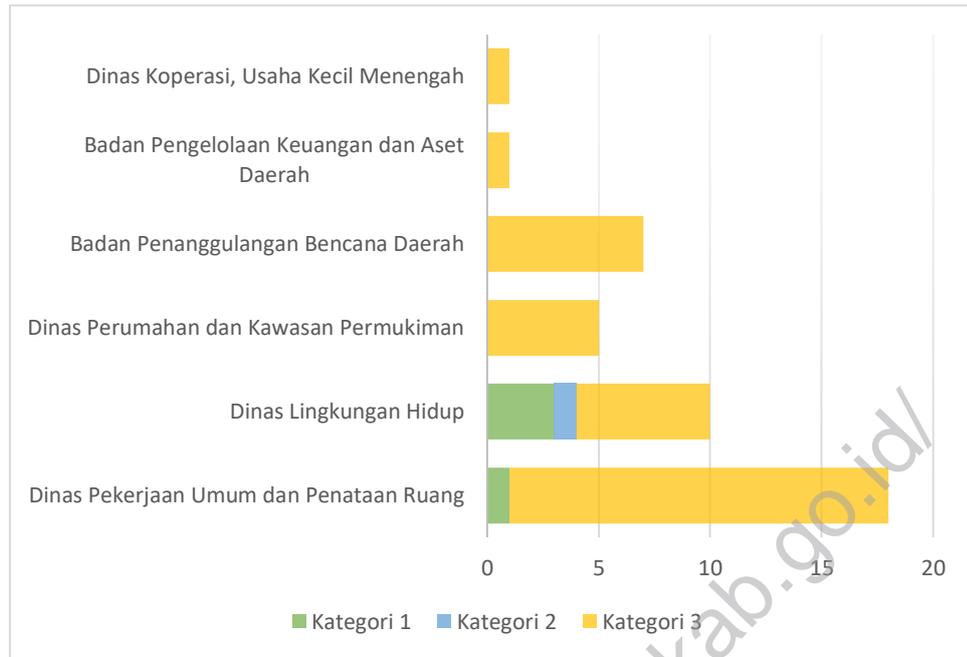
Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan antara lain Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14, dan Tujuan 15. Total jumlah indikator pilar lingkungan adalah 42 indikator. Berikut merupakan capaian indikator TPB oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Tabel 5. 2 Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan Setiap OPD

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	0	17
2	Dinas Lingkungan Hidup	3	1	6
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	5
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	7
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	1
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	0	0	1

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 OPD yang berwenang atas pilar lingkungan dengan 6 tujuan. Dimana indikator yang telah diselesaikan sebanyak 4 indikator dari total indikator pilar lingkungan. Indikator yang belum diselesaikan sebanyak 1 indikator dan indikator yang tidak memiliki data pada pilar lingkungan sebanyak 37 indikator dari indikator keseluruhan.



Gambar 5. 2 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Lingkungan

5.1.3 Capaian Indikator TPB Organisasi Perangkat Daerah Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup 5 tujuan pada pembangunan berkelanjutan antara lain tujuan 7, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10, dan tujuan 17. Total jumlah indikator pada pilar ekonomi adalah 61 indikator. Berikut merupakan capaian indikator TPB oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah Terkait).

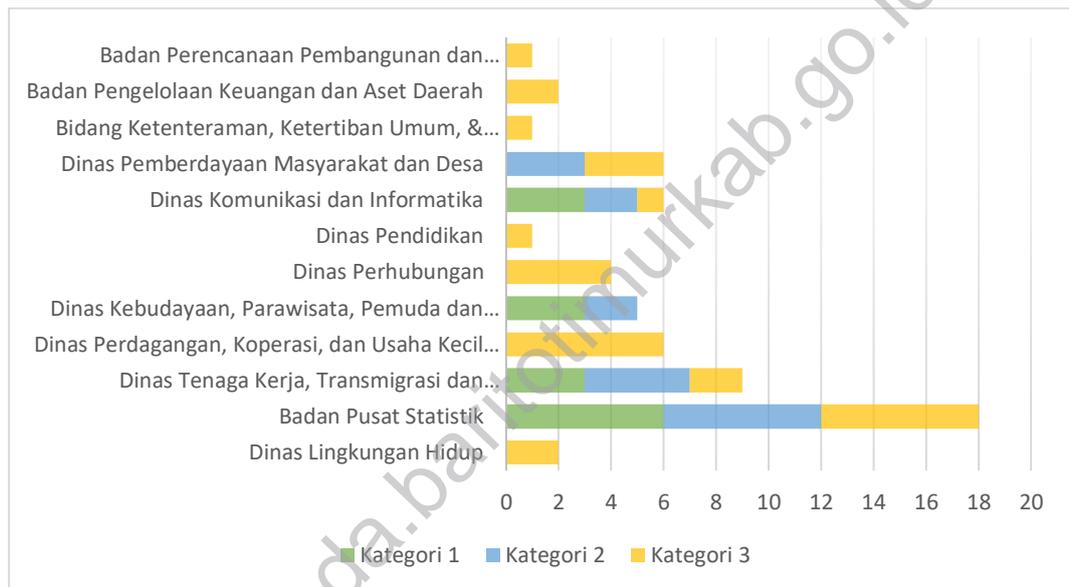
Tabel 5. 3 Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi Setiap OPD

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	2
2	Badan Pusat Statistik	6	6	6
3	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	3	4	2
4	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	0	0	6
5	Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur	3	2	0
7	Dinas Perhubungan	0	0	4
8	Dinas Pendidikan	0	0	1
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	2	1
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	3	3
11	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	1

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	2
13	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0	0	1

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, OPD terkait yang berwenang atas pilar ekonomi terdiri dari 13 OPD. Masing-masing OPD memiliki wewenang terhadap indikator TPB dimana, total indikator yang telah diselesaikan adalah 15 indikator, sedangkan indikator TPB yang belum diselesaikan adalah 17 indikator, dan indikator yang belum memiliki data adalah 29 indikator.



Gambar 5.3 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Ekonomi

5.1.4 Capaian Indikator TPB Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pilar Hukum

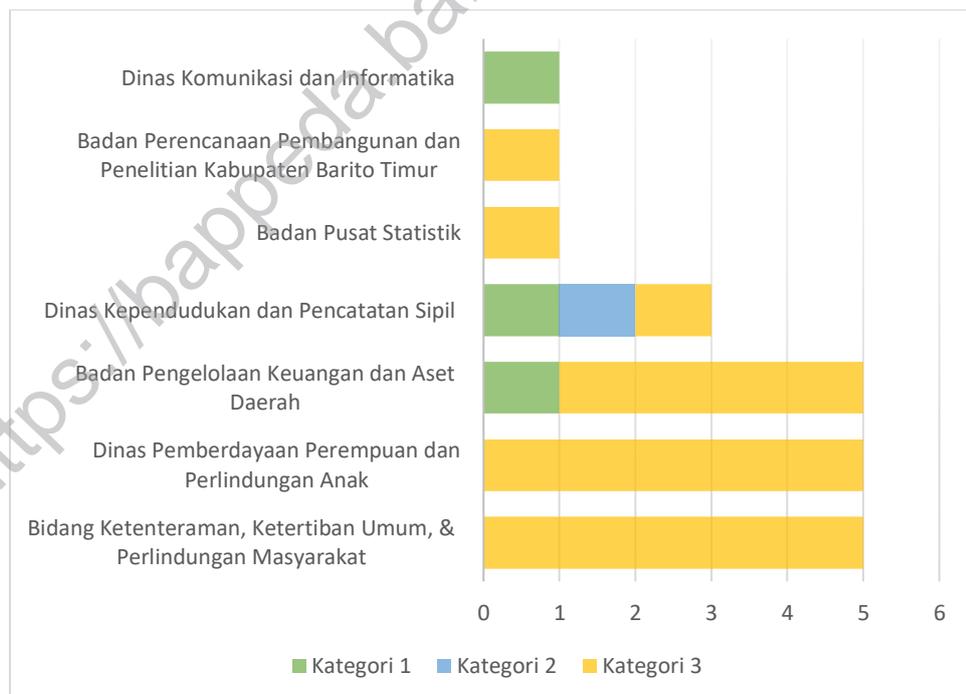
Pilar Hukum hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan ke 16 dengan total indikator 21 indikator. Berikut merupakan capaian indikator TPB yang oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Tabel 5. 4 Capaian Indikator TPB Pilar Hukum Setiap OPD

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	5
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	5
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	4
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	1
5	Badan Pusat Statistik	0	0	1
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Barito Timur	0	0	1
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	0	0

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator TPB yang telah selesai ada 3 indikator dari total indikator pilar hukum. Capaian indikator yang belum terselesaikan ada 1 indikator dan indikator yang belum memiliki data adalah 17 indikator dari total indikator pilar hukum.



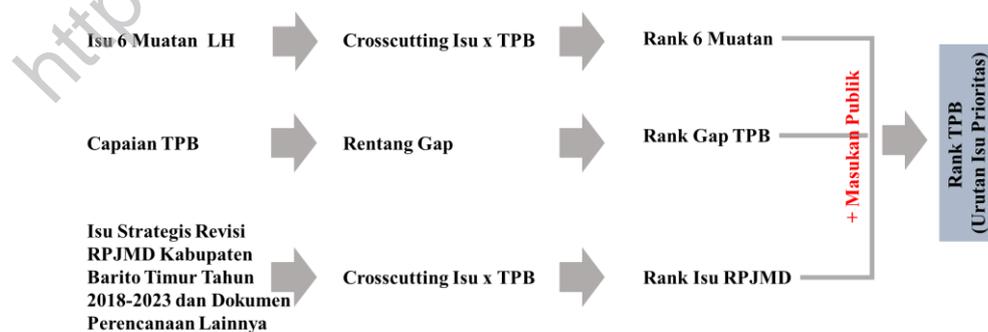
Gambar 5. 4 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Hukum

Dengan adanya data-data di atas, OPD yang berwenang atas pilar-pilar tersebut perlu melakukan kegiatan atau usaha untuk menyelesaikan capaian indikator TPB. Adanya

rekomendasi dari KLHS RPJMD ini, diharapkan capaian-capaian yang menjadi prioritas dapat terselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

5.2 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas

Kondisi sosial politik, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola kelembagaan harus menjadi pertimbangan dalam pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Kondisi keempat aspek tersebut dapat dianalisis melalui data capaian pada tiap indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Timur, dengan membandingkannya terhadap target nasional untuk mengetahui pencapaian target TPB di Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan kajian pada bagian sebelumnya, sebanyak 22,27% indikator TPB di Kabupaten Barito Timur telah mencapai target nasional, sedangkan masih terdapat 17,73% indikator TPB yang belum mencapai target nasional, dan 60% indikator TPB yang belum dapat dianalisis capaiannya karena tidak tersedia data. Adanya kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dengan target TPB yang harus dicapai, menjadi salah satu dasar untuk perumusan isu prioritas. Selain memperhitungkan gap capaian TPB terhadap target nasional, perumusan isu prioritas juga mempertimbangkan isu dari kondisi muatan lingkungan hidup, isu strategis dari Rencana Pembangunan Daerah (meliputi RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018 – 2023, visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Timur, dan Isu Strategis RPJMN Tahun 2020 – 2024), serta isu dari masukan konsultasi publik. Kerangka analisis dan pemeringkatan isu TPB untuk menentukan isu prioritas di Kabupaten Barito Timur ditunjukkan pada Gambar 5.5.



Gambar 5.5 Kerangka Analisis dan Pemeringkatan Isu TPB

5.2.1 Analisis Data

a) Gap Capaian TPB

Capaian indikator TPB menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan isu prioritas di Kabupaten Barito Timur. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional dan indikator yang semakin besar selisih/gap antara capaian dan targetnya akan semakin berpotensi menjadi isu prioritas. Hasil analisis capaian TPB di Kabupaten Barito Timur telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dan uraian capaian per indikator terdapat pada Lampiran. Sementara itu, rangkuman hasil analisis gap capaian setiap tujuan pada TPB di Kabupaten Barito Timur ditunjukkan pada **Tabel 5.5**.

Tabel 5.5 Analisis gap capaian TPB di Kabupaten Barito Timur

	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Total Indikator	Ketercapaian	Persentase Data	Skor
1	Tanpa kemiskinan	24	20,83	37,50	0,21
2	Tanpa kelaparan	7	63,64	63,64	0,64
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	32,35	70,59	0,32
4	Pendidikan Berkualitas	13	23,08	46,15	0,23
5	Kesetaraan Gender	14	7,14	7,14	0,07
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	18	5,56	5,56	0,06
7	Energi Terjangkau	2	0,00	0,00	0,00
8	Pertumbuhan Ekonomi	19	36,84	73,68	0,37
9	Infrastruktur	13	30,77	30,77	0,31
10	Berkurangnya kesenjangan	11	18,18	54,55	0,18
11	Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	13	15,38	15,38	0,15
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	5	0,00	20,00	0,00
13	Penanganan Perubahan Iklim	4	0,00	0,00	0,00
15	Ekosistem Daratan	4	25,00	25,00	0,25
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	21	14,29	19,05	0,14
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	16	12,50	50,00	0,13

Sumber: Hasil Analisis, 2020

b) Isu Muatan Kondisi Lingkungan Hidup

Kajian kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Barito Timur telah diuraikan pada Bab 3. Berdasarkan hasil kajian 6 muatan wajib lingkungan hidup tersebut, berikut merupakan kondisi yang menjadi isu di Kabupaten Barito Timur:

- 1) Perlunya peningkatan produktivitas lahan dalam penyediaa pangan di Kabupaten Barito Timur
- 2) Perlunya optimalisasi penyediaan air bersih dari air baku yang tersedia di Kabupaten Barito Timur
- 3) Belum optimalnya nilai tambah jasa penyediaan energi di Kabupaten Barito Timur
- 4) Kabupaten Barito Timur rentan terhadap bencana terkait perubahan iklim
- 5) Perlunya peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana di Kabupaten Barito Timur
- 6) Perlunya peningkatan jasa pengolahan dan penguraian limbah di Kabupaten Barito Timur
- 7) Adanya alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi areal penggunaan Lain (APL)

Masing-masing isu lingkungan hidup di Kabupaten Barito Timur ini selanjutnya disilangkan (crosscutting) dengan 17 TPB. TPB yang memiliki hubungan paling banyak dengan isu kondisi lingkungan hidup lebih menjadi prioritas. Hasil crosscutting TPB dengan isu kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Barito Timur ditunjukkan pada **Tabel 5.6**.

Tabel 5. 6 Analisis crosscutting TPB dengan isu kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Barito Timur

	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Isu Berdasarkan Kondisi Lingkungan Hidup							Hasil 6 Muatan	Skor
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Tanpa kemiskinan					*			1	0,14
2	Tanpa kelaparan	*	*		*				3	0,43
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	*	*						2	0,29
4	Pendidikan Berkualitas					*			1	0,14
5	Kesetaraan Gender					*			1	0,14
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak		*				*		2	0,29
7	Energi Terjangkau			*		*			2	0,29
8	Pertumbuhan Ekonomi					*			1	0,14
9	Infrastruktur								0	0,00
10	Berkurangnya kesenjangan								0	0,00
11	Kota dan Permukiman yang berlanjut	*	*		*				3	0,43
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	*	*				*		3	0,43
13	Penanganan Perubahan Iklim				*	*			2	0,29
15	Ekosistem Daratan	*	*					*	3	0,43
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh								0	0,00

	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Isu Berdasarkan Kondisi Lingkungan Hidup							Hasil 6 Muatan	Skor
		1	2	3	4	5	6	7		
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan								0	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2021

- c) Isu Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2023 dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Proses penyusunan KLHS berlangsung bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 - 2023, sehingga isu strategis pada Ranwal Perubahan RPJMD dijadikan sebagai bahan analisis KLHS. Pada Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2023, dinyatakan terdapat 5 isu strategis di Kabupaten Barito Timur, yaitu:

- 1) Peningkatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan
- 2) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia
- 3) Optimalisasi pembangunan Infrastruktur dasar
- 4) Pengentasan Kemiskinan
- 5) Pelestarian lingkungan hidup
- 6) Pengembangan dan pelestarian budaya lokal daerah
- 7) Reformasi Birokrasi

Selain itu, visi dan misi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2023 juga dipertimbangkan dalam menentukan isu prioritas. Terdapat tiga (1) visi dan lima (5) misi, yaitu:

Visi:

“TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH.”

Misi:

- 1) Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan perluasan lapangan pekerjaan;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia;

- 3) Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- 4) Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga; dan
- 5) Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain meninjau isu strategis pada Ranwal Perubahan RPJMD, terdapat isu strategis RPJMN 2020-2040 yang indikatornya harus dipenuhi oleh Kabupaten Barito Timur sehingga dipertimbangkan dalam menentukan isu prioritas. Terdapat 7 isu strategis nasional yang dapat diwujudkan oleh Kabupaten Barito Timur, yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Isu-isu tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 6 (enam) isu di Kabupaten Barito Timur, yaitu:

- 1) Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berbudaya
- 3) Pemerataan dan Pengentasan kemiskinan

- 4) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- 5) Peningkatan perekonomian daerah
- 6) Peningkatan pelayanan publik dan birokrasi

Sama halnya dengan analisis pada isu muatan lingkungan hidup, hasil pengelompokan isu tersebut selanjutnya disilangkan (crosscutting) dengan 17 TPB. TPB yang memiliki hubungan paling banyak dengan isu strategis lebih menjadi prioritas. Hasil crosscutting TPB dengan isu strategis dari Perubahan RPJMD dan dokumen perencanaan ditunjukkan pada **Tabel 5.7**.

Analisis crosscutting ini dimaksudkan untuk melihat TPB yang paling berhubungan/berpengaruh/saling terkait dengan isu strategis. Dalam hal ini, setiap TPB dinilai apakah memiliki dampak/pengaruh terhadap isu strategis, baik isu strategis dari hasil analisis kondisi lingkungan hidup, maupun isu strategis dari Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur dan dokumen perencanaan lainnya.

Tabel 5. 7 Analisis crosscutting TPB dengan isu strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2023

	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berbudaya	Pemertaaan dan Pengentasan kemiskinan	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan perekonomian daerah	Peningkatan pelayanan publik dan birokrasi	Isu Strategis Perubahan RPJMD dan Visi - Misi	Skor
1	Tanpa kemiskinan	*		*		*		3	0,50
2	Tanpa kelaparan					*		1	0,17
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	*	*	*		*	*	5	0,83
4	Pendidikan Berkualitas	*	*	*		*		4	0,67
5	Kesetaraan Gender		*			*		2	0,33
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	*			*			2	0,33
7	Energi Terjangkau	*			*	*		3	0,50
8	Pertumbuhan Ekonomi		*	*		*		3	0,50
9	Infrastruktur	*				*		2	0,33
10	Berkurangnya kesenjangan	*	*	*		*		4	0,67
11	Kota dan Permukiman yang berlanjut	*			*			2	0,33
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	*	*		*	*		4	0,67

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)		Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Perdaya Saing, dan Berbudaya	Pemertaan dan Pengentasan kemiskinan	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan perekonomian daerah	Peningkatan pelayanan publik dan birokrasi	Isu Strategis Perubahan RPJMD dan Visi - Misi	Skor
13	Penanganan Perubahan Iklim		*		*		*	3	0,50
15	Ekosistem Daratan				*			1	0,17
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh						*	1	0,17
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan		*					1	0,17

Sumber: Hasil Analisis, 2021

d) Pemeringkatan Isu TPB

Hasil analisis gap capaian TPB (Tabel 4.1), crosscutting TPB dengan isu lingkungan hidup (Tabel 4.2), dan crosscutting TPB dengan isu strategis Perubahan RPJMD (Tabel 4.3) selanjutnya disintesis dengan menjumlahkan peringkat dari ketiga aspek tersebut. Jumlah peringkat yang terkecil menjadi peringkat isu TPB yang paling prioritas. Hasil pemeringkatan isu TPB di Kabupaten Barito Timur ini ditunjukkan pada **Tabel 5.8**.

Tabel 5.8 Peringkat isu TPB di Kabupaten Barito Timur

	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Skor Ketercapaian TPB	Skor Dokumen Perencanaan	Skor Muatan Lingkungan Hidup	Skor PB	Ranking
1	Tanpa kemiskinan	0,21	0,03	0,14	0,39	9
2	Tanpa kelaparan	0,64	0,11	0,43	1,17	16
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	0,32	0,05	0,29	0,66	14
4	Pendidikan Berkualitas	0,23	0,04	0,14	0,41	10
5	Kesetaraan Gender	0,07	0,01	0,14	0,23	4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	0,06	0,01	0,29	0,35	7
7	Energi Terjangkau	0,00	0,00	0,29	0,29	5
8	Pertumbuhan Ekonomi	0,37	0,06	0,14	0,57	12
9	Infrastruktur	0,31	0,05	0,00	0,36	8
10	Berkurangnya kesenjangan	0,18	0,03	0,00	0,21	3
11	Kota dan Permukiman yang berlanjut	0,15	0,03	0,43	0,61	13
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	0,00	0,00	0,43	0,43	11
13	Penanganan Perubahan Iklim	0,00	0,00	0,29	0,29	6
15	Ekosistem Daratan	0,25	0,04	0,43	0,72	15
16	Perdamaian, Keadilan, dan	0,14	0,02	0,00	0,17	2

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)		Skor Ketercapaian TPB	Skor Dokumen Perencanaan	Skor Muatan Lingkungan Hidup	Skor PB	Ranking
	Kelembagaan yang Tangguh					
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	0,13	0,02	0,00	0,15	1

Sumber: Hasil Analisis, 2021

e) Isu dari Masukan Publik

Adapun Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan yang didapatkan sebelumnya dari masukan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah (secara geografis maupun budaya, dan tingkat pentingnya potensi dampak) adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
- 2) Stunting
- 3) Rendahnya produktifitas hasil pertanian dan perkebunan
- 4) Belum tercukupinya sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga medis
- 5) Tingginya angka kematian ibu dan anak
- 6) Masih rendahnya angka partisipasi sekolah
- 7) Belum meratanya kualitas pendidikan
- 8) Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik
- 9) Rendahnya kualitas, kuantitas, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
- 10) Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah
- 11) Rendahnya bantuan modal untuk manajemen, produksi, dan pemasaran produk UMKM
- 12) Rendahnya kualitas tenaga kerja

- 13) Ketimpangan kesejahteraan masyarakat
- 14) Perlunya penegakan hukum dan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 15) Perlunya penegakan hukum dan kebijakan yang adil bagi semua pihak.
- 16) Banyaknya masyarakat dengan ekonomi rendah menempati rumah tidak layak huni

Dari daftar isu tersebut, keterkaitan dengan tujuan pembangunan dianalisis berdasarkan indikator yang relevan dengan permasalahan dalam isu tersebut. Sehingga dari hasil integrasi tersebut didapatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu diperhatikan dan menjadi fokus Kabupaten Barito Timur adalah:

- 1) TPB 1 Tanpa Kemiskinan
- 2) TPB 2 Tanpa Kelaparan
- 3) TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) TPB 4 Pendidikan Berkualitas
- 5) TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 6) TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 7) TPB 10 Kesenjangan
- 8) TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- 9) TPB 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Berdasarkan proses identifikasi, analisis dan pemeringkatan, serta konsultasi publik yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa Kabupaten Barito Timur memiliki tujuh isu pembangunan prioritas, di antaranya:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (TPB 01);
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (TPB 02);
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia (TPB 03);

4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (TPB 04);
5. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 06);
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 08);
7. Mengurangi ketimpangan (TPB 10);
8. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11).

5.3 Analisis Gap dan/atau Kesenjangan dari Kebijakan dan Strategi pada Perubahan RPJMD terhadap Pencapaian TPB

Analisis selanjutnya dilakukan dengan mengidentifikasi gap atau kesenjangan pada setiap TPB yang telah disepakati menjadi isu prioritas dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018 – 2023, berupa target TPB yang menjadi isu karena memiliki kondisi capaian TPB yang belum mencapai target nasional dan menjadi isu dalam dokumen perencanaan di Kabupaten Barito Timur. Target TPB yang menjadi isu, dapat dilihat pada **Tabel 5.9.**, menjadi pertimbangan dalam menentukan *outcomes* atau keluaran pada TPB yang menjadi isu prioritas di Kabupaten Barito Timur dalam penyusunan skenario pencapaian TPB prioritas.

Tabel 5. 9 Analisis gap kebijakan dan strategi pada Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur terhadap TPB Prioritas

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
		Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
			Tingginya persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar
		Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Rendahnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan. Rendahnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Barito Timur

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Rendahnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan rendahnya tingkat konsumsi ikan.
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
			Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
		Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
			Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
			Kejadian Malaria per 1000 orang.
			Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi tekanan darah tinggi.		

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
			Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.
		Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
		Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
4			Rendahnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
	Pendidikan Berkualitas (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua)	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Rendahnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
			Rendahnya angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
			Rendahnya angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
		Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Rendahnya angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan didukung dengan rendahnya daya dukung penyediaan air di Kabupaten Barito Timur
		Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
8			Rendahnya persentase tenaga kerja formal

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Menurunnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian
		Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Meningkatnya tingkat setengah pengangguran
		Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Rendahnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
			Rendahnya jumlah wisatawan mancanegara
10	Berkurangnya Kesenjangan Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. Jumlah desa tertinggal. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani, terutama di kawasan permukiman yang memiliki timbulan sampah yang tinggi
		Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Sumber: Hasil Analisis, 2021

BAB VI

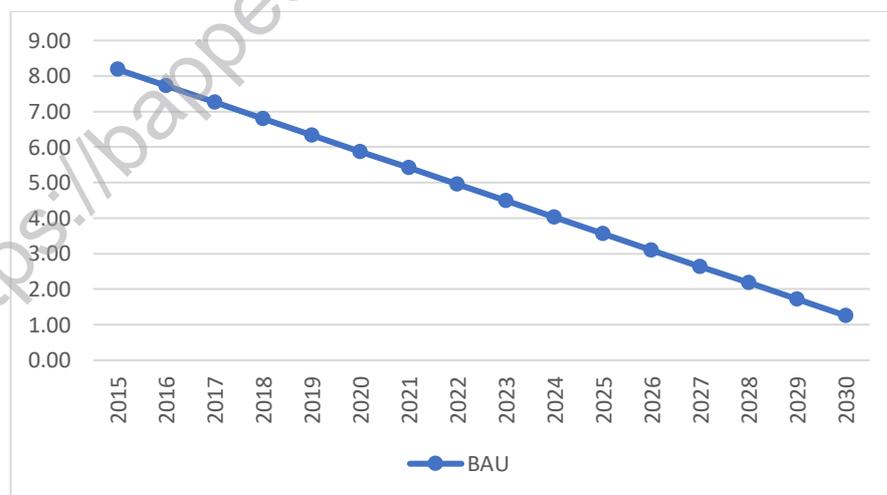
SKENARIO DAN REKOMENDASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Berdasarkan ketercapaian target eksisting dan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), terdapat beberapa skenario yang berkaitan dengan upaya tambahan pencapaian target TPB. Pada sub-bab ini, akan diuraikan mengenai skenario pencapaian target TPB pada setiap isu prioritas yang telah disepakati di Kabupaten Barito Timur. Selain itu, pada sub-bab ini juga akan dibahas tentang rekomendasi untuk pembangunan di Kabupaten Barito Timur.

6.1 Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

6.1.1 Skenario Pencapaian Target Tanpa Kemiskinan (TPB 1)

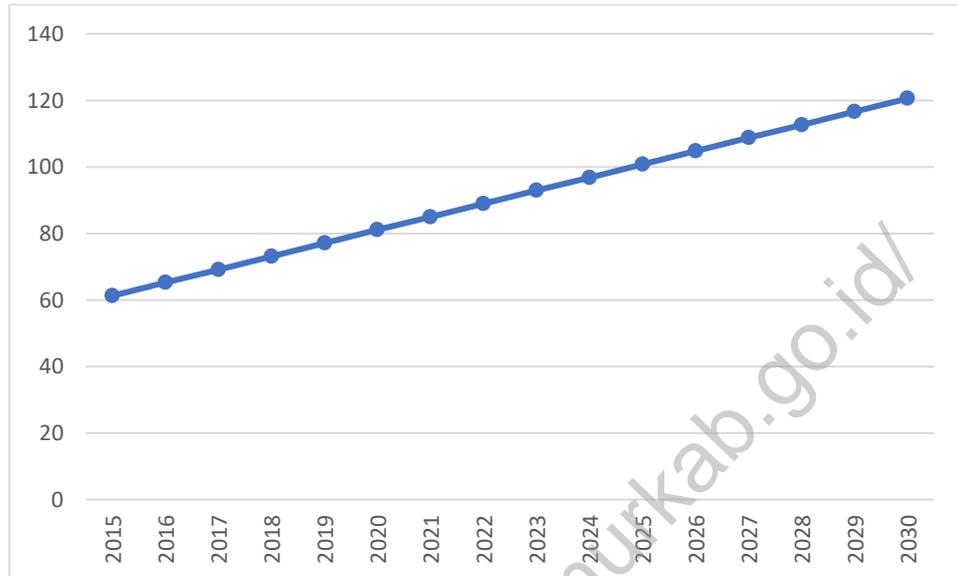
Angka kemiskinan di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 berada pada angka 6,09% dimana angka ini sudah berada di bawah target nasional yaitu 7-8% pada tahun 2030. Namun, angka kemiskinan Kabupaten Barito masih berada di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 5,17 %. Berdasarkan skenario BAU, angka kemiskinan Kabupaten Barito Timur akan berada jauh di bawah target nasional.



Gambar 6.1 Proyeksi Skenario BAU Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Timur

Selain angka kemiskinan, Kabupaten Barito Timur juga memiliki angka partisipasi sekolah SMP/MTS yang belum mencapai target nasional. Pada tahun

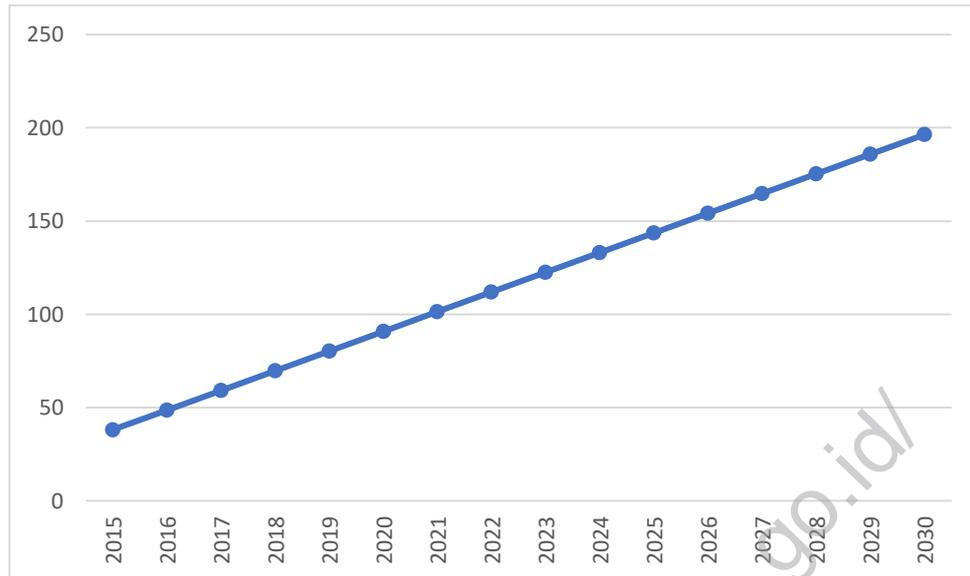
2020, angka partisipasi sekolah Kabupaten Barito Timur adalah 76,33%. Angka partisipasi ini akan terus meningkat dan mencapai target nasional pada tahun 2023 dengan skenario BAU.



Gambar 6.2 Skenario BAU Angka Partisipasi SMP/MTS di Kabupaten Barito Timur

Sistem perlindungan sosial yang tepat bagi semua penduduk, termasuk kelompok miskin dan rentan merupakan salah satu upaya untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan atau dalam rangka mencapai kesejahteraan. Di Indonesia, bentuk perlindungan sosial ini berupa Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Terdapat berbagai bidang SJSN, antara lain bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan.

SJSN bidang kesehatan di Kabupaten Barito Timur masih memerlukan upaya peningkatan dalam hal kuantitas peserta. Pada tahun 2020, persentase peserta jaminan kesehatan melalui SJSN sejumlah 85,64%. Dengan skenario BAU, peserta jaminan kesehatan melalui SJSN meningkat melebihi target nasional yaitu 100% pada tahun 2030.



Gambar 6.3 Proyeksi Persentase Peserta SJSN

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Berkaitan dengan kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Timur tersebut, serta merujuk pada hasil analisis gap yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat tiga (3) *outcomes* yang menjadi target dalam pencapaian TPB 1, yaitu: Berkurangnya penduduk yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, dan Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap pendidikan. Dalam upaya pencapaian ketiga *outcomes* tersebut, diperlukan arahan kebijakan dan arahan program yang ditunjukkan pada Gambar **Tabel 6.1**

Tabel 6.1 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1 Tanpa Kemiskinan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Berkurangnya penduduk yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi	Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

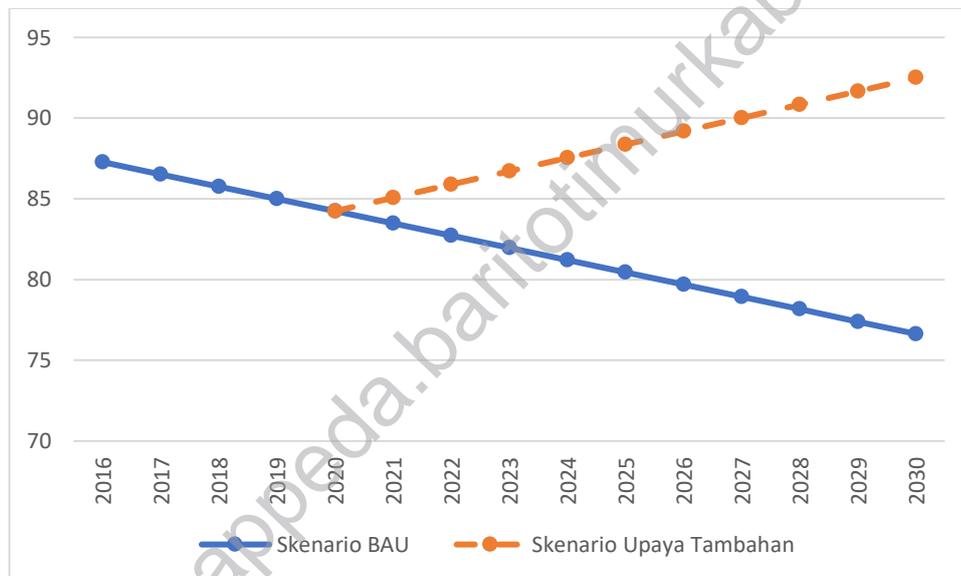
Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
	kualitas hidup masyarakat	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program peningkatan pemberdayaan sosial
Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap pendidikan	Peningkatan literasi dan penuntasan buta aksara pendidikan umum	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

6.1.2 Skenario Pencapaian Target Tanpa Kelaparan (TPB 2)

Secara umum di Kabupaten Barito Timur memiliki lahan yang mampu menyediakan bahan pangan yang dapat dibagi menjadi lahan berpotensi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dalam menyediakan bahan pangan memiliki luasan 127.382.03 ha. Lahan yang berpotensi tinggi dalam penyediaan bahan pangan memiliki luasan sebesar 81.875,75 ha. Berdasarkan analisis yang dilakukan, masih terdapat beberapa daerah yang memiliki daya dukung pangan yang rendah. Berikut tabel daya dukung pangan pada setiap kecamatan di Kabupaten Barito Timur.

Selain ketersediaan pangan, dalam TPB 2 Tanpa Kelaparan untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi salah satunya dilihat dari kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Barito Timur. Pada tahun 2020, persentase kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Barito Timur yaitu 85,70%. Dapat dilihat bahwa capaian kualitas konsumsi pangan ini masih belum mencapai target nasional. Jika tidak ada upaya tambahan, maka diproyeksikan pada tahun 2030, masih terdapat gap sebesar 15,86%. Maka, diperlukan upaya dengan meningkatkan persentase kualitas konsumsi pangan yang dilihat dari nilai Produksi Pangan Harapan (PPH) yang harus naik sebesar 0,82% per tahun mulai tahun 2021 agar pada tahun 2030 dapat mencapai target. Proyeksi capaian, target, dan skenario dapat dilihat pada **Gambar 6.4**



Gambar 6.4 Proyeksi Persentase PPH

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

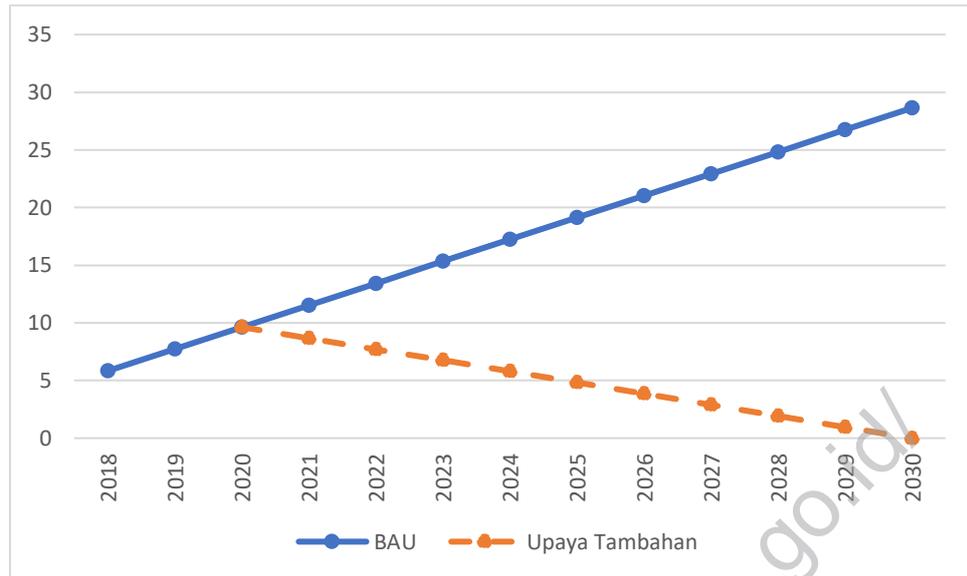
Terdapat satu outcome yang diharapkan berkaitan dengan masalah pangan untuk TPB-2 dalam Isu Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Beberapa arahan program yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pencapaian tersebut ditunjukkan pada **Tabel 6.2**.

Tabel 6. 2 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 2 Tanpa Kelaparan

Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program
Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Program perbaikan gizi masyarakat
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan

6.1.3 Skenario Pencapaian Target Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3)

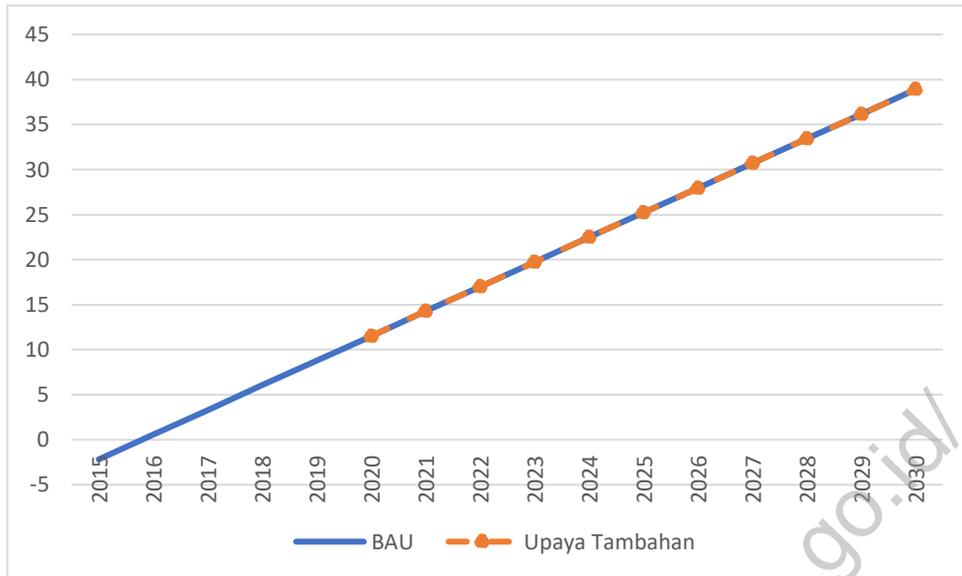
Kehidupan sehat dan sejahtera menjadi salah satu isu prioritas yang terdapat di Kabupaten Barito Timur. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, selama tahun 2020 angka kematian balita per 1000 kelahiran mengalami peningkatan dari 7,733 menjadi 9,633. Hal ini dapat terjadi akibat berbagai faktor salah satunya karena masih belum memadainya pelayanan Kesehatan di Kabupaten Barito Timur. Capaian ini masih memiliki gap karena berdasarkan capaian nasional angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup menurun hingga 0. Dengan kondisi BAU, nilai capaian dan target dapat diproyeksikan sebagaimana yang terlihat pada **Gambar 6.5**. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa dengan kondisi BAU angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup terus meningkat hingga tahun 2030. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya tambahan agar indikator angka kematian balita mencapai target nasional di tahun 2030 sebagaimana yang terlihat pada **Gambar 6.5**.



Gambar 6.5 Proyeksi Angka Kematian Balita (AKBa)

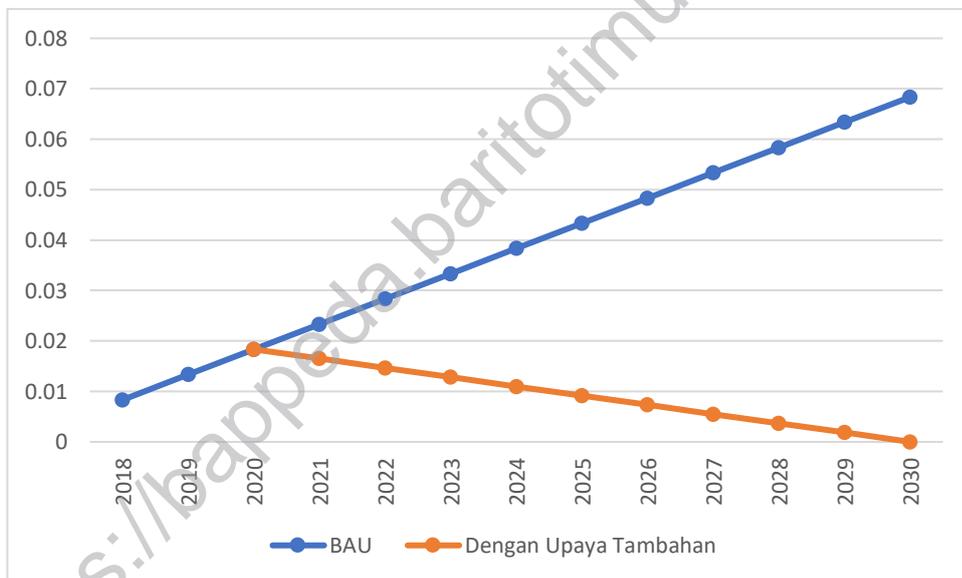
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Di Kabupaten Barito Timur, prevalensi HIV dan kejadian malaria terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Dimana prevalensi HIV meningkat menjadi 11,52% dan kejadian malaria meningkat menjadi 0,01833 pada tahun 2020. Capaian kedua indikator ini masih belum memenuhi target nasional. Setelah diproyeksikan dengan kondisi BAU, capaian kedua indikator ini tetap belum memenuhi target nasional hingga tahun 2030 sebagaimana yang terlihat pada **Gambar 6.6** dan **Gambar 6.7**. Oleh karena itu, berdasarkan hasil proyeksi yang telah dilakukan sebagaimana pada kedua gambar tersebut dibutuhkan skenario upaya tambahan agar kedua indikator ini mencapai target nasional pada tahun 2030.



Gambar 6. 6 Proyeksi Prevalensi HIV

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

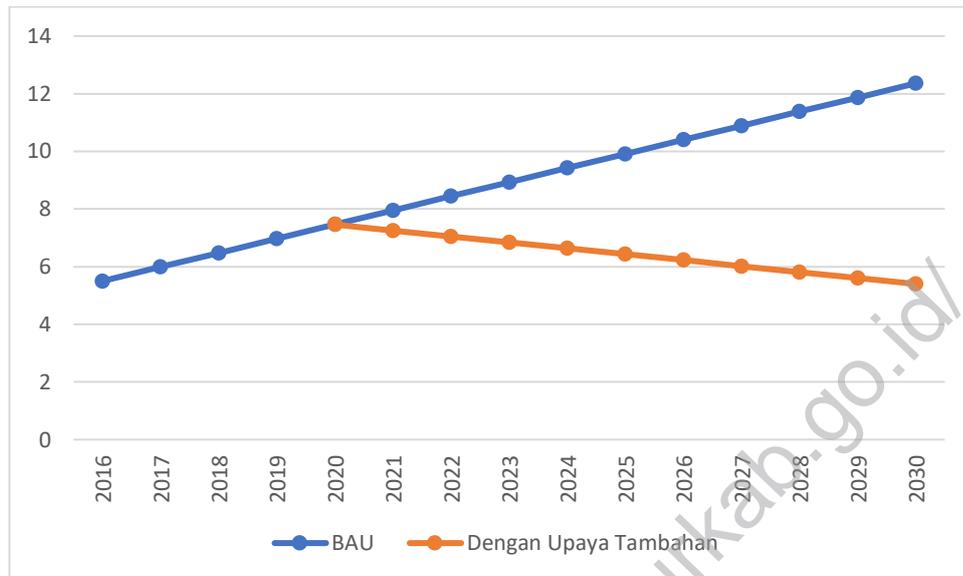


Gambar 6. 7 Proyeksi Kejadian Malaria per 1000 Orang

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Di Kabupaten Barito Timur persentase merokok pada umur < 18 tahun pada tahun 2020 cukup tinggi yaitu mencapai 7,46%. Nilai ini masih memiliki gap dengan capaian nasional yaitu 5,4%. Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan, dengan kondisi normal atau BAU persentase merokok pada umur < 18 tahun ini akan terus meningkat hingga tahun 2030 dan akan semakin jauh dari target nasional sebagaimana yang terlihat pada **Gambar 6.8** sehingga dibutuhkan upaya tambahan

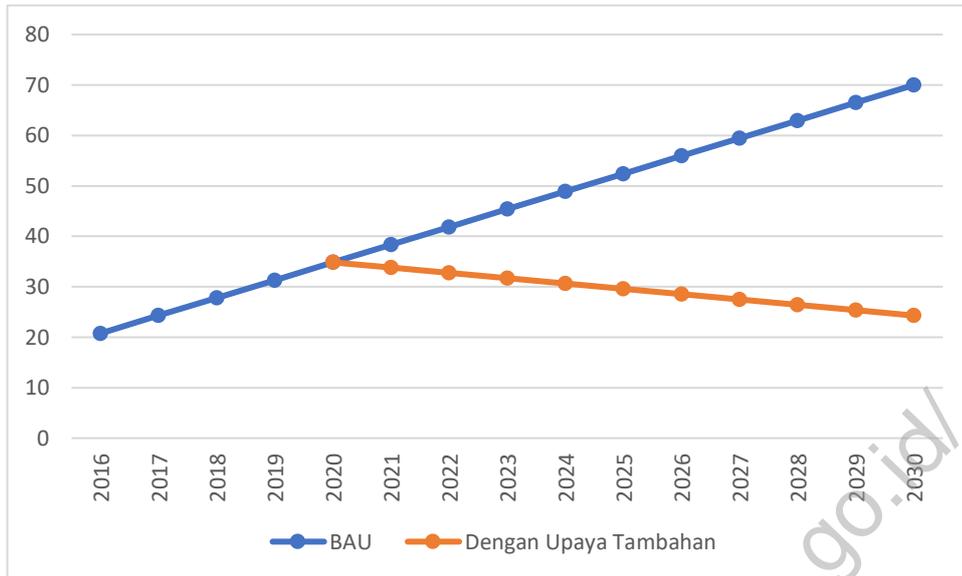
agar persentase merokok di usia < 18 tahun menurun dan dapat mencapai target nasional pada tahun 2030.



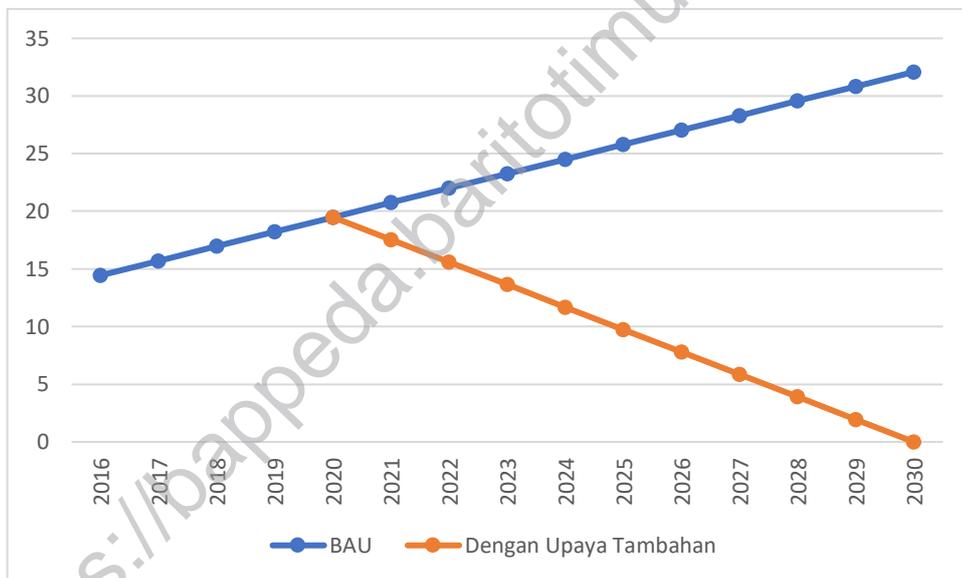
Gambar 6. 8 Proyeksi Persentase Merokok Umur < 18 Tahun

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Selain dari prevalensi HIV dan kejadian malaria, prevalensi tekanan darah tinggi dan prevalensi obesitas di Kabupaten Barito Timur masih memiliki gap/masalah. Pada tahun 2020 prevalensi tekanan darah tinggi naik menjadi 34,836% yang mana nilai ini masih jauh dari target nasional yaitu sebesar 24,30%. Selain itu prevalensi obesitas juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 21,80% dan indikator ini juga masih jauh dari target nasional. Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan, apabila terus dijalankan dengan kondisi normal/BAU nilai prevalensi tekanan darah tinggi dan obesitas akan semakin meningkat dan jauh dari target nasional pada tahun 2030 sebagaimana yang dapat dilihat pada **Gambar 6.9** dan **Gambar 6.10**. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya tambahan agar kedua indikator ini dapat mencapai target nasional pada tahun 2030.



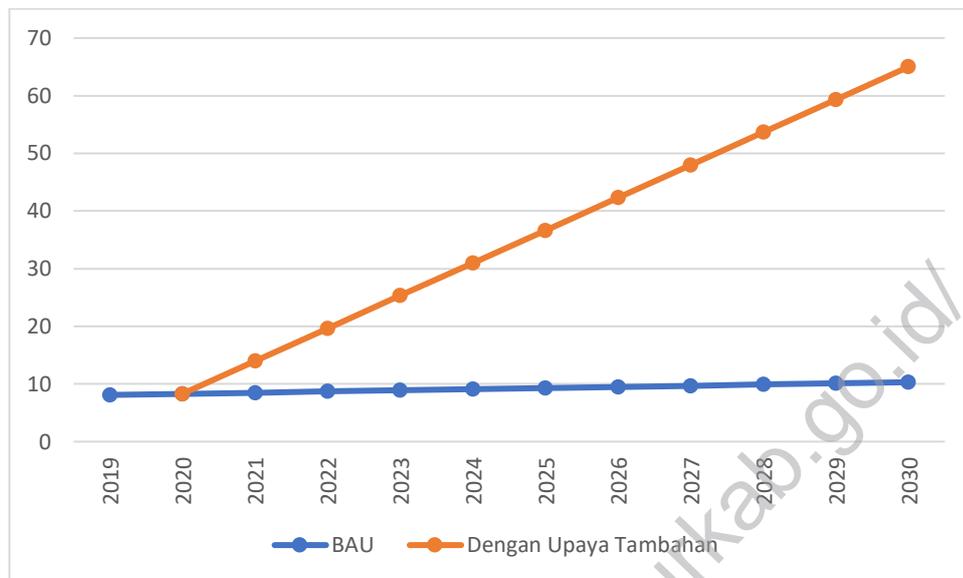
Gambar 6. 9 Proyeksi Prevalensi Tekanan Darah Tinggi
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 6. 10 Proyeksi Prevalensi Obesitas pada Umur > 18 Tahun
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Di Kabupaten Barito Timur, prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur masih terbilang rendah dan jauh dari target nasional. Pada tahun 2020 baru 8,3% target penggunaan CPR yang tercapai dari target nasional yaitu 65%. Setelah diproyeksikan dengan kondisi normal/BAU, pada tahun 2030 baru tercapai 10,3% prevalensi penggunaan CPR sebagaimana

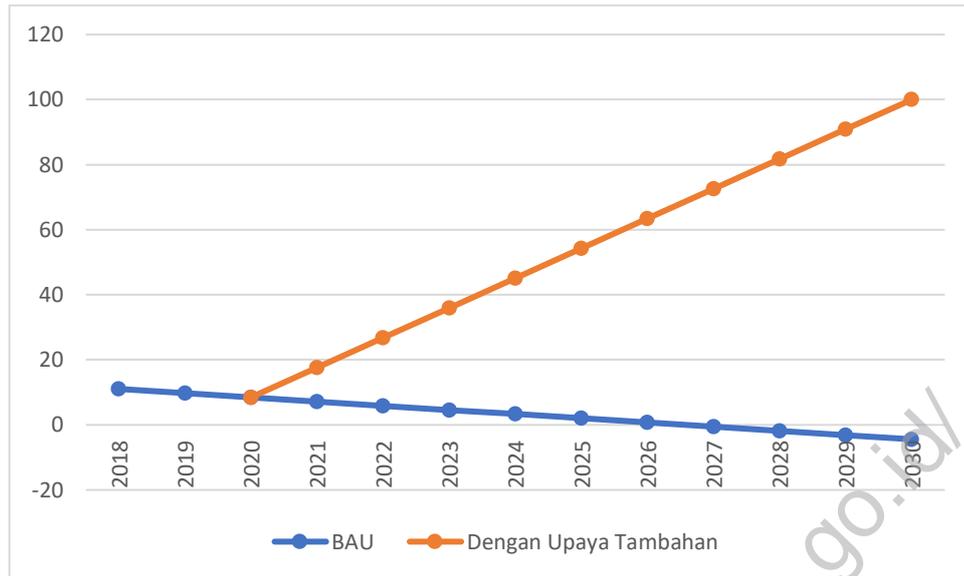
yang dapat dilihat pada **Gambar 6.11**. Sehingga dibutuhkan upaya tambahan agar indikator ini dapat mencapai target nasional pada tahun 2030.



Gambar 6. 11 Proyeksi Prevalensi CPR pada Pasangan Usia Subur

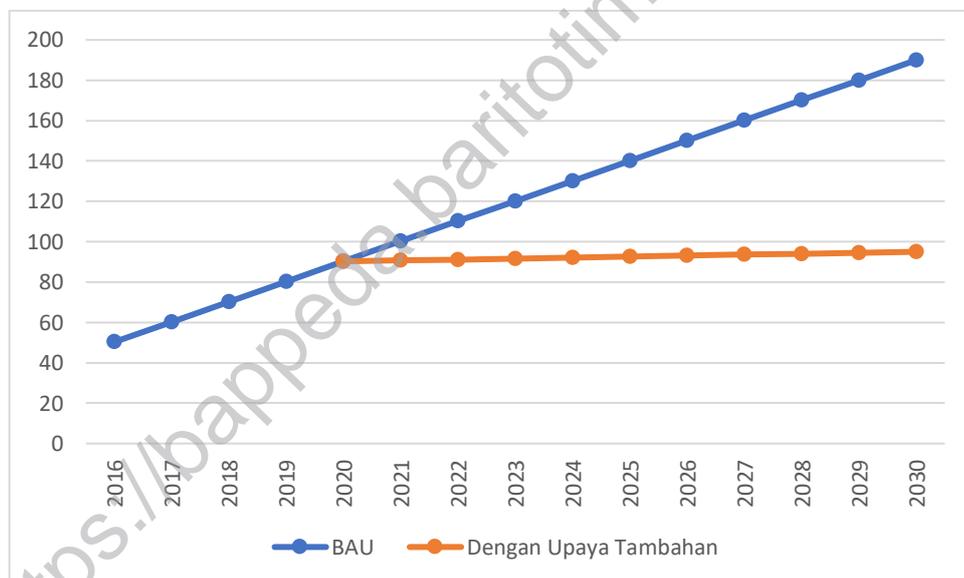
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Selain dari prevalensi dan tingkat penyakit menular di Kabupaten Barito Timur, indikator yang terkait dengan pelayanan kesehatan seperti jumlah penduduk yang dicakup askes dan cakupan jaminan kesehatan nasional di Kabupate Barito Timur juga masih memiliki gap/masalah. Pada tahun 2020 baru 8,41% dari 1000 penduduk yang tercakupi askes yang mana ini masih jauh dari target nasional yaitu 100%. Sementara itu untuk jaminan kesehatan nasional pada tahun 2020 baru tercapai 90,242% sedangkan target nasional yang harus dicapai adalah 100% pada tahun 2030. Setelah diproyeksikan dengan kondisi normal/BAU didapatkan bahwa untuk cakupan askes per 1000 penduduk belum mencapai target nasional pada tahun 2030 sehingga diperlukan upaya tambahan sebagaimana yang dapat dilihat pada **Gambar 6.12**. Sementara itu, untuk cakupan jaminan kesehatan nasional setelah diproyeksikan dengan kondisi BAU didapatkan bahwa Kabupaten Barito Timur dapat mencapai targetnya pada tahun 2021 sebagaimana yang dapat dilihat pada **Gambar 2.13**.



Gambar 6. 12 Proyeksi Jumlah Penduduk yang Dicapai Asuransi Kesehatan per 1000 Penduduk

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)



Gambar 6. 13 Proyeksi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Terdapat *outcome* yang diharapkan berkaitan dengan keshidupan sehat dan sejahtera dalam RPJMD kabupaten barito timur, yaitu meningkatkan kualitas Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai *outcome* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya dan diperlukannya adanya arahan kebijakan dan arahan program seperti tertera pada Tabel 6.4.

Tabel 6. 3 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 4 tentang Kualitas Pendidikan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Menurunkan angka kematian bayi dan balita.	Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak dan penurunan perkawinan usia anak	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
		Program pembinaan Keluarga Berencana (KB).
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan melalui peran posyandu dan penyuluhan imunisasi.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
	Peningkatan mutu gizi, ketahanan dan keamanan pangan bagi ibu hamil, bayi dan balita.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan		
Mengakhiri epidemi dan penyakit menular. Mengurangi angka	Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, dan epidemi bagi semua	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

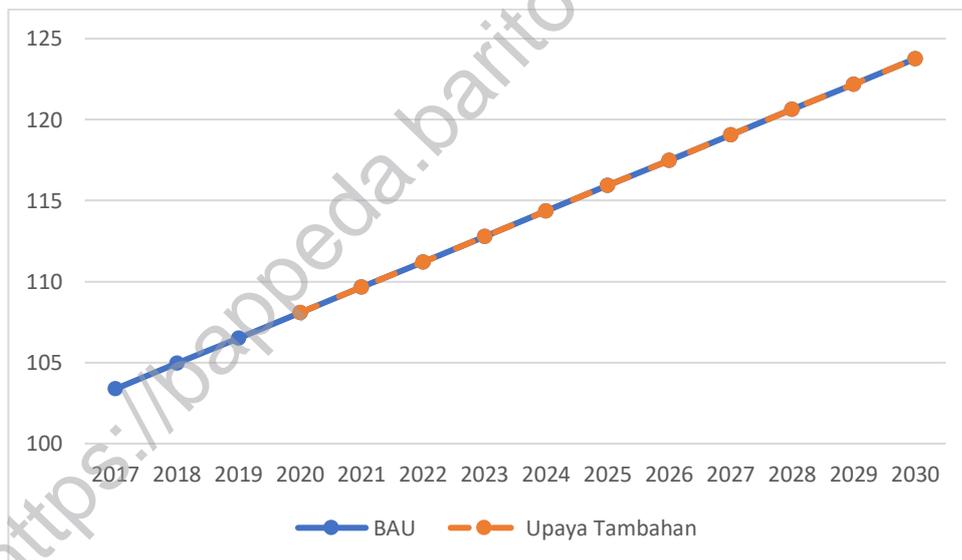
Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program	
kematian dini akibat penyakit tidak menular.	gender dan kalangan masyarakat.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	
	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	
	Peningkatan penelitian dan pengembangan terkait epidemi, penyakit menular dan tidak menular.	Pembinaan dan pemantauan terkait pencegahan epidemi dan penyakit menular bagi semua gender dan kalangan masyarakat.	Program penelitian dan pengembangan daerah.
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
	Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat.	Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
			Program pemberdayaan sosial.
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
Mengurangi tingkat kejadian penyakit malaria per 1000 orang	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.	
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	
		Program pemberdayaan sosial.	
		Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat	
Mengurangi persentase penduduk < 18 tahun yang merokok	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	
Mengurangi tingkat prevalensi tekanan darah tinggi		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	
Mengurangi tingkat prevalensi obesitas pada umur < 18 tahun			
Meningkatkan angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur			

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
(PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin		
Meningkatkan jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk		Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan nasional		Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

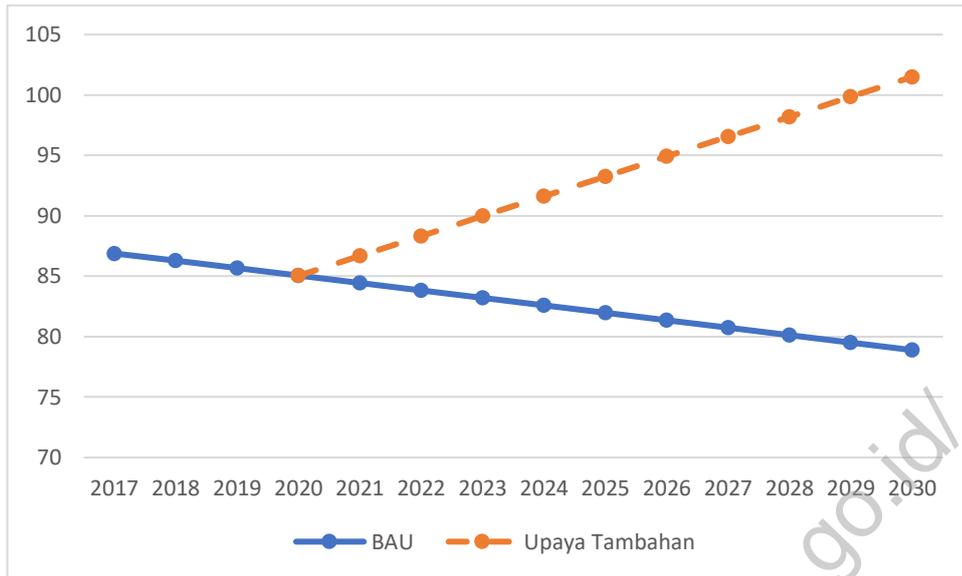
6.1.4 Skenario Pencapaian Target Kualitas Pendidikan (TPB 4)

Kualitas pendidikan menjadi salah satu isu yang terdapat di daerah Kabupaten Barito Timur. Selain persiapan pekerja usia muda yang membutuhkan sarana pendidikan eksternal untuk persiapan pra kerja, beberapa indikator yang terdapat dalam tujuan nomor 4 juga memerlukan peningkatan agar kualitas pendidikan dasar di daerah terus meningkat. Target nasional pada peta jalan SDGs Indonesia untuk APK SD/MI/ sederajat yaitu sebesar 106,24%. Berdasarkan data, angka partisipasi kasar khususnya pada Sekolah Dasar tidak dibutuhkan upaya peningkatan APK dari kondisi eksisting pada tahun 2020 untuk mencapai target nasional pada tahun 2030. Berdasarkan hasil proyeksi persentase pada *business as usual* pada tahun 2023 (tahun akhir RPJMD) adalah sebesar 112,78% dan tahun 2030 adalah 123,76%. Hal ini berarti pada tahun 2030 sudah mampu mencapai target nasional yang ditetapkan sehingga tidak perlu dilakukannya upaya tambahan. Pada target nasional pada peta jalan SDGs Indonesia untuk APK tingkat SMP/MTs/ sederajat untuk

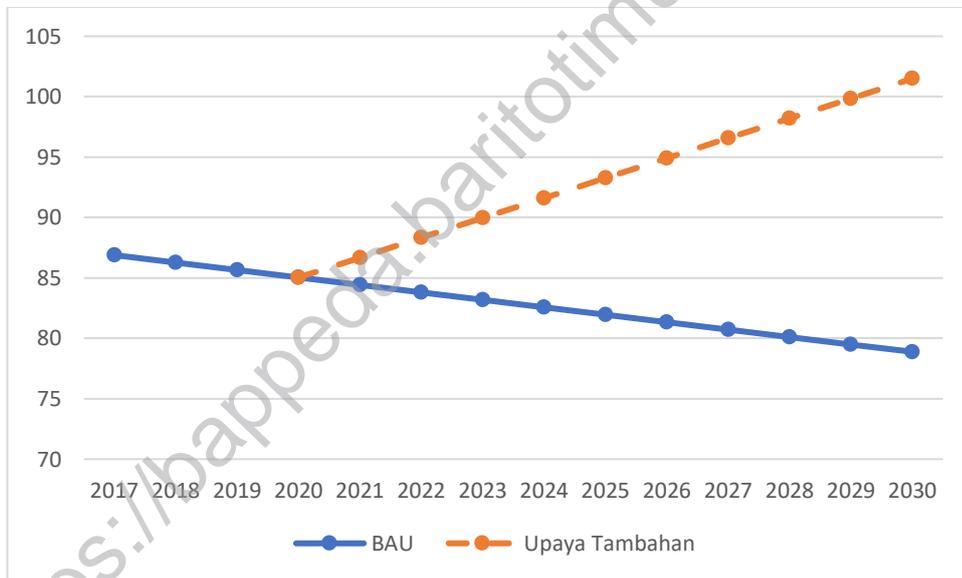
mencapai target nasional sebesar 101,49%. Pada hasil proyeksi persentase *business as usual* pada tahun 2023 adalah sebesar 83,19% dan tahun 2030 APK untuk tingkat SMP/MTs/ sederajat sebesar 78,89%. Melalui nilai tersebut maka nilai APK belum mampu mencapai target nasional. Berdasarkan persentase tersebut terdapat rentang *gap* yang cukup besar antara kegiatan *business as usual* dengan upaya tambahan yaitu sebesar 22,6%. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya tambahan sehingga pada tahun 2030 Kabupaten Barito Timur telah mampu mencapai target nasional. Selain itu peningkatan juga dibutuhkan pada Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimana memiliki target nasional pada peta jalan SDGs Indonesia sebesar 65,51%. Pada hasil proyeksi persentase *business as usual* pada tahun 2023 adalah sebesar 63,83% dan tahun 2030 APK untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 59,01%. Melalui nilai tersebut maka nilai APK belum mampu mencapai target nasional. Berdasarkan persentase tersebut terdapat rentang *gap* yang cukup besar antara kegiatan *business as usual* dengan upaya tambahan yaitu sebesar 6,5%. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya tambahan, sehingga pada tahun 2030 Kabupaten Barito Timur telah mampu mencapai target nasional. Ilustrasi proyeksi capaian TPB ditampilkan pada **Gambar 6.5; 6.6; dan 6.7**



Gambar 6.14 Skenario APK SD/MI/ sederajat



Gambar 6.15 Skenario APK tingkat SMP/MTs/ sederajat



Gambar 6.16 Skenario APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Terdapat *outcome* yang diharapkan berkaitan dengan pendidikan dalam RPJMD kabupaten barito timur, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mencapai *outcome* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya dan diperlukannya adanya arahan kebijakan dan arahan program seperti tertera pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 4 tentang Kualitas Pendidikan

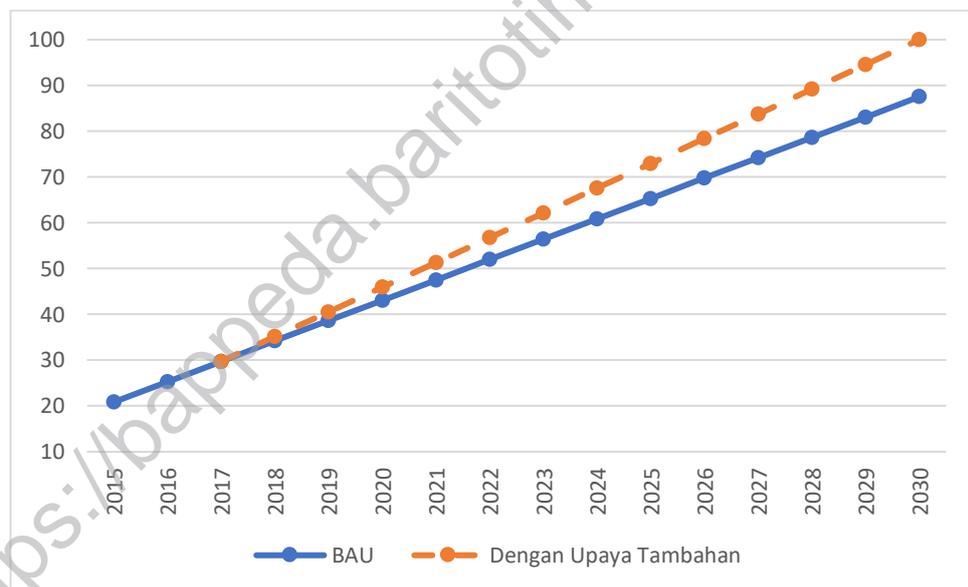
Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
		Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
		Program Pendidikan Non Formal dan Informal
		Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

6.1.5 Skenario Pencapaian Target Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6)

Berdasarkan hasil analisis daya dukung penyediaan air di Kabupaten Barito Timur, diketahui bahwa semua kecamatan di Kabupaten Barito Timur mengalami surplus. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik.

Selain terkait ketersediaan air, TPB 6 juga mencakup tentang akses terhadap air minum dan sanitasi layak. Pada tahun 2017, sebanyak 30,56% rumah tangga di Kabupaten Barito Timur sudah memiliki akses terhadap air minum yang layak. Jika diproyeksikan dengan skenario BAU (business as usual), pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 43,09%. Demikian pula jika diproyeksikan lebih lanjut hingga tahun 2023 (tahun akhir RPJMD), jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak mencapai 56,42%. Proyeksi capaian pada tahun 2023 ini masih jauh dari target RPJMD yaitu 100%. Namun, jika dibandingkan terhadap target nasional (dalam Lampiran Perpres 59/2017), proyeksi capaian pada tahun 2020 dan tahun 2023 masih berada di bawah target nasional masing-masing sebesar 100%. Artinya, upaya BAU (tanpa upaya tambahan) dapat dilakukan untuk mencapai target Renstra RPJMD hingga tahun 2023, namun masih diperlukan upaya tambahan untuk mencapai target TPB nasional.

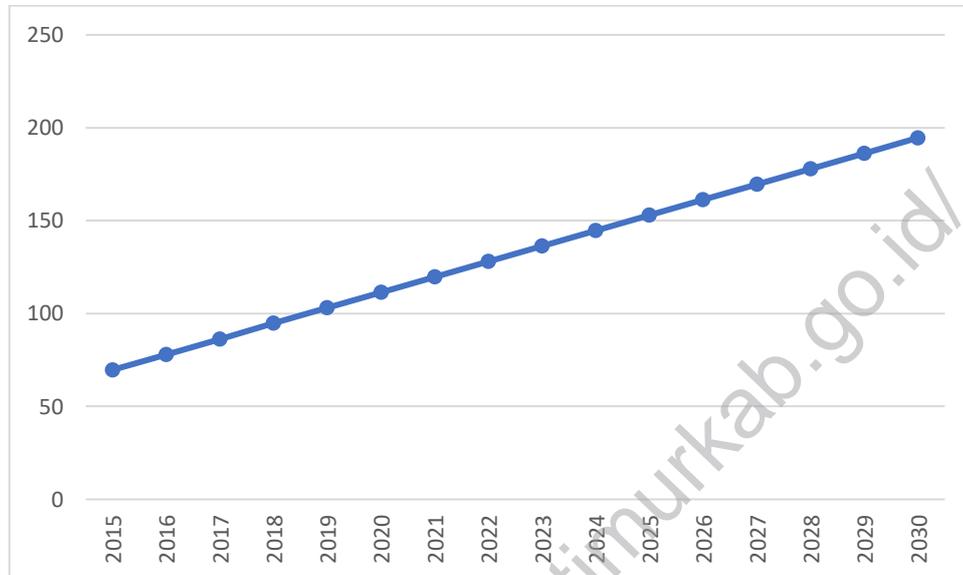


Gambar 6.17 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Di Kabupaten Barito Timur, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah sejumlah 94,81% pada tahun 2019. Dengan target seluruh rumah tangga (100%) memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak,

capaian Kabupaten Barito Timur sudah melebihi target tersebut. Artinya, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi pada tahun 2030 sudah mencapai target dengan skenario BAU.



Gambar 6.18 Proyeksi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Berkaitan dengan kondisi terkait air bersih dan sanitasi layak di Kabupaten Barito Timur tersebut, serta merujuk pada hasil analisis gap yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat dua (2) *outcomes* yang menjadi target dalam pencapaian TPB 6, yaitu: tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua dan tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak bagi semua. Dalam upaya pencapaian ketiga *outcomes* tersebut, diperlukan arahan kebijakan dan arahan program.

Tabel 6.5 Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 6 Tentang Air bersih dan Sanitasi Layak

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Tercapainya akses universal dan merata terhadap air	Pengembangan infrastruktur untuk penyediaan air minum,	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	terutama di kawasan permukiman.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
	Perencanaan, koordinasi, dan evaluasi antar badan usaha dan institusi dalam pengelolaan air minum.	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Program Perekonomian dan Pembangunan
Tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak bagi semua	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Sosialisasi dan edukasi perilaku hidup bersih sehat bagi masyarakat dengan pelibatan kelompok masyarakat.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

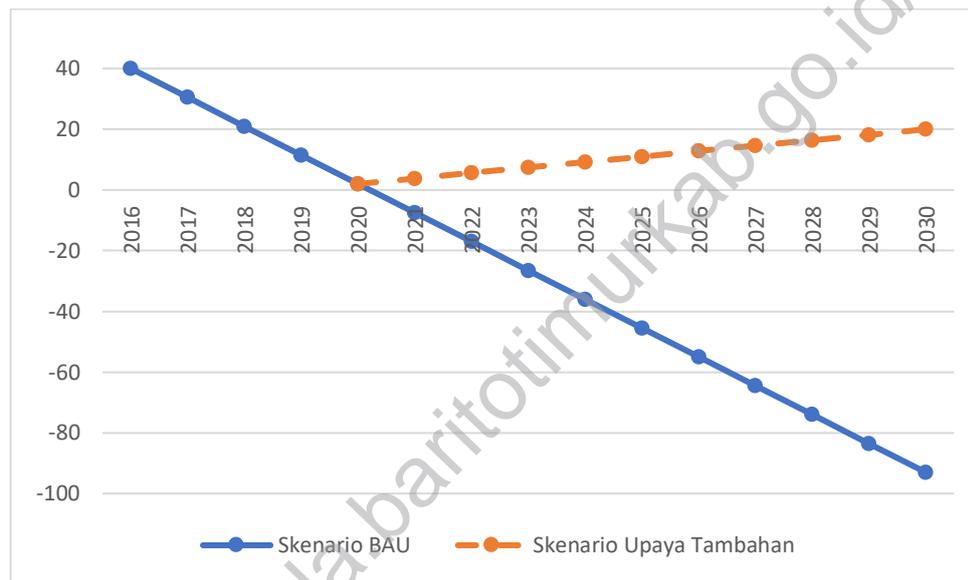
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

6.1.6 Skenario Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi (TPB 8)

Berdasarkan selisih capaian dan target tujuan pembangunan berkelanjutan, permasalahan di Kabupaten Barito Timur adalah terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, antara lain: masih rendahnya jumlah wisatawan pada umumnya dan mancanegara, rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, dan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Barito Timur. Tidak hanya karena selisih capaian terhadap target, ketiga hal tersebut juga sangat terdampak oleh kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi.

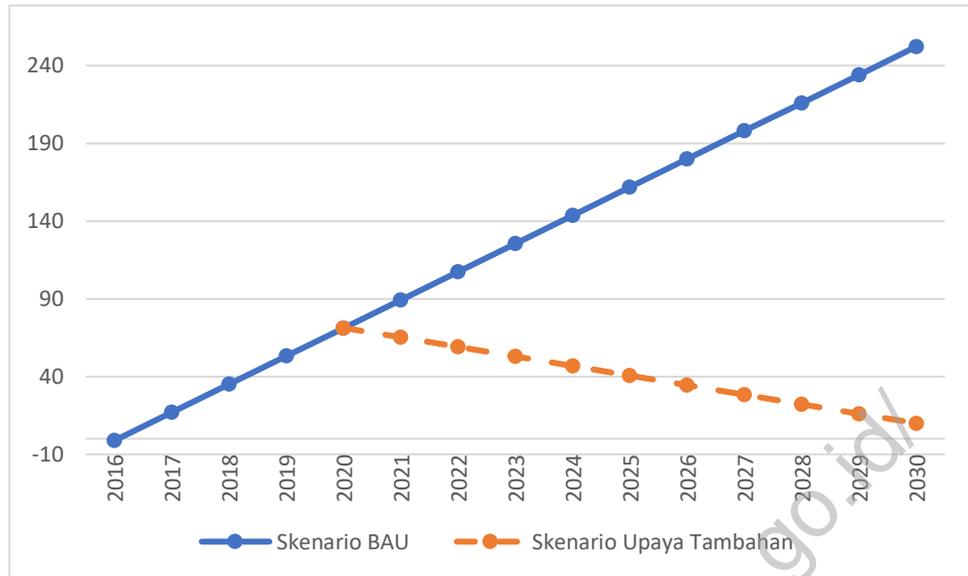
Dalam hal jumlah wisatawan, kondisi dan skenario peningkatan didekati melalui proyeksi jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Barito

Timur. Jumlah wisatawan mancanegara di Kabupaten Barito Timur mengalami fluktuasi selama hampir sepuluh tahun terakhir. Pasalnya, pada tahun 2015 jumlah wisatawan mancanegara berjumlah 37 juta jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 45 juta jiwa. Namun, pada tahun 2020, jumlah wisatawan ini mengalami penurunan drastis menjadi 10 juta jiwa. Dengan melihat kondisi ini tentunya diperlukan suatu upaya tambahan untuk meningkatkan kembali jumlah wisata yang ada di Kabupaten Barito Timur untuk dapat mencapai target nasional pada tahun 2030 yaitu sebanyak 20 juta wisatawan mancanegara.



Gambar 6.19 Proyeksi Jumlah Wisatawan Mancanegara Kabupaten Barito Timur
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Selain jumlah wisatawan mancanegara, terdapat indikator persentase tingkat setengah pengangguran yang menjadi pertimbangan dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 08 yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Pada tahun 2020, tingkat setengah pengangguran di Kabupaten Barito Timur mengalami kenaikan dari 50,58% pada tahun 2019 menjadi 69,33% pada tahun 2020. Hal ini salah satunya tentunya disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Hal ini tentunya perlu dilakukan suatu upaya tambahan untuk dapat mencapai target nasional yaitu tingkat setengah pengangguran yang mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya bukan malah mengalami kenaikan.



Gambar 6.20 Proyeksi Tingkat Setengah Pengangguran Kabupaten Barito Timur
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Berkaitan dengan kondisi terkait pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Timur tersebut, serta merujuk pada hasil analisis gap yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat dua (6) *outcomes* yang menjadi target dalam pencapaian TPB 8, yaitu: meningkatkan persentase tenaga kerja formal, meningkatkan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian, mengurangi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, mengurangi tingkat setengah pengangguran, meningkatkan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB, dan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Dalam upaya pencapaian ketiga *outcomes* tersebut, diperlukan arahan kebijakan dan arahan program yang ditunjukkan pada Gambar Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 6 tentang air bersih dan sanitasi layak

Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program
Meningkatkan persentase tenaga kerja formal	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

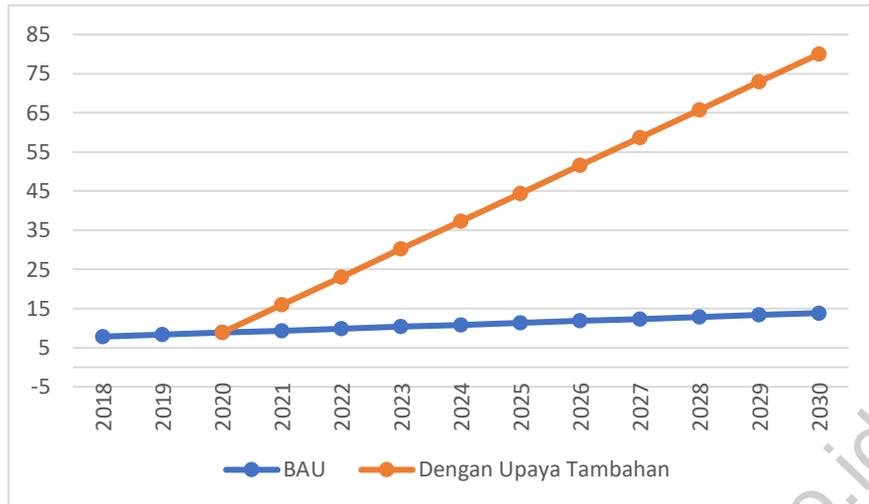
Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program
		Program perencanaan tenaga kerja
Meningkatkan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja
	Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa.	Program peningkatan kesejahteraan pelaku agribisnis
Mengurangi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja
Mengurangi tingkat setengah pengangguran	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja
Meningkatkan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata di lingkungan desa/kelurahan	Program pengembangan pemasaran pariwisata
	Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata
		Program peningkatan daya tarik pariwisata
Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan	Program pengembangan kemitraan	
Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara	Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program peningkatan daya tarik pariwisata

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

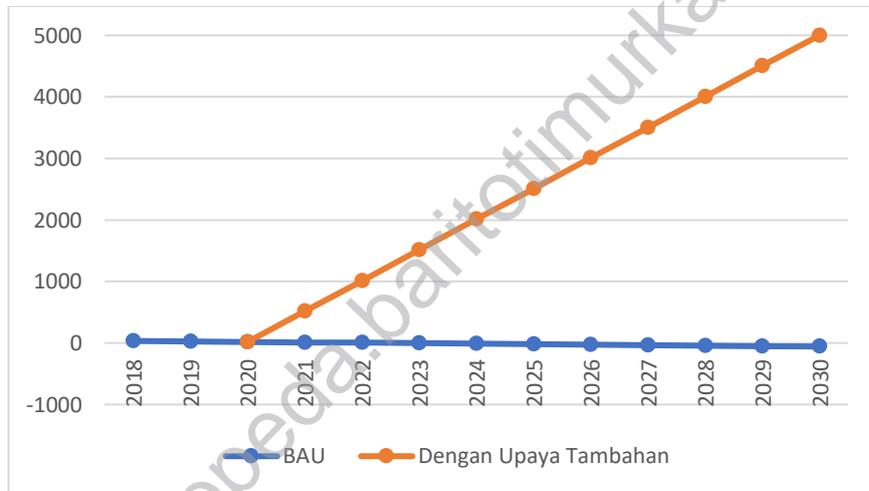
6.1.7 Skenario Pencapaian Target Berkurangnya Kesenjangan (TPB 10)

Berdasarkan selisih capaian dan target tujuan pembangunan berkelanjutan, permasalahan pada Kabupaten Barito timur ada TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan adalah masih rendahnya jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. Berdasarkan target nasional jumlah daerah tertinggal yang terentaskan adalah 80 kabupaten. Pada Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 hanya berjumlah 9 Kabupaten. Berdasarkan hasil proyeksi BAU pada tahun 2030 dihasilkan 14 kabupaten. Nilai ini masih belum memenuhi target nasional yang ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya tambahan sehingga target nasional mampu tercapai pada tahun 2030.

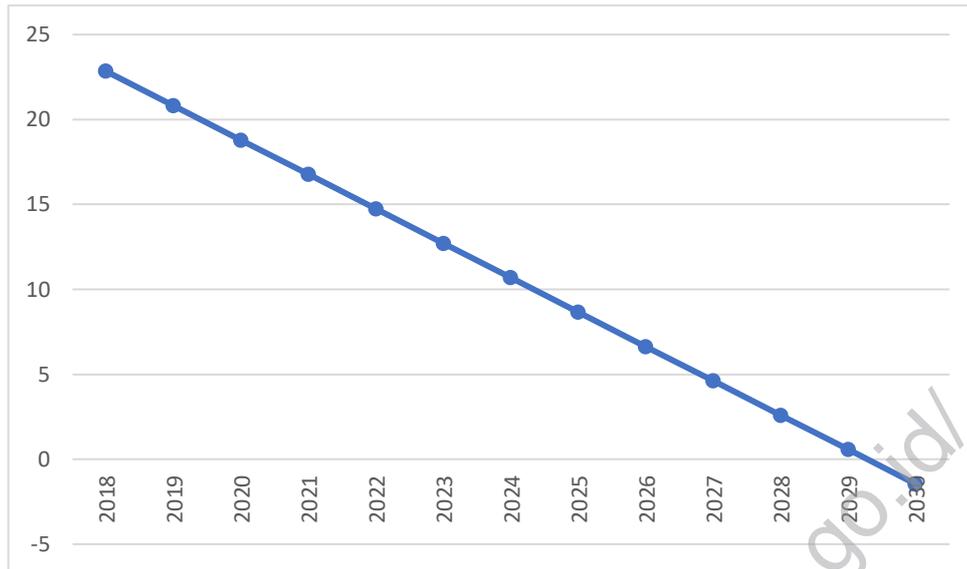
Selain itu, pada Kabupaten Barito Timur target nasional untuk jumlah desa tertinggal adalah berkurang sebanyak 5000 desa. Pada tahun 2020 jumlah desa tertinggal sebanyak 18 dimana berdasarkan hasil proyeksi pada BAU menunjukkan penurunan jumlah desa tertinggal sehingga pada tahun 2030 masih jauh memenuhi target nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya tambahan untuk mencapai target nasional yang ditetapkan. Permasalahan lain yang juga ada pada Kabupaten Barito Timur yakni masih tingginya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Berdasarkan target nasional persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sebesar 14%. Sedangkan pada tahun 2020 persentasenya masih sebesar 19,72%. Berdasarkan hasil proyeksi BAU menunjukkan tren yang menurun sehingga pada tahun 2030 Kabupaten Barito Timur belum mampu mencapai target nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya tambahan untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.



Gambar 6. 21 Proyeksi Jumlah Daerah Tertinggal yang Terentaskan.



Gambar 6. 22 Proyeksi Jumlah Desa Tertinggal.



Gambar 6.23 Proyeksi Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal.

Untuk mencapai ketiga *outcomes* tersebut, diperlukan peranan berbagai pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program (**Tabel 6.7**).

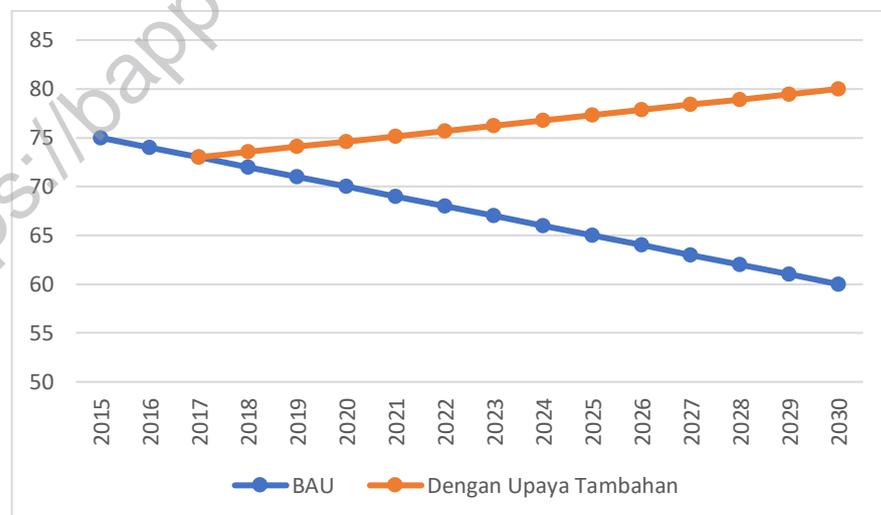
Tabel 6.7 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Peningkatan aksesibilitas antar wilayah desa dan kecamatan	Program Penataan Desa
	Penanganan kemiskinan terpadu lintas sektor berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) yang terkini dan valid.	Program Peningkatan Kerjasama Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa

6.1.8 Skenario Pencapaian Target Kota dan Permukiman (TPB 11)

Sampah merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Barito Timur, terutama dalam hal penanganan/pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan kapasitas TPA yang ada sudah semakin menurun, terkait sisa umur TPA yang semakin pendek, sementara jumlah sampah yang dihasilkan semakin meningkat tiap harinya yang disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Solusi untuk mengatasi hal tersebut di antaranya dengan penambahan kapasitas TPA atau menurunkan jumlah produksi sampah per kapita. Penambahan kapasitas TPA dapat dilakukan melalui perluasan atau pembuatan TPA baru. Namun, pencarian lahan baru yang tepat dan sesuai cukup sulit dilakukan saat ini mengingat adanya keterbatasan lahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membudayakan 3R (reduce, reuse, recycle) sampah atau pengelolaan sampah di tingkat sumber.

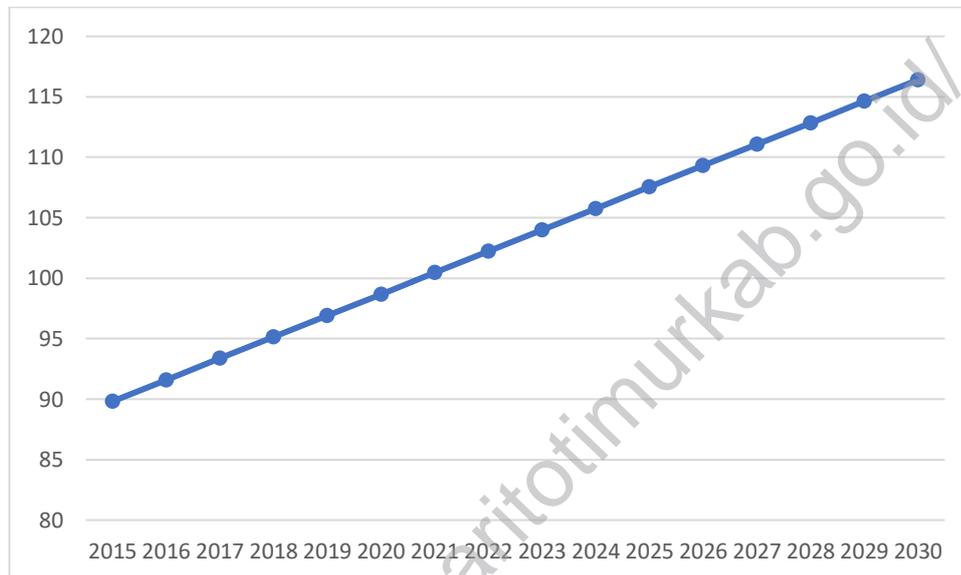
Pada tahun 2017, persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Barito Timur adalah 73% yang menurun dari capaian tahun sebelumnya yaitu 74%. Capaian persentase penanganan sampah ini masih belum mencapai target nasional yaitu 80% pada tahun 2030. Apabila dilakukan dengan skenario BAU, maka pada tahun 2030 Kabupaten Barito Timur hanya dapat menangani 60% timbulan sampah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya tambahan untuk mencapai target penanganana sampah pada tahun 2030 di Kabupaten Baritor Timur.



Gambar 6.24 Proyeksi Persentase Penanganan Sampah

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Selain persentase penanganan sampah, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu persentase rumah tangga layak huni yang ada di Kabupaten Barito Timur. Pada tahun 2019, persentase rumah layak huni di Kabupaten Barito Timur adalah 96,21% dimana capaian ini masih belum mencapai target nasional yaitu 100%. Namun, capaian ini akan mencapai target nasional tanpa perlu upaya tambahan atau cukup dengan skenario BAU.



Gambar 6.25 Proyeksi Persentase Rumah Layak Huni

Berkaitan dengan kondisi kota dan permukiman di Kabupaten Barito Timur tersebut, serta merujuk pada hasil analisis gap yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat tiga (2) *outcomes* yang menjadi target dalam pencapaian TPB 11, yaitu: Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan yaitu penanganan sampah kota dan Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.. Dalam upaya pencapaian ketiga *outcomes* tersebut, diperlukan arahan kebijakan dan arahan program yang ditunjukkan pada Gambar Tabel 6.7.

Tabel 6.8 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 11 Kota dan Permukiman

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan yaitu penanganan sampah kota.	Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan
Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Peningkatan pengembangan rumah layak huni	Program Pengembangan Kawasan Permukiman

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

6.2 Rekomendasi Pencapaian Target sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Subbab ini berisi rekomendasi yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap dan/atau kesenjangan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Barito Timur. Pemberian rumusan rekomendasi ditujukan pada pencapaian sasaran dan target TPB yang akan dicapai dan/atau diprioritaskan untuk dicapai. Rekomendasi diuraikan untuk setiap TPB prioritas di Kabupaten Barito Timur pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.9 Rekomendasi Pencapaian Target sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
1	Tanpa Kemiskinan	Berkurangnya penduduk yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi	Tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pendataan dan pengelolaan data masyarakat yang berhak menerima perlindungan dan jaminan sosial
					Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan akses jaminan sosial dan kesehatan dan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin
					Program peningkatan pemberdayaan sosial	Meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait jaminan kesehatan dan sosial

2	Tanpa Kelaparan	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); meningkatkan konsumsi ikan	Rendahnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan rendahnya tingkat konsumsi ikan.	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Mengoptimalkan produksi pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan perikanan untuk meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
					Program perbaikan gizi masyarakat	Perlunya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
4	Pendidikan Berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Perlunya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
					Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
					Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah seperti lembaga kursus, balai latihan kerja, dll.

					Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Melaukan Penyuluhan Budaya Baca dan Melakukan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan didukung dengan rendahnya daya dukung penyediaan air di Kabupaten Barito Timur	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan rencana pengadaan, peningkatan, dan pengelolaan akses air minum dan air bersih secara merata

		Tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak bagi semua	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Menyediakan dan memelihara layanan sanitasi yang layak dan memadai khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan membangun sarana dan prasarana sanitasi komunal di kawasan permukiman padat dan mengimplementasikan program ODF secara serius.
8	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan persentase tenaga kerja formal	Rendahnya persentase tenaga kerja formal	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program perencanaan tenaga kerja	Mengadakan pendidikan keterampilan dan pelatihan usaha bagi masyarakat miskin khususnya golongan pemuda dan orang dewasa; Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan bagi tenaga kerja potensial/pelaku
		Meningkatkan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Menurunnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja	
				Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa.	Program peningkatan kesejahteraan pelaku agribisnis	

	Mengurangi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja	usaha muda; Memperluas lapangan pekerjaan melalui diversifikasi dan inovasi;
	Mengurangi tingkat setengah pengangguran	Meningkatnya tingkat setengah pengangguran	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja	
	Meningkatkan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Rendahnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata di lingkungan desa/kelurahan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Mengembangkan pariwisata Kabupaten Barito Timur yang sudah ada sehingga memiliki keunggulan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, promosi, dan pemasaran; Peningkatan sarana dan prasarana objek pariwisata;
			Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata Program peningkatan daya tarik pariwisata	
			Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan	Program pengembangan kemitraan	
	Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara	Rendahnya jumlah wisatawan mancanegara	Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program peningkatan daya tarik pariwisata	

11	Kota dan Permukiman	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan yaitu penanganan sampah kota.	Rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani, terutama di kawasan permukiman yang memiliki timbulan sampah yang tinggi	Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
15	Ekosistem Darat	Terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan berkualitas baik, terutama melalui pengelolaan dan peningkatan kawasan hijau, khususnya hutan di Kabupaten Barito Timur	Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Barito Timur melalui pengelolaan dan peningkatan kawasan hijau, penghentian deforestasi, dan pemulihan lahan kritis.	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi lingkungan hidup yang tersinkronisasi dengan penataan ruang dan pembangunan daerah penataan ruang dan pembangunan daerah berkelanjutan, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat berkelanjutan, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan evaluasi lingkungan hidup dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota, termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih rencana dan perizinan antar tingkat pemerintahan yang dapat mengganggu keberjalanan pembangunan yang berkelanjutan.

					Program Pengelolaan Hutan	Pengelolaan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilakukan dengan memperhatikan:
				Peningkatan pengelolaan DAS, pengelolaan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan perlindungan fungsi ekosistem yang berkelanjutan;
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2. Pengendalian dan pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan rehabilitasi hutan serta sertifikasi hutan;
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	3. Integrasi program konservasi sumber daya air atau DAS terpadu dan konservasi sumber daya air tanah;
					Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	

			<p>Peningkatan upaya pengendalian pencemaran, pembinaan, dan pengawasan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya alam.</p>
			<p>Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perhutanan sosial</p>	<p>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</p>	
				<p>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</p>	
				<p>Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p>	
				<p>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p>	

		Tersedianya data dan informasi yang handal mengenai kondisi ekosistem kawasan konservasi dan pemanfaatan hutan di Kabupaten Barito Timur	Ketersediaan data mengenai kondisi ekosistem kawasan konservasi dan pemanfaatan hutan di Kabupaten Barito Timur masih minim.	Peningkatan pengadaan, pemanfaatan, dan publikasi data dan informasi lingkungan hidup maupun potensi sumber daya kehutanan yang berkualitas	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Penyelenggaraan Statistik Sektor Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penelitian dan pengembangan daerah bidang lingkungan hidup dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi lingkungan hidup maupun potensi sumber daya kehutanan yang berkualitas dan tersinkronisasi dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
--	--	--	--	---	--	---

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
1	Tanpa Kemiskinan	Berkurangnya penduduk yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi	Tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program peningkatan pemberdayaan sosial	Pendataan dan pengelolaan data masyarakat yang berhak menerima perlindungan dan jaminan sosial Meningkatkan akses jaminan sosial dan kesehatan dan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin Meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait jaminan kesehatan dan sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
		Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua	Tingginya persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pemberian Bimbingan Sosial dan bantuan kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
			Rendahnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap pendidikan	Rendahnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Barito Timur	Peningkatan literasi dan penuntasan buta aksara pendidikan umum	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Peningkatan pemberian kesempatan pendidikan wajib belajar bagi masyarakat miskin
2	Tanpa Kelaparan	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan	Rendahnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Mengoptimalkan produksi pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan perikanan untuk meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
		oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); meningkatkan konsumsi ikan	rendahnya tingkat konsumsi ikan.		Program perbaikan gizi masyarakat	Perlunya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menurunkan angka kematian bayi dan balita.	Meningkatnya Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak dan penurunan perkawinan usia anak	<p>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.</p> <p>Program pembinaan Keluarga Berencana (KB).</p> <p>Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.</p>	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan:</p> <p>1. Pemenuhan upaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan layanan kesehatan untuk rujukan, serta pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak.</p> <p>2. Penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman untuk kesehatan ibu dan anak. Penurunan angka perkawinan usia anak dengan pembinaan Keluarga Berencana melalui kegiatan advokasi, promosi, dan KIE program KKBPK.</p>

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
				Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan melakukan perencanaan kebutuhan, pengembangan mutu, dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan khususnya pada bidang kesehatan ibu dan anak.
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan melalui peran posyandu dan penyuluhan imunisasi.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Pemberdayaan peran serta masyarakat khususnya kaum perempuan pada kegiatan posyandu dan penyuluhan imunisasi.
				Peningkatan mutu gizi, ketahanan dan keamanan pangan bagi ibu hamil, bayi dan balita.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Peningkatan mutu gizi ibu hamil, bayi, dan balita dengan pemenuhan upaya kesehatan melalui pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat. Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan ibu hamil,

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan	bayi dan balita dengan: 1. Penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan. 2. Penanganan kerawanan pangan. 3. Pengawasan keamanan pangan segar. 4. Peningkatan ekonomi keluarga.
	Mengakhiri epidemi dan penyakit menular. Mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular.	Tingginya prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, dan epidemi bagi semua gender dan kalangan masyarakat.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	Peningkatan pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular, dan epidemi dengan: 1. Pemenuhan upaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan layanan kesehatan untuk rujukan, pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, serta pengelolaan pelayanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB). 2. Penyediaan farmasi, alat

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
						kesehatan, makanan, dan minuman khusus untuk penyakit menular, tidak menular, dan epidemi.
				Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan dengan melakukan perencanaan kebutuhan, pengembangan mutu, dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan khususnya pada bidang kesehatan penyakit menular, tidak menular, dan epidemi.
				Peningkatan penelitian dan pengembangan terkait epidemi, penyakit menular dan tidak menular.	Program penelitian dan pengembangan daerah.	Penelitian dan pengembangan daerah dalam hal penyakit menular, tidak menular, dan epidemi.
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	
				Pembinaan dan pemantauan terkait pencegahan epidemi dan penyakit menular	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Pembinaan masyarakat dan pemantauan masyarakat untuk pencegahan penyakit menular dan epidemi dengan:
					Program pemberdayaan sosial.	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
			bagi semua gender dan kalangan masyarakat.	<p>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.</p> <p>Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penyuluhan terkait penyakit menular dan epidemi dan cara pencegahannya. 2. Pemberdayaan peran masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan dan penularan. 3. Peningkatan ketertiban dan penegakkan aturan tentang pencegahan penularan.
			Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat dengan pemberdayaan masyarakat dalam KIE perilaku hidup bersih dan sehat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
				Program pemberdayaan sosial.	
	Mengurangi tingkat kejadian penyakit malaria per 1000 orang	Masih tingginya kejadian penyakit malaria per 1000 orang	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular, dan pandemi dengan cara: a. pemenuhan upaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, dan layanan kesehatan untuk rujukan, pengelolaan pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa (KLB). b. Penyediaan farmasi, alat
	Mengurangi persentase penduduk < 18 tahun yang merokok	Masih tingginya persentase penduduk < 18 tahun yang merokok		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat	
	Mengurangi tingkat prevalensi tekanan darah tinggi	Masih tingginya tingkat prevalensi tekanan darah tinggi		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
	Mengurangi tingkat prevalensi obesitas pada umur < 18 tahun	Masih tingginya tingkat prevalensi obesitas pada umur < 18 tahun		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	kesehatan, makanan, dan minuman khusus untuk penyakit menular, dan epidemi. 2. Pembinaan masyarakat dan pemantauan masyarakat untuk pencegahan penyakit menular, tidak menular, dan epidemi. 3. Penurunan angka perkawinan usia anak dengan pembinaan Keluarga Berencana melalui kegiatan advokasi, promosi, dan KIE program KKBPK
Meningkatkan angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Masih rendahnya angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin		Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat		
Meningkatkan jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan	Masih rendahnya jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk				

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
		masyarakat per 1000 penduduk				
		Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan nasional	Masih rendahnya cakupan jaminan kesehatan nasional		Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
4	Pendidikan Berkualitas	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan dengan: 1. Pemenuhan upaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan layanan kesehatan untuk rujukan, pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi dan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. 2. Penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman untuk kesehatan dasar dan reproduksi.
					Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
					Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah seperti lembaga kursus, balai latihan kerja, dll.
					Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Melaukan Penyuluhan Budaya Baca dan Melakukan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan didukung dengan rendahnya daya dukung penyediaan air di Kabupaten Barito Timur	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan rencana pengadaan, peningkatan, dan pengelolaan akses air minum dan air bersih secara merata
		Tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak bagi semua	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Menyediakan dan memelihara layanan sanitasi yang layak dan memadai khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan membangun sarana dan prasarana sanitasi komunal di kawasan permukiman padat dan mengimplementasikan program ODF secara serius.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
8	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan persentase tenaga kerja formal	Rendahnya persentase tenaga kerja formal	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Mengadakan pendidikan keterampilan dan pelatihan usaha bagi masyarakat miskin khususnya golongan pemuda dan orang dewasa; Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan bagi tenaga kerja potensial/pelaku usaha muda; Memperluas lapangan pekerjaan melalui diversifikasi dan inovasi;
		Meningkatkan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Menurunnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa.	Program perencanaan tenaga kerja Program peningkatan kesejahteraan pelaku agribisnis	
		Mengurangi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis	Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
	kelamin dan kelompok umur				
	Mengurangi tingkat setengah pengangguran	Meningkatnya tingkat setengah pengangguran	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja	
	Meningkatkan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Rendahnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata di lingkungan desa/kelurahan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Mengembangkan pariwisata Kabupaten Barito Timur yang sudah ada sehingga memiliki keunggulan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, promosi, dan pemasaran; Peningkatan sarana dan prasarana objek pariwisata;
		Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	Program peningkatan daya tarik pariwisata	
		Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan		Program pengembangan kemitraan	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
		Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara	Rendahnya jumlah wisatawan mancanegara	Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program peningkatan daya tarik pariwisata	
10	Berkurangnya Kesenjangan	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Tingginya jumlah daerah tertinggal yang belum terentaskan.	Peningkatan aksesibilitas antar wilayah desa dan kecamatan	Program Penataan Desa	Fasilitas kerjasama antar desa dan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
			Masih banyaknya jumlah desa tertinggal.	Penanganan kemiskinan terpadu lintas sektor berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) yang terkini dan valid.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal masih tinggi		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pendataan penduduk miskin dan pengelolaan data fakir miskin di desa untuk pemberian bantuan pemberdayaan masyarakat miskin

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Outcomes	Gap/Kekurangan	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi
11	Kota dan Permukiman	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan yaitu penanganan sampah kota.	Rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani, terutama di kawasan permukiman yang memiliki timbulan sampah yang tinggi	Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA

6.3 Integrasi KLHS dalam Perubahan RPJMD

Integrasi rekomendasi KLHS dalam perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023 dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dimuat sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023. Integrasi ini juga dilakukan sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus dilengkapi dengan proses penyusunan KLHS, sehingga isu prioritas dan rekomendasi yang telah disepakati dalam Konsultasi Publik I dan II akan ditindaklanjuti dengan mengintegrasikannya ke dalam perubahan RPJMD. Berikut matriks integrasi KLHS dan perubahan RPJMD yang menunjukkan tindak lanjut penyempurnaan kebijakan sebagaimana yang ditampilkan pada **Tabel 6.12**.

Tabel 6. 10 Integrasi KLHS dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2021-2023

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
		Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
1	Tanpa Kemiskinan	Berkurangnya penduduk yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi	Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pendataan dan pengelolaan data masyarakat yang berhak menerima perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapat bantuan
				Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan akses jaminan sosial dan kesehatan dan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
				Program peningkatan pemberdayaan sosial	Meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait jaminan kesehatan dan sosial	Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial	Rasio tenaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan
	Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pemberian Bimbingan Sosial dan bantuan kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase jumlah penduduk miskin yang menerima jaminan pelayanan kesehatan	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
				Pengemis dan Masyarakat Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		
	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap pendidikan	Peningkatan literasi dan penuntasan buta aksara pendidikan umum	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan pemberian kesempatan pendidikan wajib belajar bagi masyarakat miskin	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
		Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
2	Tanpa Kelaparan	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); meningkatkan konsumsi ikan	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Mengoptimalkan produksi pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan perikanan untuk meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Program perbaikan gizi masyarakat	Perlunya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menurunkan angka kematian bayi dan balita.	Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak dan penurunan perkawinan usia anak	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan: 1. Pemenuhan upaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Program pembinaan Keluarga Berencana (KB).			

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
			Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	<p>layanan kesehatan untuk rujukan, serta pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak.</p> <p>2. Penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman untuk kesehatan ibu dan anak. Penurunan angka perkawinan usia anak dengan pembinaan Keluarga Berencana melalui kegiatan advokasi, promosi, dan KIE program KKBPK.</p>	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	Persentase sarana kefarmasian yang berizin

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan dengan melakukan perencanaan kebutuhan, pengembangan mutu, dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan khususnya pada bidang kesehatan ibu dan anak.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	Persentase SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan melalui peran posyandu dan penyuluhan imunisasi.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Pemberdayaan peran serta masyarakat khususnya kaum perempuan pada kegiatan posyandu dan penyuluhan imunisasi.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS
			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
		Peningkatan mutu gizi, ketahanan dan keamanan pangan bagi ibu hamil, bayi dan balita.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Peningkatan mutu gizi ibu hamil, bayi, dan balita dengan pemenuhan upaya kesehatan melalui pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat. Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan ibu hamil, bayi dan balita dengan: 1. Penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan. 2. Penanganan kerawanan pangan. 3. Pengawasan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Tingkat penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rawan pangan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	keamanan pangan segar. 4. Peningkatan ekonomi keluarga.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi
	Mengakhiri epidemi dan penyakit menular. Mengurangi angka kematian	Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular, tidak	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular, dan epidemi dengan: 1. Pemenuhan upaya kesehatan melalui	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
	dini akibat penyakit tidak menular.	menular, dan epidemi bagi semua gender dan kalangan masyarakat.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	<p>pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan layanan kesehatan untuk rujukan, pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, serta pengelolaan pelayanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).</p> <p>2. Penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman khusus untuk penyakit menular, tidak menular, dan epidemi.</p>	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	Persentase sarana kefarmasian yang berizin

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan dengan melakukan perencanaan kebutuhan, pengembangan mutu, dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan khususnya pada bidang kesehatan penyakit menular, tidak menular, dan epidemi.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya
		Peningkatan penelitian dan pengembangan terkait epidemi, penyakit menular dan tidak menular.	Program penelitian dan pengembangan daerah. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Penelitian dan pengembangan daerah dalam hal penyakit menular, tidak menular, dan epidemi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
		Pembinaan dan pemantauan terkait pencegahan epidemi dan penyakit menular bagi semua gender dan kalangan masyarakat.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Pembinaan masyarakat dan pemantauan masyarakat untuk pencegahan penyakit menular dan epidemi dengan: 1. Penyelenggaraan penyuluhan terkait penyakit menular dan epidemi dan cara pencegahannya. 2. Pemberdayaan peran masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan dan penularan. 3. Peningkatan	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS
			Program pemberdayaan sosial.		Program pemberdayaan sosial.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
			Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.	ketertiban dan penegakkan aturan tentang pencegahan penularan.		
		Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat dengan pemberdayaan masyarakat dalam KIE perilaku hidup bersih dan sehat.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
			Program pemberdayaan sosial.		Program pemberdayaan sosial.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan
	Mengurangi tingkat kejadian penyakit malaria per 1000 orang	Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas saptas kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular, dan pandemi dengan cara: a. pemenuhan upaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe C, pembangunan puskesmas, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, dan layanan kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
	Mengurangi persentase penduduk < 18 tahun yang merokok					
	Mengurangi tingkat prevalensi tekanan darah tinggi					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
				untuk rujukan, pengelolaan pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa (KLB). b. Penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman khusus untuk penyakit menular, dan epidemi.		kesehatan sesuai standar
	Mengurangi tingkat prevalensi obesitas pada umur < 18 tahun			2. Pembinaan masyarakat dan pemantauan masyarakat untuk pencegahan penyakit menular, tidak menular, dan epidemi.		
	Meningkatkan angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin			3. Penurunan angka perkawinan usia anak		

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
		Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
		Meningkatkan jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk			dengan pembinaan Keluarga Berencana melalui kegiatan advokasi, promosi, dan KIE program KKBPK		
		Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan nasional					
4	Pendidikan Berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
				<p>Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah seperti lembaga kursus, balai latihan kerja, dll.</p>		<p>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs</p>
				<p>Melakukan Penyuluhan Budaya Baca dan Melakukan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</p>		<p>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar</p>
						<p>Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama</p>

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
		Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak		Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan rencana pengadaan, peningkatan, dan pengelolaan akses air minum dan air bersih secara merata	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
	Tercapainya akses terhadap sanitasi yang layak bagi semua	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Menyediakan dan memelihara layanan sanitasi yang layak dan memadai khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan membangun sarana dan prasarana sanitasi komunal di kawasan permukiman padat dan mengimplementasikan program ODF secara serius.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD		
		Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan	
8	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan persentase tenaga kerja formal	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Mengadakan pendidikan keterampilan dan pelatihan usaha bagi masyarakat miskin khususnya golongan pemuda dan orang dewasa; Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan bagi tenaga kerja potensial/pelaku usaha muda; Memperluas lapangan pekerjaan melalui diversifikasi dan inovasi;		Tingkat pelaksanaan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	
				Program perencanaan tenaga kerja				
		Meningkatkan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja			Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
			Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa.	Program peningkatan kesejahteraan pelaku agribisnis			Program peningkatan kesejahteraan pelaku agribisnis	Tercapainya kesejahteraan pelaku agribisnis

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
	Mengurangi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif	Program perencanaan tenaga kerja		Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
	Mengurangi tingkat setengah pengangguran	Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif				
	Meningkatkan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata di lingkungan desa/kelurahan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Mengembangkan pariwisata Kabupaten Barito Timur yang sudah ada sehingga memiliki keunggulan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, promosi, dan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dipasarkan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
	Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
		Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	pemasaran; Peningkatan sarana dan prasarana objek pariwisata;	Program pengembangan destinasi pariwisata	1. Jumlah destinasi wisata unggulan yang dikembangkan. 2. Jumlah kunjungan wisatawan 3. Jumlah kontribusi PDRB sektor pariwisata.
			Program peningkatan daya tarik pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara 2. Persentase peningkatan wisatawan nusantara
		Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan	Program pengembangan kemitraan		Program pengembangan kemitraan	Jumlah kegiatan pameran dan kelompok sadar wisata yang dibina.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
		Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
		Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara	Peningkatan pengelolaan daerah/objek pariwisata	Program peningkatan daya tarik pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara 2. Persentase peningkatan wisatawan nusantara
10	Berkurangnya Kesenjangan	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari	Peningkatan aksesibilitas antar wilayah desa dan kecamatan	Program Penataan Desa	Fasilitas kerjasama antar desa dan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Presentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		KLHS Perubahan RPJMD				Integrasi Dalam Perubahan RPJMD	
		Outcomes	Arah Kebijakan	Arah Program	Rekomendasi	Program Pembangunan	Indikator Pembangunan
		rata-rata nasional.	Penanganan kemiskinan terpadu lintas sektor berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) yang terkini dan valid.	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama antar Desa yang difasilitasi
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pendataan penduduk miskin dan pengelolaan data fakir miskin di desa untuk pemberian bantuan pemberdayaan masyarakat miskin	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang difasilitasi
11	Kota dan Permukiman	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan yaitu penanganan sampah kota.	Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan

BAB VII KESIMPULAN

7.1 Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Barito Timur

7.1.1 Daya Dukung Pangan

Daya dukung energi pangan di Kabupaten Barito Timur di hitung berdasarkan kebutuhan kalori yang dibutuhkan setiap orang dibandingkan dengan ketersediaan energi yang dapat didukung oleh tanaman pangan khususnya sawah di Kabupaten Barito Timur. Secara keseluruhan, semua kecamatan di Kabupaten Barito Timur masih memiliki status energi pangan belum terlampaui atau defisit, artinya lahan pertanian yang terdapat di Kabupaten Barito Timur masih mampu mendukung kebutuhan pangan untuk masyarakat Barito Timur.

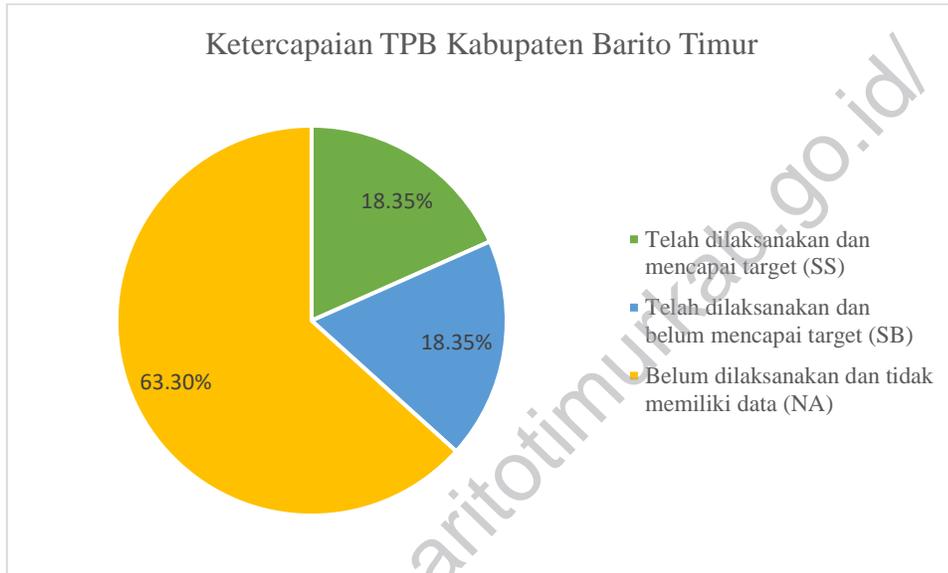
7.1.2 Daya Dukung Air

Daya dukung air di Kabupaten Barito Timur dilakukan berdasarkan analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik. Kondisi ketersediaan air di Kabupaten Barito Timur seluruhnya surplus.

7.2 Hasil Analisis Capaian Kabupaten Barito Timur terhadap Indikator TPB

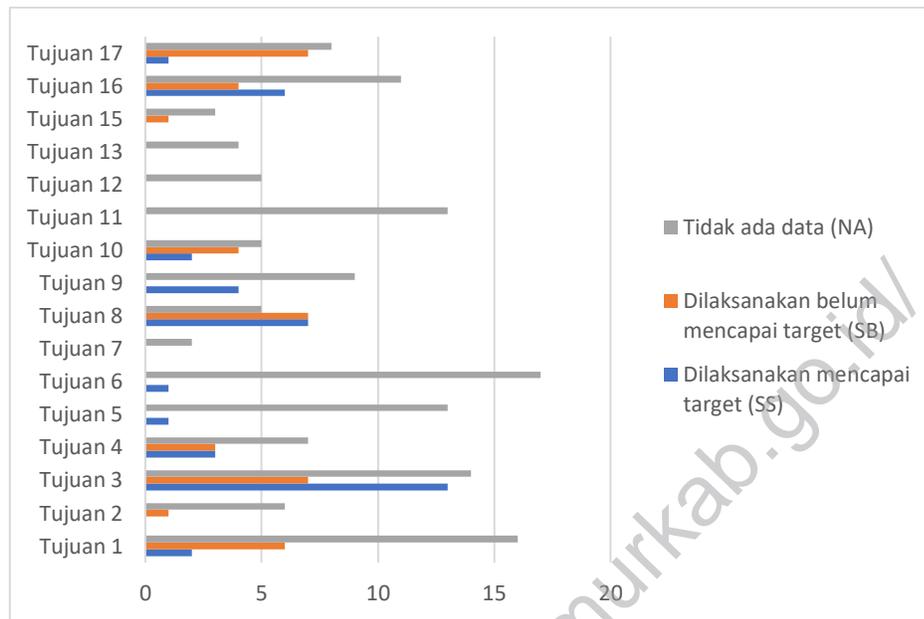
Secara umum terdapat sekitar 36,70% dari 222 indikator TPB yang relevan untuk Kabupaten Barito Timur yang telah diisi. Sementara 63,30% sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data. Dari banyak indikator TPB yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten telah dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Timur yaitu 40 indikator atau sekitar 18,35% telah mencapai target nasional yang ditetapkan Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 40 indikator atau sekitar 18,35% sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, dan 138 indikator atau 63,30% belum ada datanya. Berdasarkan hasil pelaksanaan TPB jumlah indikator yang telah

diisi dan mencapai target memiliki jumlah yang sama dengan indikator yang belum mencapai target. Komposisi ketercapaian target TPB Kabupaten Barito Timur hingga tahun 2020 dapat dilihat pada **Gambar 7.1**



Gambar 7. 1 Ketercapaian indikator Kabupaten Barito Timur terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sementara itu, total pencapaian indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB beserta dengan rincian masing-masing kelompok capaian dapat dilihat pada **Gambar 7.2**



Gambar 7. 2 Capaian TPB setiap tujuan Kabupaten Barito Timur

7.3 Hasil Analisis Capaian OPD Kabupaten Barito Timur terhadap indikator TPB

7.3.1 Capaian indikator TPB organisasi perangkat daerah pilar sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, adalah Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, Tujuan 5. Total jumlah indikator pada pilar sosial adalah 92 indikator, dengan indikator tercapai sebanyak 19 indikator. Berikut merupakan capaian TPB dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

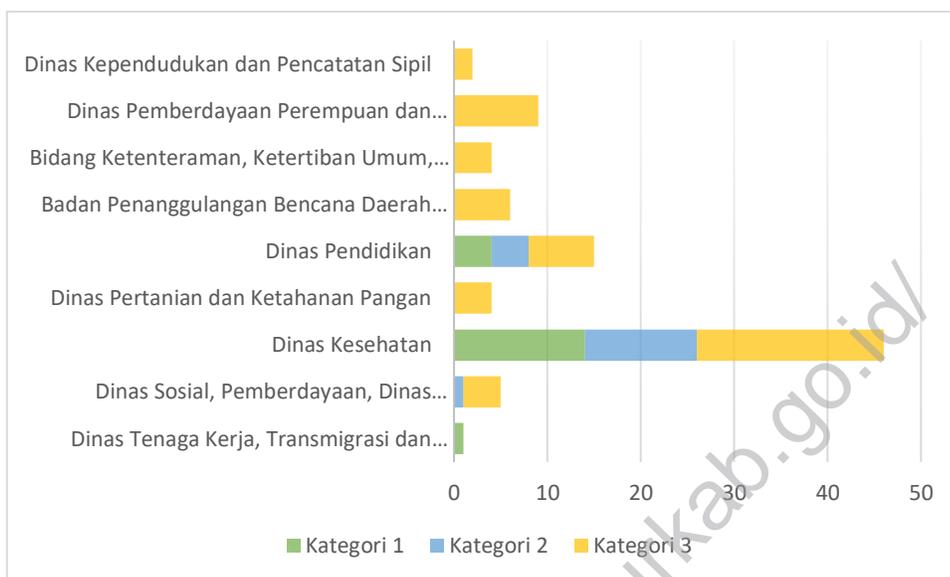
Tabel 7. 1 Capaian Indikator TPB Pilar Sosial Setiap OPD

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	1	0	0
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur	0	1	4
3	Dinas Kesehatan	14	12	20

4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0	4
5	Dinas Pendidikan	4	4	7
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	0	0	6
7	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	4
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	9
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	2

Sumber: Hasil analisis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 9 OPD yang memiliki wewenang pada pilar sosial. Dinas Kesehatan merupakan OPD yang telah menyelesaikan indikator terbanyak, yaitu 14 indikator. Total indikator yang telah diselesaikan dalam pilar sosial ini sebanyak 29 indikator atau 32,5%, indikator yang belum diselesaikan sebanyak 19 indikator dan indikator TPB yang belum memiliki data dalam pilar sosial sebanyak 56 indikator.



Gambar 7. 3 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Sosial

7.3.2 Capaian indikator TPB organisasi perangkat daerah pilar lingkungan

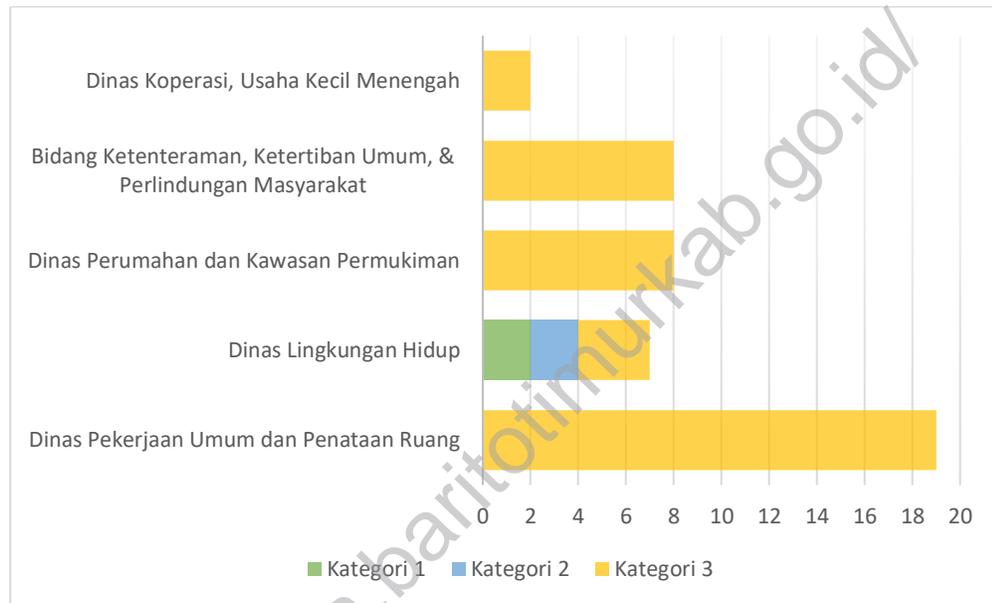
Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan antara lain Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14, dan Tujuan 15. Total jumlah indikator pilar lingkungan adalah 44 indikator. Berikut merupakan capaian indikator TPB oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Tabel 7. 2 Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan Setiap OPD

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	19
2	Dinas Lingkungan Hidup	2	2	3
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	8
4	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	8
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	0	0	2

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 OPD yang berwenang atas pilar lingkungan dengan 6 tujuan. Dimana indikator yang telah diselesaikan sebanyak 2 indikator dari total indikator pilar lingkungan. Indikator yang belum diselesaikan sebanyak 2 indikator dan indikator yang tidak memiliki data pada pilar lingkungan sebanyak 40 indikator dari indikator keseluruhan.



Gambar 7.4 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Lingkungan

7.3.3 Capaian indikator TPB organisasi perangkat daerah pilar ekonomi

Pilar ekonomi mencakup 5 tujuan pada pembangunan berkelanjutan antara lain tujuan 7, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10, dan tujuan 17. Total jumlah indikator pada pilar ekonomi adalah 50 indikator. Berikut merupakan capaian indikator TPB oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah Terkait).

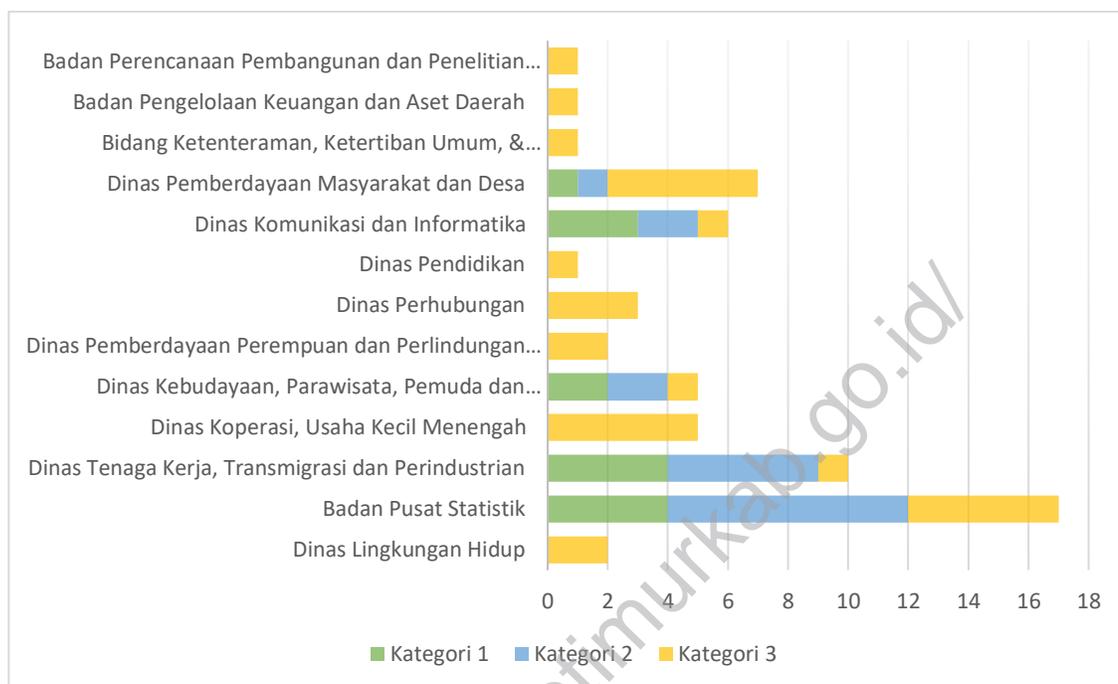
Tabel 7.3 Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi Setiap OPD

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	2
2	Badan Pusat Statistik	4	8	5
3	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	4	5	1

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	0	0	5
5	Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur	2	2	1
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	2
7	Dinas Perhubungan	0	0	3
8	Dinas Pendidikan	0	0	1
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	2	1
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	5
11	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	1
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	1
13	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0	0	1

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, OPD terkait yang berwenang atas pilar ekonomi terdiri dari 13 OPD. Masing-masing OPD memiliki wewenang terhadap indikator TPB dimana, total indikator yang telah diselesaikan adalah 14 indikator, sedangkan indikator TPB yang belum diselesaikan adalah 18 indikator, dan indikator yang belum memiliki data adalah 29 indikator.



Gambar 7. 5 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Ekonomi

7.3.4 Capaian indikator TPB organisasi perangkat daerah pilar hukum

Pilar Hukum hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan ke 16 dengan total indikator 21 indikator. Berikut merupakan capaian indikator TPB yang oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

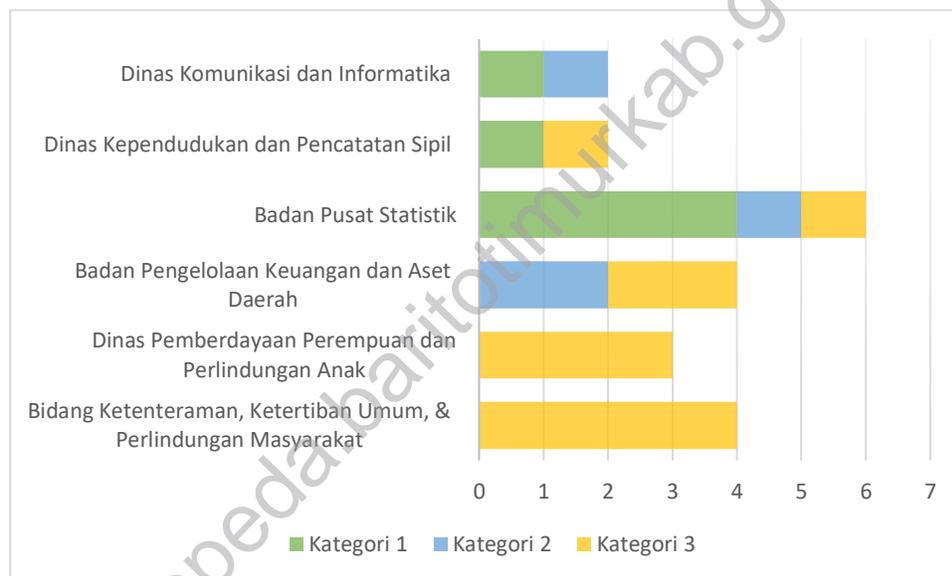
Tabel 7. 4 Capaian Indikator TPB Pilar Hukum Setiap OPD

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
1	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	4
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	3
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	2	2
4	Badan Pusat Statistik	4	1	1
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0	1

No.	OPD	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	0

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator TPB yang telah selesai ada 6 indikator dari total indikator pilar hukum. Capaian indikator yang belum terselesaikan ada 4 indikator dan indikator yang belum memiliki data adalah 11 indikator dari total indikator pilar hukum.



Gambar 7.6 Kontribusi OPD dalam Capaian Indikator Pilar Hukum

7.4 Rekomendasi bagi Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan hasil integrasi keterkaitan dengan tujuan pembangunan dengan indikator TPB yang relevan maka didapatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu diperhatikan dan menjadi fokus Kabupaten Barito Timur adalah:

TPB 1 Tanpa Kemiskinan

TPB 2 Tanpa Kelaparan

TPB 4 Pendidikan Berkualitas

TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

TPB 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

TPB 15 Ekosistem Daratan

Rekomendasi bagi Kabupaten Barito Timur adalah mengintegrasikan rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Barito Timur 2021-2023 untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dimuat sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2021-2023. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus dilengkapi dengan proses penyusunan KLHS, sehingga isu strategis yang telah diidentifikasi oleh Tim Penyusun akan ditindaklanjuti dengan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD. Bagian dari KLHS yang diadaptasi meliputi:

1. Permasalahan di Kabupaten Barito Timur yang selaras dengan sasaran dan target sasaran RPJMD namun belum menjadi fokus dalam RPJMD
2. Rumusan alternatif yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan pada kebijakan pembangunan RPJMD
3. Gambaran tujuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dan diakomodasi dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020). *Indonesia Population Projection*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembar Negara RI Tahun 2009*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet RI.

LAMPIRAN

Lampiran A Target Indikator Capaian TPB Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%			6,56	6,32	6,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	41,18	60,68	86,47	75,49	85,64	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	35,42	34,15	38,02	59,47	68,17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	7,51	15,50	180	235	280	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	805	801	1.706	1.646	1.027	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	74,30	77,10		81,92	63,54	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	7,72	7,52	79,9	70	70	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	68,38	-	64,2	72	72	Dinas Kesehatan / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	-	68,32				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	-	86,51				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	83,71	99,37	98,47	98,67	98,87	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	59,39	76,95	75,33	78,85	76,33	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	-	90,20				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	-	-				Bidang energi & sumber daya mineral

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	-	-				Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	10	10				Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	5,508	7,516	12,298	66	4,33	Dinas Sosial, trantiblinmas Kabupaten Barito Timur
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	-	-				Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	-	-				Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada						Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat			-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat			-	-	0,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%			5,8	14,7%	12%	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	116,946	-	175	131		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	4.679,00	4.662,00		25,86%	18,63%	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	-	1,63		14,9%	12,9%	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun				12,3%	9,5%	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	14,15	14,57		15,9%	12,16%	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	36,73	26,63		42,18%	62,89%	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	86,80	89,70	82,3	84,3	85,7	Dinas Kesehatan / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	49993478,76	52710979,15	54584793,77			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306		50/10000	0	110	220/100.000 0	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%			100	69,03	68,46	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	70,97	77,07	59,2	56,55	63,54	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun			5	9,4	8,8/1000	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun			4,3	8,3	6,6/1000	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	0,67	0,81	1,1	8,8	8,3/1000	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	100,00	100,00	79,9	100,00	100,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	0,01	0,01	5	12	11	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	0,12	0,12	126	79	74	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	-	-	0,01	0,01	0,02	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	SUDAH ELIMINASI	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur				
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	-	-	ADA	ADA	ADA	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	-	-	6	3	1	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.	BELUM ADA	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur				

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	6,4	5,9	5,6	5,4	9,1	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	24,77	24,28	23,79	23,38	42,8	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	15,6	15,7	15,8	15,9	21,8	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun			-	-	1	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	11	11	11	11	11	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	-	-	-	-	2	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%			64,3	70	72	Dinas Kesehatan / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	26,82	10,55	-	8,1	8,3	Dinas Kesehatan / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
								Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	193,25	-				Dinas Kesehatan / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38						Dinas Kesehatan / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	6,19	5,52				Dinas Kesehatan / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	-	-	6,76	6,84	7,2	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat			10,99	9,89	8,41	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	43,16	60,69	86,47	75,49	85,64	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	-	-				Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat			-	-	82	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat			100	100	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat			-	92	102,4	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat			-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	28,57	28,57	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	42,86	42,86	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	95,45	100,00	109,65	107,24	106,03	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	80,68	88,00	82,45	89,95	83,45	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	-	12,00	9,04	9,19	9,27	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	72,11	75,48	55	68,60	68,65	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	-	-	99,95	99,95	99,97	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	-	-	99,69	99,69	99,70	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa	Meningkat	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
	disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).							
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	-	0,04				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	-	100,00				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	-	-				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	-	-				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat		20,00				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat		12,20				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	-	12,52				Dinas Kesehatan / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	-	-				Dinas Kesehatan / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	-	-	78,34	78,34	80,51	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	-	-				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Barito Timur
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m ³ /detik	-	-				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Barito Timur
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	-	-				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Barito Timur
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	-	-				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	-	-				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	95,00	100,00				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	24,00	47,00				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	-	-				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	-	-				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	-	-				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	-	-				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Meningkat	-	-	2 bendungan tercemar	2 bendungan tercemar	2 bendungan tercemar	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	-	-	9 sungai tercemar, 1 sungai tidak tercemar	9 sungai tercemar, 1 sungai tidak tercemar	8 sungai tercemar	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Ada	-	-	belum ada	belum ada	belum ada	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada	-	-	belum ada	belum ada	belum ada	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kabupaten, Perumahan dan Kawasan Permukiman Barito Timur
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	-	-				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	-	-				Bidang Kehutanan
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada	-	-				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%			belum ada	belum ada	belum ada	SETDA / Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)						SETDA / Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat			2,89	2,69	5,21	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	48,1 jt	52,6 jt	57 jt	59,5 jt	54,56 jt	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat			57	59,5	54,56	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat			62,1	60,3	69,11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	6,63	6,18	37,89	39,69	30,88	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	52,23	53,37	52,2	46,24	35,3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	-	-				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat		16526	17352	17924	belum ada	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun		4,68	3,5	2,89	2,91	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	2,14	2,20	51,88	50,83	68,33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat			53,45	53,35	54,43	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	5,83	0,06	0,09	0,45	1,17	Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	37	45	9	4	10	Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	11,03	11,129	11.138	13.283	15.300	Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	1.660.487.237	6.126.000	8.372.000	11.354.000	64.683.000	Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	259	264	270	313	500	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	-	-				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	-	-				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	1000 Km (skala nasional)	57,59	68,13				Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambah 3.258 km	-	-				Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	-	-				Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	24 pelabuhan (skala nasional)	-	-				Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat			2,81	3,57	10,32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	-	61,17	75,73	75,73	75,73	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	-	-	78,34	78,34	80,51	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	22,11	28,96	34,53	39,65	47,10	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36			-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	-	-	6,56	6,32	6,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)			8	8	9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)			33	25	18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa			0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat			-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurun menjadi 14%			23,77	18,93	19,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun			-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada						Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta			38,02	59,47	68,17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	-	-				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	5 metropolitan (skala nasional)						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Ada						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun						Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunmenjadi 30%	-	-				Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ada	-	-				Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	-	-				Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	-	-	91,2	92,59	93	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Meningkat/Ada	-	-	belum ada	belum ada	ada baru tahap 1, Lokasi komplek pelajar ±2 hektar	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/Ada	-	-				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Ada						Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	-	-	tertangani di pengumpul/ pihak ke 3 yang berizin (\pm 70 ton)	tertangani di pengumpul/ pihak ke 3 yang berizin (\pm 70 ton)	tertangani di pengumpul/ pihak ke 3 yang berizin (\pm 82 ton)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	-	-	belum ada	belum ada	belum ada	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	-	-				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	-	-	belum ada	belum ada	belum ada	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	-	-				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada						Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun						Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.				belum ada	belum ada	belum ada	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).				-	-	5	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	-	27,77				Bidang kehutanan
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	-	-				KPHP Barito Hilir / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Ada						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	-	-	belum ada	belum ada	24	KPHP Barito Hilir / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun						Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	-	-				Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun						Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya.	Meningkat						Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0			-	-	-	Inspektorat Kab. Bartim / Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65%						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%				cc/83,4		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkat menjadi 80%			13,77	93,07	85,83	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten: 45%				-	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten: 80%						Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Barito Timur
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat			113.385 (5,4%)	113.974 (6,5%)	114.527 (6,6%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%			46%	47%	28%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	2	2	1	1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada						Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaa (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat mejadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi	-	61,17	75,73	75,73	75,73	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	22,11	28,96	34,53	39,65	47,10	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%	-	52,43	56,31	57,28	73,78	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Ada						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Ada						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat			100	100	96,61	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat			80,65	90	80,65	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur

KODE	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - Ringkasan	TAHUN					OPD/ Dinas
			2016	2017	2018	2019	2020	
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat			10	10	6	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat						Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Barito Timur
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada			-	-	-	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat			4.344	9.104	7.249	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat			100	100	87,21	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>